



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur, Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah Subhanahuwata'ala, bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 telah dapat disusun dengan baik.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat 1 yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan ini dilaksanakan sebagai salah satu pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance).

Akhir kata, kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan maka kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan laporan ini. Terimakasih kami haturkan kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan ini

Padang, Februari 2022

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Kepala



MEDI ISWANDI, ST, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19641013 199103 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Penjelasan Umum	1
1.1.1 Undang-Undang Pembentukan Daerah	1
1.1.2 Data Geografis wilayah.....	1
1.1.3 Jumlah Penduduk.....	3
1.1.4 Jumlah Kabupaten dan Kota	5
1.2. Perencanaan Pembangunan	5
1.2.1 Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah.....	5
1.2.2 Visi dan Misi Kepala Daerah	24
1.2.3 Program Pembangunan Daerah	27
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	33
2.1. Capaian Kinerja Makro	33
2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia	33
2.1.2 Angka Kemiskinan	38
2.1.3 Angka Pengangguran.....	42
2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi.....	43
2.1.5 PDRB per Kapita	47
2.1.6 Ketimpangan Pendapatan	48
BAB III KINERJA BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020.....	50
3.1. Gambaran Organisasi	50
3.1.1 Dasar Pembentukan Organisasi	50
3.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	51
3.1.3 Srtuktur Organisasi	53
3.1.4 Dukungan Sumber Daya Manusia	55
3.1.5 Dukungan Sarana dan Prasarana.....	57
3.2. Tujuan dan Sasaran	58
3.2.1 Tujuan.....	58
3.2.2 Sasaran	58
3.3. Program dan Kegiatan.....	60
3.4. Pencapaian Target Kinerja Sasaran Strategis	65
3.5. Pencapaian Target Kinerja Keuangan	68
3.6. Pencapaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	69
BAB IV PENUTUP	85
4.1. Kesimpulan	85
4.2. Saran	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Sumatera Barat Menurut Kab/Kota Tahun 2016-2021	4
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk (Sek Ratio) di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021	6
Tabel 1.3	Luas Wilayah per Kab/kota, Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Nagari/Desa ...	6
Tabel 1.4	Program Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat	28
Tabel 2.1	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021	34
Tabel 2.2	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota	35
Tabel 2.3	Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota se Sumatera Barat	36
Tabel 2.4	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat	37
Tabel 2.5	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat	39
Tabel 2.6	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat	40
Tabel 2.7	Persentase Tingkat Kemiskinan menurut Kab/Kota se Sumatera Barat	41
Tabel 2.8	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota se Sumatera Barat	41
Tabel 2.9	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) ...	43
Tabel 2.10	TPT Menurut Kab/Kota se Sumatera Barat Tahun 2017-2021	45
Tabel 2.11	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat 2016-2021	46
Tabel 2.12	Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi se Sumatera Tahun 2016-2021	47
Tabel 2.13	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi se Sumatera	48
Tabel 2.14	Struktur Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2016-2021	48
Tabel 2.15	Pertumbuhan Ekonomi dan Struktur Ekonomi	49
Tabel 3.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan	55
Tabel 3.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	55
Tabel 3.3	Rekapitulasi Buku Inventaris Tahun 2021	56
Tabel 3.4	Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	59
Tabel 3.5	Rencana Program dan Kegiatan pada APBD Tahun 2021	59
Tabel 3.6	Rencana Program dan Kegiatan Dekonsetrasi Tahun 2021	66
Tabel 3.7	Capaian Strategis Terhadap Indikator Kinerja Tahun 2021	68
Tabel 3.8	Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan APBD Tahun 2021	74
Tabel 3.9	Anggaran dan Realisasi per Jenis Belanja APBD Tahun 2021	75
Tabel 3.10	Anggaran dan Realisasi Dana Dekonsentrasi Tahun 2021	75

Tabel 3.11 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan APBD Tahun 2021	71
Tabel 3.12 Anggaran dan Realisasi Dana Dekonsentrasi Tahun 2021	81

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan gambaran umum Sumatera Barat yang memuat data geografis wilayah, jumlah penduduk, jumlah kabupaten/kota, visi dan misi kepala daerah, perencanaan pembangunan daerah serta program pembangunan daerah.

1.1 Penjelasan Umum

1.1.1 Undang-Undang Pembentukan Daerah

Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan Padang sebagai ibu kotanya. Provinsi Sumatra Barat terletak sepanjang pesisir barat Sumatra bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Secara administrative Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swantatra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646).

1.1.2 Data Geografis Wilayah

Secara Geografis Provinsi Sumatera Barat terletak antara 0°54' Lintang Utara (LU) sampai dengan 3°30' Lintang Selatan (LS), dan 98°36' sampai 101°53' Bujur Timur (BT), dengan batas wilayah :

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara
- b. Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudera Hindia
- c. Sebelah Timur : berbatasan dengan Provinsi Riau dan Jambi
- d. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Bengkulu

Luas wilayah Provinsi Sumatera Barat $\pm 42.012,89 \text{ km}^2$ dan luas perairan (laut) $\pm 52.882,42 \text{ km}^2$, dengan panjang pantai wilayah daratan $\pm 375 \text{ km}$ ditambah panjang garis pantai Kepulauan Mentawai $\pm 1.003 \text{ km}$, sehingga total garis pantai keseluruhan $\pm 1.378 \text{ km}$.

Perairan laut Sumatera Barat memiliki 220 pulau-pulau kecil dengan jumlah pulau terbanyak berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sebanyak 115 pulau. Secara administratif, wilayah Sumatera Barat berbatasan sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Utara, sebelah Selatan dengan Provinsi Bengkulu, sebelah Barat dengan Samudera Hindia dan sebelah Timur dengan Provinsi Riau dan Jambi.

Secara administratif wilayah Sumatera Barat terbagi pada 19 (sembilan belas) Kabupaten/Kota meliputi 12 (dua belas) kabupaten dan 7 (tujuh) kota, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki wilayah terluas, yaitu 6,01 ribu km^2 atau sekitar 14,21% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Kota Padang Panjang, memiliki luas daerah terkecil, yaitu $23,0 \text{ km}^2$ (0,05%). Wilayah Sumatera Barat juga memiliki 179 kecamatan, 230 kelurahan, 803 nagari, dan 126 desa, dengan rincian sebagaimana dalam Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Nagari, dan Desa Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

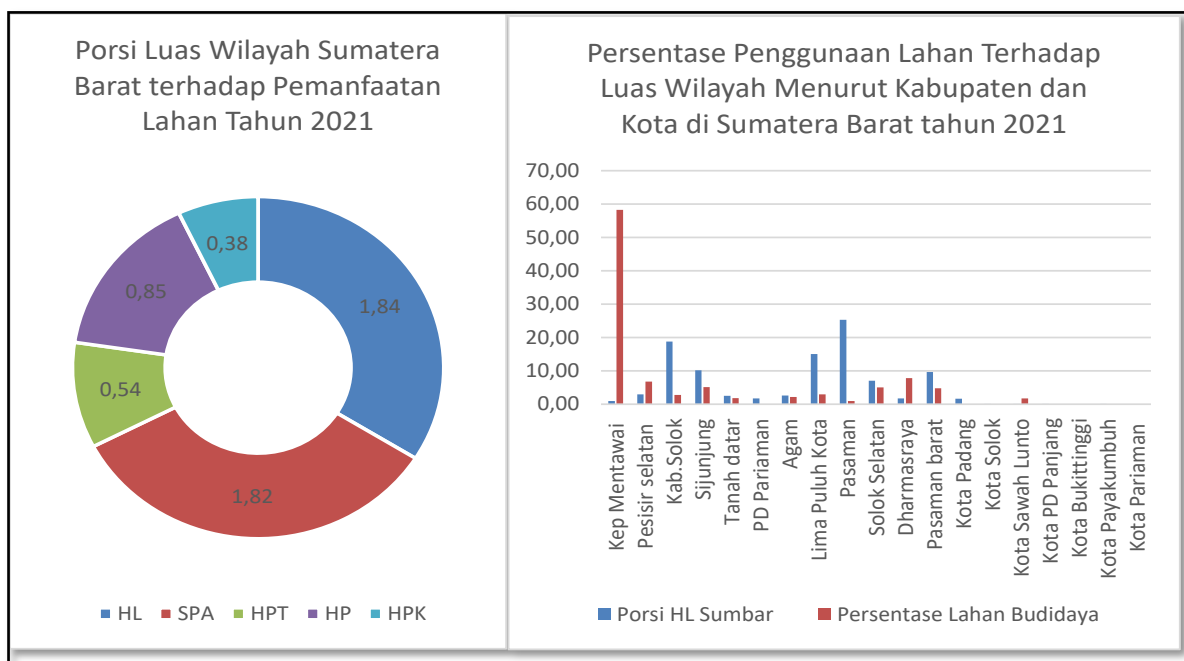
No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km^2)	Jumlah Kecamatan	Kelurahan	Nagari	Desa
1.	Kab. Kep. Mentawai	6.011,35	10	-	-	43
2.	Kab. Pesisir Selatan	5.749,89	15	-	182	-

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Kecamatan	Kelurahan	Nagari	Desa
3.	Kab. Solok	3.738,00	14	-	74	-
4.	Kab. Sijunjung	3.130,40	8	-	61	1
5.	Kab. Tanah Datar	1.336,10	14	-	75	-
6.	Kab. Padang Pariaman	1.332,51	17	-	103	-
7.	Kab. Agam	1.804,30	16	-	82	-
8.	Kab. Lima Puluh Kota	3.571,14	13	-	79	-
9.	Kab. Pasaman	3.947,63	12	-	37	-
10.	Kab. Solok Selatan	3.346,20	7	-	39	-
11.	Kab. Dharmasraya	2.961,13	11	-	52	-
12.	Kab. Pasaman Barat	3.887,77	11	-	19	-
13.	Kota Padang	693,66	11	104	-	-
14.	Kota Solok	71,29	2	13	-	-
15.	Kota Sawahlunto	231,93	4	10	-	27
16.	Kota Padang Panjang	23,00	2	16	-	-
17.	Kota Bukittinggi	25,24	3	24	-	-
18.	Kota Payakumbuh	85,22	5	47	-	-
19.	Kota Pariaman	66,13	4	16	-	55
	Jumlah	42.012,89	179	230	803	126

Sumber: Badan Pusat Statistik, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka

Luasan wilayah Sumatera Barat di atas jika dikaitkan dengan keberadaan lahan lindung dan suaka perlindungan alam, serta penggunaan lahan untuk produksi, ternyata persentase hutan lindung masih dominan di setiap wilayah kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Luasan hutan lindung paling dominan terdapat pada Kabupaten Pasaman mencapai 25,32% dari total luas Sumatera Barat, kemudian oleh Kabupaten Solok dan Kabupaten Lima Puluh Kota masing masing mencapai 18,76% dan 15,05%.

Grafik 1.1
Persentase Penggunaan Lahan terhadap Luasan Wilayah Sumatera Barat

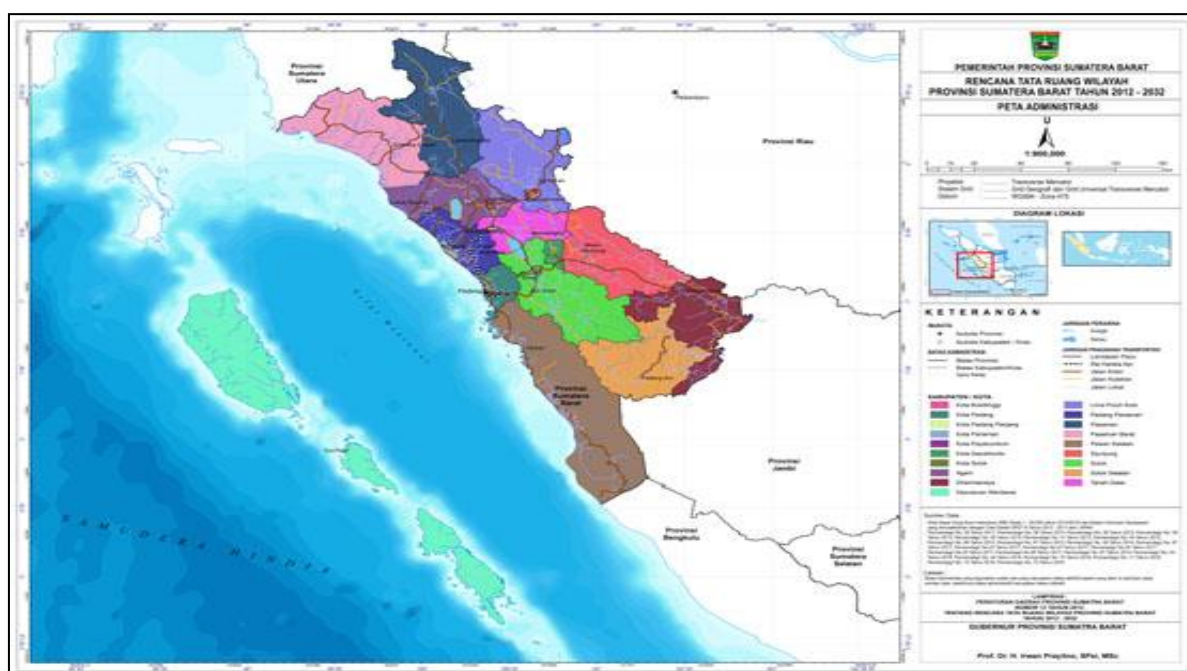


Sumber : Hasil analisis

Grafik 1.1 di atas juga memperlihatkan bahwa porsi penggunaan lahan Sumatera Barat didominasi oleh hutan lindung dan lahan suaka alam dan perlindungan alam, sedangkan lahan untuk hutan produk dan hutan produksi yang dapat dikonversi, relative lebih kecil porsinya dari luasan wilayah yang ada. Artinya, dalam pembangunan Sumatera Barat ke depan, tekanan terhadap penggunaan lahan ini akan semakin tinggi, oleh sebab itu, pertimbangan kelestarian lingkungan sangat penting di dalam menyusun program pembangunan ke depan.

Letak geografis Sumatera Barat tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis lintang nol derajat) tepatnya di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman. Oleh sebab itu Sumatera Barat mempunyai iklim tropis dengan rata-rata suhu udara 25,35°C dan rata-rata kelembaban udara yang tinggi yaitu 83,79% dengan tekanan udara rata-rata berkisar 975,19 mb. Ketinggian permukaan daratan Provinsi Sumatera Barat sangat bervariasi, sebagian daerahnya berada pada dataran tinggi kecuali Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Padang.

Gambar 1.1
Peta wilayah administrasi Provinsi Sumatera Barat



Sumber: RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032

Sumatera Barat meliputi kawasan lindung yang mencapai sekitar 45,17% dari luas keseluruhan. Sedangkan lahan yang sudah dimanfaatkan untuk budi daya tercatat sebesar 23.190,11 Km² atau sekitar 54,83% dari seluruh kawasan. Sumatera Barat juga memiliki empat danau besar, yaitu Danau Maninjau, Danau Singkarak, Danau Di atas, dan Danau Dibawah. Daratan Sumatera Barat tidak terlepas dari gugusan gunung yang terdapat pada Kabupaten/Kota. Gunung yang paling tinggi di Sumatera Barat yaitu Gunung Talamau dengan ketinggian 2.913 mdpl yang terletak di Kabupaten Pasaman Barat.

Ketinggian permukaan wilayah di Provinsi Sumatera Barat sangat bervariasi mulai dari dataran rendah di pantai dengan ketinggian 0 m hingga dataran tinggi (pegunungan) dengan ketinggian > 3.000 m di atas permukaan laut (dpl). Luas areal yang mempunyai ketinggian 0 sampai 100 m dpl meliputi 1.286.793 ha (30,41%), daerah dengan ketinggian 100 – 500 m dpl mencapai 643.552 ha (15,21%), antara 500 – 1.000 m dpl seluas 1.357.045 ha (32,07%), antara 1.000 – 1.500 m dpl terdapat 767.117 ha (18,13%), daerah dengan ketinggian 1.500 – 2.000 m dpl tercatat 113.116,6 Ha (2,67%) dan sisanya daerah dengan ketinggian di atas 2.500 m dpl.

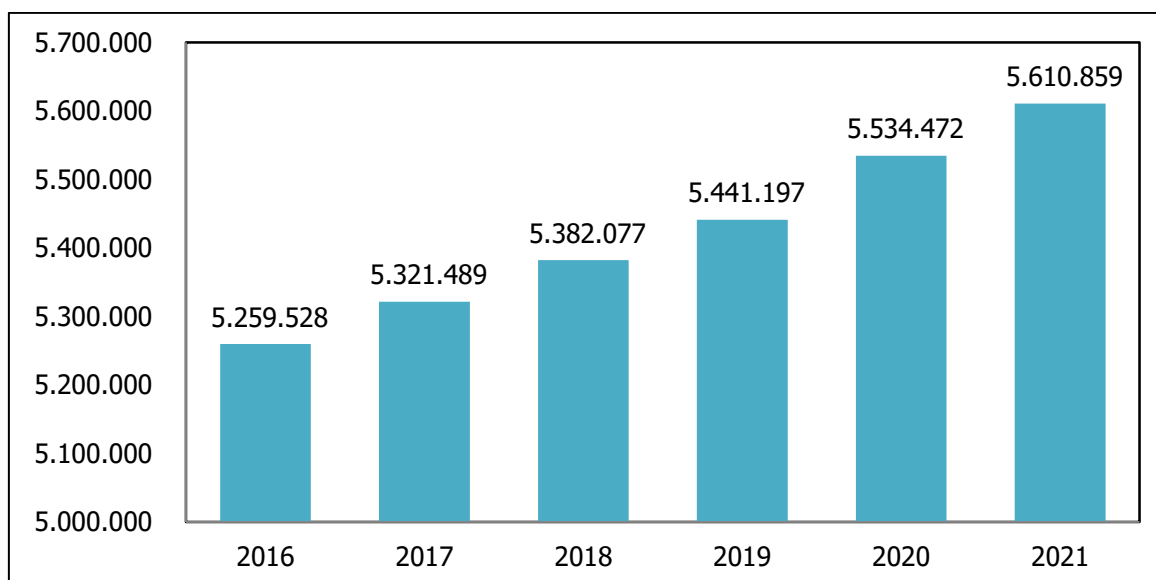
Dengan kondisi topografi tersebut diatas, potensi sumberdaya alam yang terdapat di Sumatera Barat bervariasi intensitas dan penggunaannya. Pada dataran rendah, intensitas

penggunaan dapat lebih maksimal, sementara itu pada dataran tinggi intensitas penggunaan akan dihadapkan pada faktor pembatas lahan. Diharapkan pemanfaatan lahan dapat dikelola secara seksama dengan memperhatikan dampak lingkungan, sehingga tidak terjadi kerusakan yang berdampak negatif untuk masa kini dan masa yang akan datang. Dataran tinggi di wilayah Sumatera Barat sebagian besar merupakan jajaran perbukitan dan pegunungan termasuk rantai Pegunungan Bukit Barisan yang membentang dari Utara hingga Selatan Pulau Sumatera. Lahan yang ada pada kawasan perbukitan dan pegunungan tersebut dengan kelereng di atas 40% tercatat sebesar 1.017.000 Ha.

1.1.3 Jumlah Penduduk

Provinsi Sumatera Barat memiliki luas wilayah 42.012,89 km² Perkembangan jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2016-2021 terus mengalami peningkatan (grafik 1.2). Berdasarkan hasil proyeksi penduduk dan Sensus Penduduk, jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 sebanyak 5.610.859 jiwa, mengalami peningkatan sebanyak 351.331 jiwa dibandingkan jumlah penduduk pada tahun 2016 yaitu 5.259.528 jiwa.

Grafik 1.2
Jumlah Penduduk Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 (jiwa)



Sumber:

2016-2019: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Tahun 2010-2020 Provinsi Sumatera Barat, BPS

2020 : Hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020), BPS

2021 : Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat 2015-2025 Hasil SUPAS2015, BPS

Pada tahun 2021, jumlah jika dilihat menurut wilayah kabupaten/kota (tabel 1.2), wilayah yang memiliki jumlah penduduk terbesar pada tahun 2021 yaitu Kota Padang sebanyak 984.490 jiwa, sebaliknya Kota Padang Panjang memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu 55.633 jiwa.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Menurut Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (jiwa)

Kabupaten/Kota	JUMLAH PENDUDUK					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten	3.824.550	3.866.815	3.908.185	3.948.252	4.075.717	4.063.534
1 Kep. Mentawai	86.981	88.692	90.373	92.021	87.623	96.893

Kabupaten/Kota		JUMLAH PENDUDUK					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	Pesisir Selatan	453.822	457.285	460.716	463.923	504.418	472.882
3	Solok	366.213	368.691	371.105	373.414	391.497	379.757
4	Sijunjung	226.300	230.104	233.810	237.376	235.045	248.124
5	Tanah Datar	345.706	346.578	347.407	348.219	371.704	349.829
6	Padang Pariaman	408.612	411.003	413.272	415.613	430.626	421.579
7	Agam	480.722	484.288	487.914	491.282	529.138	500.774
8	Lima Puluh Kota	372.568	376.072	379.514	382.817	383.525	391.813
9	Pasaman	272.804	275.728	278.480	281.211	299.851	288.982
10	Solok Selatan	162.724	165.603	168.411	171.075	182.027	179.184
11	Dharmasraya	229.313	235.476	241.571	247.579	228.591	265.841
12	Pasaman Barat	418.785	427.295	435.612	443.722	431.672	467.876
Kota		1.434.978	1.454.674	1.473.892	1.492.945	1.458.755	1.547.325
1	Padang	914.968	927.011	939.112	950.871	909.040	984.490
2	Solok	67.307	68.602	69.776	71.010	73.438	74.418
3	Sawahlunto	60.778	61.398	61.898	62.524	65.138	63.922
4	Padang Panjang	51.712	52.422	52.994	53.693	56.311	55.633
5	Bukittinggi	124.715	126.804	128.783	130.773	121.028	136.468
6	Payakumbuh	129.807	131.819	133.703	135.573	139.576	141.147
7	Pariaman	85.691	86.618	87.626	88.501	94.224	91.247
Provinsi Sumatera Barat		5.259.528	5.321.489	5.382.077	5.441.197	5.534.472	5.610.859
Nasional		258.705.000	261.890.900	265.015.300	268.074.600	270.203.917	272.248.500

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat 2015-2025 Hasil SUPAS2015, BPS

Laju pertumbuhan penduduk sangat dipengaruhi oleh struktur umur penduduk. Struktur umur penduduk pada suatu daerah sangat ditentukan oleh perkembangan tingkat kelahiran, kematian dan migrasi. Oleh karena itu, jika angka kelahiran pada suatu daerah cukup tinggi, maka dapat mengakibatkan daerah tersebut tergolong sebagai daerah yang berpenduduk usia muda dan kecenderungan laju pertumbuhan penduduknya tinggi. Kendali yang dilakukan selama ini adalah melalui Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Sedangkan untuk data kependudukan yang disusun Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan data kependudukan hasil pelayanan administrasi kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota yang dilakukan setiap saat dengan mempergunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK). Data Kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah teruji ketunggalannya melalui perekaman sidik jari dan iris mata, sehingga kualitas data dapat lebih terjamin. Data hasil pelayanan tersebut kemudian dikonsolidasi dan dibersihkan oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) sehingga menjadi Data Konsolidasi Bersih (DKB). Data Kependudukan Skala Provinsi diterbitkan secara berkala per semester, yaitu untuk semester pertama per tanggal 30 Juni dan semester kedua per tanggal 31 Desember.

Pada tahun 2021, jumlah penduduk perempuan Provinsi Sumatera Barat lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Hal ini ditunjukkan dari rasio jenis kelamin 2021 yaitu 99,16. Jika dilihat menurut wilayah kabupaten/kota (tabel 1.3), wilayah yang memiliki jumlah penduduk terbesar pada tahun 2021 yaitu Kota Padang sebanyak 984.490 jiwa, sebaliknya Kota Padang Panjang memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu 55.633 jiwa.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk (Sex Ratio) di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 (jiwa)

Kabupaten/Kota		JUMLAH PENDUDUK			Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan	
Kabupaten		2.023.929	2.039.605	4.063.534	
1	Kep. Mentawai	50.410	46.483	96.893	108,45
2	Pesisir Selatan	234.500	238.382	472.882	98,37
3	Solok	187.889	191.868	379.757	97,93
4	Sijunjung	124.202	123.922	248.124	100,23
5	Tanah Datar	170.864	178.965	349.829	95,47
6	Padang Pariaman	207.572	214.007	421.579	96,99
7	Agam	246.306	254.468	500.774	96,79
8	Lima Puluh Kota	194.308	197.505	391.813	98,38
9	Pasaman	143.275	145.707	288.982	98,33
10	Solok Selatan	90.428	88.756	179.184	101,88
11	Dharmasraya	137.731	128.110	265.841	107,51
12	Pasaman Barat	236.444	231.432	467.876	102,17
Kota		769.724	777.601	1.547.325	
1	Padang	491.954	492.536	984.490	99,88
2	Solok	36.927	37.491	74.418	98,50
3	Sawahlunto	31.751	32.171	63.922	98,69
4	Padang Panjang	27.707	27.926	55.633	99,22
5	Bukittinggi	66.184	70.284	136.468	94,17
6	Payakumbuh	70.187	70.960	141.147	98,91
7	Pariaman	45.014	46.233	91.247	97,36
Provinsi Sumatera Barat		2.793.653	2.817.206	5.610.859	99,16

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat 2015-2025 Hasil SUPAS2015, BPS

1.1.4 Jumlah Kabupaten dan Kota

Secara administratif wilayah Sumatera Barat terbagi pada 19 (sembilan belas) Kabupaten/Kota meliputi 12 (dua belas) kabupaten dan 7 (tujuh) kota, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki wilayah terluas, yaitu 6,01 ribu km² atau sekitar 14,21% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Kota Padang Panjang, memiliki luas daerah terkecil, yaitu 23,0 Km² (0,05%). Wilayah Sumatera Barat juga memiliki 179 Kecamatan, 230 Kelurahan dan 928 Nagari/desa, dengan rincian sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1.3
Luas Wilayah per Kab/kota, Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Nagari/Desa di Provinsi Sumatera Barat

No.	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Kecamatan (2018)	Kelurahan (2018)	Jumlah Nagari/Desa (2019)
1.	Kab. Kep. Mentawai	6 011,35	10	-	43
2.	Kab. Pesisir Selatan	5 749,89	15	-	182
3.	Kab. Solok	3 738,00	14	-	74
4.	Kab. Sijunjung	3 130,40	8	-	61
5.	Kab. Tanah Datar	1 336,10	14	-	75
6.	Kab. Padang Pariaman	1 332,51	17	-	103
7.	Kab. Agam	1 804,30	16	-	82
8.	Kab. Lima Puluh Kota	3 571,14	13	-	79

No.	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Kecamatan (2018)	Kelurahan (2018)	Jumlah Nagari/Desa (2019)
9.	Kab. Pasaman	3 947,63	12	-	37
10.	Kab. Solok Selatan	3 346,20	7	-	39
11.	Kab. Dharmasraya	2 961,13	11	-	52
12.	Kab. Pasaman Barat	3 887,77	11	-	19
13.	Kota Padang	693,66	11	104	-
14.	Kota Solok	71,29	2	13	-
15.	Kota Sawahlunto	231,93	4	10	27
16.	Kota Padang Panjang	23,00	2	16	-
17.	Kota Bukittinggi	25,24	3	24	-
18.	Kota Payakumbuh	85,22	5	47	-
19.	Kota Pariaman	66,13	4	16	55

1.2 Perencanaan Pembangunan

1.2.1 Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah

Berdasarkan gambaran umum kondisi daerah dapat diperoleh informasi berbagai aspek pembangunan Sumatera Barat yang telah mengalami kemajuan dan keberhasilan selama lima tahun terakhir. Kemajuan dan keberhasilan yang telah dicapai tersebut dapat dijadikan modal yang kuat untuk mempercepat pembangunan Sumatera Barat di masa mendatang. Meskipun kemajuan dan keberhasilan telah banyak dicapai, Sumatera Barat masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang harus ditangani melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan secara berkelanjutan. Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Provinsi Sumatera Barat dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

A. Pengamalan Agama dan ABS-SBK dalam Kehidupan Masyarakat

Yang masih menjadi permasalahan serta sasaran yang belum tercapai dalam prioritas Pengamalan Agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat antara lain:

1. Belum optimalnya pengembangan dan penerapan adat, seni dan budaya,
2. Belum optimalnya pemanfaatan, peran dan fungsi pemangku dan lembaga adat dalam penanaman dan pengamalan nilai-nilai adat, seni dan budaya Minangkabau,
3. Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga keagamaan dalam pemahaman dan pengamalan ajaran agama,
4. Belum optimalnya apresiasi dan kebanggaan terhadap budaya daerah bagi generasi muda,
5. Belum optimalnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan karakter dan pendidikan yang dilandasi oleh nilai-nilai agama dan adat.
6. Masih rentannya karakter masyarakat terutama pemuda dipengaruhi oleh budaya asing dan pergaulan bebas, penyimpangan perilaku (LGBT) dan narkoba.
7. Pergeseran nilai-nilai agama dan adat di tengah kehidupan masyarakat.
8. Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan karakter dan pendidikan yang dilandasi oleh nilai-nilai agama dan adat.
9. Masih rentannya karakter masyarakat terutama pemuda dipengaruhi oleh budaya asing, pergaulan bebas, narkoba serta penyimpangan perilaku (LGBT).

B. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan

Yang masih menjadi permasalahan serta sasaran yang belum tercapai dalam prioritas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan antara lain:

1. Belum optimalnya pelaksanaan birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,
2. Belum optimalnya kapasitas aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,
3. Belum optimalnya penyusunan dan penerapan produk hukum daerah,
4. Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan daerah,
5. Belum optimalnya pengelolaan asset barang milik daerah,
6. Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan pengendalian evaluasi.
7. Belum optimalnya kualitas pelayanan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
8. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
9. Belum optimalnya keterbukaan informasi kepada publik.
10. Belum optimalnya sinergi pelaksanaan pembangunan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

C. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan

Beberapa permasalahan dalam Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan Menengah antara lain :

1. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah di Sumatera Barat.
2. Belum tuntasnya relevansi pendidikan kejuruan/ketrampilan dengan lapangan kerja,
3. Perlu peningkatan profesionalitas dan distribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan formal dan non formal,
4. Belum tuntasnya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan
5. Perlu peningkatan kualitas manajemen pendidikan,
6. Belum optimalnya penduduk usia sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan,
7. Masih tingginya ketimpangan kualitas lulusan SMA/SMK/MA antar daerah dimana umumnya kualitas lulusan daerah kota lebih baik dari kabupaten.
8. APM pendidikan menengah dan kualitas kelulusan masih perlu ditingkatkan.
9. Masih cukup banyak penduduk usia sekolah yang belum mendapat layanan pendidikan
10. Ketimpangan distribusi guru.
11. Ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah.
12. Belum optimalnya distribusi guru.

D. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Permasalahan dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat sebagai berikut:

1. Masih tingginya tingkat kematian ibu dan bayi,
2. Perbaikan Gizi Masyarakat (stunting),
3. Pengembangan dan Pencapaian indikator Program TB,
4. Pengembangan dan Pencapaian indikator Program Malaria,
5. Penanggulangan HIV/AIDS,
6. Penyehatan Lingkungan dimana masih rendahnya pencapaian Stop Buang Air besar Sembarangan,
7. Belum optimalnya kepesertaan, layanan dalam jaminan kesehatan,
8. Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan,
9. Akreditasi Rumah Sakit,

10. Keterbatasan kapasitas, kuantitas dan distribusi tenaga medis dan paramedis,
11. Pengelolaan BLUD dan pelayanan masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi,
12. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
13. Status Gizi Masyarakat Buruk dan prevalensi balita pendek masih belum dapat dikendalikan.
14. Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dan akses pelayanan kesehatan daerah dan rujukan yang berkualitas belum merata.
15. Ketimpangan kualitas pelayanan kesehatan antar daerah di Sumatera Barat (disebabkan karena sumberdaya kesehatan masih belum merata memenuhi standar yang ditetapkan dan terjadi ketimpangan ketersediaan, pendistribusian dan penempatannya).
16. Masih terbatasnya alat kesehatan dan obat-obatan dibandingkan dengan peningkatan kebutuhan.

E. Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis

Permasalahan utama Urusan Pangan adalah :

1. Ketersediaan dan keterjangkauan sembilan bahan pokok serta distribusi dan pengawasan pangan belum terlaksana dengan baik dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat,
2. Terbatasnya penganekaragaman/diversifikasi pangan,
3. Masih rendahnya ketahanan pangan rumah tangga di wilayah rawan pangan,
4. Masih tingginya tingkat ketergantungan pada pangan beras
5. Pola konsumsi masyarakat belum berimbang,
6. Harga bahan pangan masih fluktuatif sehingga menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat
7. Keamanan pangan yang masih memerlukan penanganan serius terutama bahan addiktif dan cemaran (bahan kimia, mikro organisme dan fisik) yang membahayakan bagi kesehatan masyarakat,
8. Kurang stabilnya dan belum berperannya kelembagaan pangan secara baik dalam menyangga kestabilan dan harga pangan,
9. Keamanan pangan masih rendah dimana masih ditemukan pangan yang belum aman dikonsumsi masyarakat terutama pangan yang aman, sehat dan halal atau asuh.

Permasalahan utama urusan pertanian adalah :

1. Rendahnya daya saing produk pertanian,
2. Belum berkembangnya nilai tambah produk pertanian,
3. Produktivitas, pertanian, perkebunan dan populasi peternakan dan perikanan masih perlu peningkatan,
4. Terbatasnya aksesibilitas petani terhadap sarana produksi, pemasaran dan permodalan,
5. Masih tingginya kehilangan hasil produksi pertanian,
6. Masih ditemui permasalahan ketersediaan dan keterjangkauan sarana produksi seperti bibit, pupuk, obat-obatan, dan pakan ternak,
7. Belum optimalnya sarana dan prasarana UPTD pertanian,
8. Banyak kelembagaan petani yang belum berbentuk badan hukum,
9. Terbatasnya tenaga penyuluh pertanian serta kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh polivalen.

F. Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, dan Investasi

Permasalahan utama urusan pariwisata adalah :

1. Belum optimalnya pengembangan sarana dan prasarana pariwisata,
2. Belum maksimalnya ikon wisata dan paket yang komprehensif,
3. Belum optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata,
4. Belum memadainya fasilitas pendukung kepariwisataan,
5. Belum melembaganya sadar wisata baik pada masyarakat lokal, pelaku pariwisata maupun wisatawan,
6. Belum berkembangnya ekonomi kreatif.

Permasalahan utama urusan industri adalah :

1. Inovasi dan diversifikasi produk industri mikro kecil masih rendah,
2. Kapasitas SDM dan penguasaan teknologi rendah,
3. Masih rendahnya daya saing, kualitas dan design produk,
4. Masih banyak produk industri mikro kecil dan menengah yang belum memenuhi standarisasi dan sertifikasi,
5. Keterbatasan akses pembiayaan untuk pengembangan industri,
6. Masih terbatasnya jejaring kerjasama pemasaran produk industri, terutama industri rumah tangga.

Permasalahan utama urusan perdagangan adalah :

1. Lemahnya pengawasan di bidang ekspor dan impor,
2. Terbatasnya sarana perdagangan dan distribusi
3. Belum optimalnya jaringan pasar dalam dan luar negeri,
4. Kurangnya promosi dan kerjasama ekonomi antar swasta dengan swasta maupun swasta dengan pemerintah serta pemerintah dengan pemerintah,
5. Masih terjadi fluktuasi indeks harga konsumen yang berpengaruh pada daya beli,
6. Masih lemahnya pengawasan tata niaga komoditas dan jasa yang diperdagangkan Surplus Neraca Perdagangan mengalami penurunan,
7. Belum efisiensinya arus barang dan konektivitas (logistik, distribusi, dan fasilitasi perdagangan),
8. Masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen serta belum optimalnya pengawasan barang dan jasa.

Permasalahan utama urusan koperasi adalah :

1. Rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam pengembangan kegiatan usaha koperasi,
2. Rendahnya penggunaan teknologi tepat guna (TTG), informasi dan kelembagaan,
3. Rendahnya daya saing produk koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dalam hal kecepatan penguasaan teknologi dengan produk permintaan pasar (kepemilikan sertifikat standarisasi, jaminan mutu produk UMKM dan inovasi masih terbatas),
4. Rendahnya inovasi dan pengembangan produk,
5. Struktur koperasi yang melakukan RAT masih rendah,
6. Rendahnya kemampuan akses permodalan bagi koperasi dan UKM kepada sumber-sumber pembiayaan Kredit UMKM,
7. Kemitraan lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan dalam pembiayaan koperasi dan umkm belum sepenuhnya terwujud,

8. Terbatasnya akses pemasaran produk UMKM ke konsumen,
9. Terbatasnya kelembagaan peningkatan kapasitas UMKM dalam menumbuhkan wirausaha baru (inkubator bisnis),
10. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi dan UMKM serta masih tingginya jumlah koperasi tidak aktif.

Permasalahan utama urusan penanaman modal adalah :

1. Masih tingginya kesenjangan (lag) investasi antara ijin prinsip dan realisasi investasi,
2. Kurang kondusifnya iklim & minat investasi,
3. Kurangnya dokumen informasi investasi seperti (FS, DED, dan lainnya).

G. Pengembangan Kemaritiman dan Kelautan

Permasalahan dalam pengembangan kemaritiman dan kelautan di Sumatera Barat meliputi :

1. Kualitas dan kuantitas benih dan induk masih rendah,
2. Harga pakan ikan pabrikan tinggi,
3. Menurunnya potensi ikan tangkap di perairan laut Sumatera Barat,
4. Belum optimalnya sarana dan prasarana perikanan dan pelabuhan perikanan,
5. Mutu dan pengolahan hasil produk perikanan masih rendah,
6. Penanganan mutu komoditas ekspor dengan Cold Chain System (CCS) belum optimal,
7. Masih maraknya kegiatan illegal unreported dan unregulated fishing,
8. Konsumsi ikan masyarakat masih potensial untuk ditingkatkan,
9. Kualitas SDM (nelayan dan pembudidaya ikan) yang masih perlu ditingkatkan,
10. Kurangnya kapasitas kelembagaan produksi dan pemasaran,
11. Keterbatasan tenaga penyuluh.

H. Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal

Permasalahan dalam Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal di Sumatera Barat meliputi:

1. Masih belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dengan lembaga pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya,
2. Masih tinggi tingkat pengangguran,
3. Masih rendahnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur,
4. Belum optimalnya fasilitas sarana prasarana pelatihan,
5. Belum tersedianya data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang akurat dari seluruh Kab/Kota,
6. Kurangnya tenaga muda potensial dan terdidik untuk mengabdikan dan berusaha di pedesaan,
7. Kelembagaan pemberdayaan masyarakat sebagai mitra pemerintahan nagari dalam proses pembangunan belum berfungsi dan difungsikan,
8. Lembaga keuangan mikro di pedesaan belum mampu melayani kebutuhan modal usaha produktif secara murah, ringan dan cepat.
9. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan masih bersifat parsial dan sektoral.

I. Pengembangan Energi dan Pembangunan Infrastruktur

Permasalahan dalam Pengembangan Energi dan Pembangunan Infrastruktur di Sumatera Barat meliputi :

1. Masih banyaknya masyarakat yang menempati rumah tidak layak huni yang tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai,
2. Masih tingginya backlog perumahan, serta berubahnya indeks kegempaan sehingga standar pembangunan rumah dan bangunan juga semakin mahal,
3. Masih rendahnya akses terhadap air minum dan sanitasi (air limbah, pengelolaan sampah dan drainase),
4. Belum optimalnya sistem perencanaan penyediaan air minum dan penanganan sampah serta terbatasnya pendanaan untuk mendukung keseluruhan aspek penyediaan air minum dan pengelolaan sampah,
5. Masih rendahnya pencapaian target Universal Access, 100% akses air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% sanitasi layak (100-0-100) untuk tahun 2019,
6. Penataan kawasan bangunan dan lingkungan serta kawasan permukiman belum maksimal.
7. Belum optimal konektivitas dan aksesibilitas antar daerah,
8. Belum terlaksananya pembangunan infrastruktur dan program strategis daerah.

J. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam

Permasalahan dalam Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam di Sumatera Barat meliputi :

1. Belum optimalnya penyebaran informasi tentang kebencanaan kepada masyarakat,
2. Sarana prasarana penanggulangan bencana belum memadai,
3. Masih rendahnya pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana,
4. Pengelolaan dan penanganan dampak bencana alam belum memadai,
5. Masalah terkait kuantitas/ketersediaan air,
6. Terjadi perbedaan debit air sungai antara musim kemarau dan musim hujan yang sangat menyolok di beberapa sungai,
7. Terjadi perbedaan tinggi permukaan air yang signifikan pada danau untuk PLTA,
8. Terjadi kerusakan daerah aliran sungai (DAS) dan daerah tangkapan air (DTA) sebagai sumber dari ketersediaan air,
9. Terbatasnya kualitas air, udara dan lahan.
10. Peningkatan penanganan tanggap darurat bencana
11. Peningkatan pemulihan daerah pasca bencana

2) Permasalahan daerah yang berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Daerah

A. Urusan Wajib

1. Urusan Pendidikan

- a. Belum terpenuhinya anggaran dalam pemenuhan SPM Pendidikan serta biaya operasional sekolah pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
- b. Kompetensi lulusan SMK belum bisa memenuhi kebutuhan pasar kerja.

2. Urusan Kesehatan

- a. Penyelenggaraan Akreditasi Rumah Sakit baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota belum berjalan maksimal antara lain disebabkan, belum optimalnya kemitraan berbagai

sektor dalam mendukung penyelenggaraan akreditasi, masih minimnya dana, sarana, peralatan serta SDM baik medis, paramedis dan tenaga administrasi.

- b. Terbatasnya anggaran BLUD untuk mendukung operasional Rumah Sakit dan terhambatnya pencairan dana klaim dari BPJS ke Rumah Sakit sehingga menyebabkan terganggunya operasional Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan kepada pasien.
- c. Kompetensi, jumlah dan distribusi SDM kesehatan (medis dan para medis) yang kurang merata.
- d. Masih terbatasnya jumlah dan jam pelayanan dokter spesialis khususnya spesialis Non Jiwa serta sarana/prasarana dan peralatan kesehatan sehingga menghambat kelancaran pelayanan yang diberikan.
- e. Terjadinya peningkatan penyakit non jiwa yang mengiringi penyakit jiwa dan terjadinya peningkatan penderita ketergantungan NAPZA mengharuskan RS Jiwa Prof HB Saanin mengembangkan pelayanan Non Jiwa yang menunjang pelayanan jiwa prima.
- f. Konsumsi/asupan zat gizi yang masih rendah ditambah dengan adanya penyakit infeksi yang mendorong balita kekurangan gizi/menjadi gizi buruk.
- g. Akses layanan yang terhambat karena terbatasnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dan hambatan dalam sistem rujukan untuk penyakit tertentu.
- h. Pola hidup yang tidak sehat menyebabkan peningkatan risiko penyakit menular.
- i. Ketersediaan obat dan logistik program yang belum terpenuhi secara terus menerus.
- j. Masih tingginya prevalensi stunting di Sumatera Barat.
- k. Menurunnya jumlah kunjungan akibat sistem rujukan online berjenjang yang diterapkan oleh BPJS, berdampak terhadap penurunan pendapatan BLUD sehingga target RPJMD tidak tercapai.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Masih rendahnya akses terhadap air minum dan sanitasi (air limbah, pengelolaan sampah dan drainase)
- b. Masih belum optimalnya penataan bangunan dan lingkungan
- c. Masih terkendalanya legalisasi rencana tata ruang
- d. Masih ditemui pelaksanaan pembangunan tidak mengacu kepada Rencana Tata Ruang
- e. Masih rendahnya tingkat kemantapan jalan provinsi dan tingginya tingkat kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan
- f. Masih tingginya tingkat kerusakan infrastruktur irigasi dan infrastruktur pengendali daya rusak air
- g. Belum terintegrasinya pengelolaan infrastruktur pengelolaan sumber daya air
- h. Masih banyak ditemui kendala dalam pembebasan lahan dan alih fungsi lahan dalam pembangunan infrastruktur sumber daya air
- i. Belum optimalnya peran serta dan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air
- j. Terjadinya perubahan regulasi yang berdampak terhadap kelembagaan sumber daya air.

4. Urusan Perumahan dan Permukiman

- a. Belum terintegrasinya pembangunan perumahan dengan Prasarana Sarana Utilitas Umum Permukiman (PSU)
- b. Belum terpenuhinya SPM perumahan
- c. Belum optimalnya ketersediaan Data perumahan dan kawasan permukiman
- d. Perizinan pembangunan perumahan tumpang tindih dengan aturan sektor lain.

5. Urusan Sosial

- a. Belum tersedianya data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang akurat dari seluruh kab/kota sehingga mengakibatkan kesalahan dalam penyaluran bantuan
- b. Terbatasnya anggaran tersedia dalam pemenuhan SPM bidang sosial yakni rehabilitasi sosial dalam panti mengingat kebutuhan setiap kelayan cukup tinggi dan kebutuhan rehabilitasi sosial dalam panti swasta juga menjadi tanggungjawab SPM Provinsi
- c. Struktur nomenklatur organisasi perangkat daerah di kab/kota sangat bervariasi menyebabkan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi belum maksimal dan terpadu
- d. Terbatasnya penanganan pada tanggap darurat bencana

6. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a. Belum Optimalnya Penegakan Peraturan Daerah
- b. Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- c. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran belum optimal
- d. Masihnya kurangnya SDM, baik dari segi kualitas maupun kuantitas serta sarana dan prasarana.
- e. Belum lengkapnya kebijakan percepatan penyusunan peraturan dan prosedur operasional standar bidang penanggulangan bencana yang komprehensif pada tingkat daerah
- f. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi (IT) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana terutama terkait dengan mitigasi, kesiapsiagaan dan penanganan tanggap darurat bencana
- g. Belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana mitigasi dan penanganan tanggap darurat
- h. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan upaya mitigasi dan kesiap siagaan menghadapi bencana

7. Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol)

- a. Semakin luntarnya rasa cinta tanah air dan semangat persatuan dan kesatuan yang membuat semakin mudahnya terjadi benturan dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena melemahnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dan semangat nasionalisme.
- b. Nilai-nilai agama yang menjadi dasar terwujudnya kerukunan hidup bermasyarakat dan beragama, tata susila dan prilaku dalam bermasyarakat dan bernegara yang sudah menipis menyebabkan moral dan budaya bangsa ikut menipis
- c. Kurangnya perhatian terhadap proses demokrasi yang baik oleh partai ataupun individu yang hanya memperjuangkan kepentingan pribadi bukan kepentingan bersama
- d. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada pemilu/pilkada/pemilu.
- e. Masih banyaknya potensi konflik yang terjadi di Sumatera Barat khususnya konflik yang berlatar belakang sengketa lahan, pertambangan/perkebunan/perhutanan, perbatasan antar daerah, SARA, dan Pilkada.
- f. Masih tingginya angka kriminalitas, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta kasus maksiat di Sumbar.
- g. Perkembangan teknologi informasi mempermudah penyebaran paham/aliran yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.

- h. Munculnya persoalan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah pasca direvisinya undang undang tentang pemerintahan daerah

8. Urusan Tenaga Kerja

- a. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka terutama dari lulusan SMK dan Strata Satu (S-1)
- b. Terbatasnya kesempatan kerja dan lapangan kerja.
- c. Masih rendahnya kualitas pencari kerja yang didominasi oleh lulusan SMK yang belum sesuai dengan kebutuhan industri kerja
- d. Rendahnya motivasi dan jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru.
- e. Rendahnya daya saing produktifitas tenaga kerja di Sumatera Barat
- f. Terbatasnya sarana dan prasarana serta jumlah dan kualitas tenaga instruktur yang tersedia di BLK milik Pemerintah Provinsi
- g. Terbatasnya anggaran kegiatan pelatihan yang didanai melalui APBD, sehingga target pelatihan belum dapat tercapai, padahal animo masyarakat, UMKM untuk ikut dalam pelatihan yang berada di Kab/Kota sangat tinggi
- h. Perusahaan-perusahaan pada sektor usaha Mikro Kecil/ Menengah masih banyak yang belum memberikan perlindungan bagi tenaga kerjanya karena belum memahami ketentuan yang mengatur tentang jaminan sosial
- i. Masih rendahnya kesadaran perusahaan untuk mematuhi peraturan perundangundangan ketenagakerjaan bidang hubungan industrial dan jamsos
- j. Masih ada perusahaan yang belum melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap objek pengawasan atau peralatan keselamatan dan kesehatan kerja yang dioperasikan di perusahaan sehingga dapat berdampak kepada terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta kerugian pada semua pihak
- k. Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dikarenakan terbatasnya personil pengawas dan anggaran pengawasan
- l. Kurangnya sarana dan prasarana pemeriksaan kesehatan kerja serta terbatasnya ketersediaan dan pelatihan untuk para medis dan pelatihan hiperkes bagi Dokter Perusahaan
- m. Terbatasnya jumlah dan kompetensi fungsional Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta alokasi anggaran mendukung pelaksanaan pemeriksaan K3

9. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Meningkatnya jumlah kasus perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan diantaranya : kekerasan seksual, kekerasan fisik, KDRT, bullying dan anak yang berperilaku menyimpang, isu narkoba, trafficking, pornografi, pekerja anak, anak berhadapan dengan hukum, anak dan perempuan dalam konflik sosial maupun kondisi darurat bencana
- b. Selain itu juga terdapat permasalahan terkait dengan anak dan perempuan yang lain yakni isu narkoba, trafficking, pornografi, pekerja anak, anak berhadapan dengan hukum, anak dan perempuan dalam konflik sosial maupun kondisi darurat bencana
- c. Belum terpenuhinya pemenuhan Hak Anak dan Hak Asuh Anak
- d. Belum seluruh Kabupaten/Kota yang mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- e. Terbatasnya data terpilah yang digunakan dalam analisa pembangunan yang responsif gender
- f. Masih adanya Kabupaten/Kota yang belum konsisten dalam pelaksanaan pembangunan yang responsif gender

10. Urusan Pangan

- a. Ketersediaan pangan terbatas disebabkan berkurangnya kapasitas produksi pangan daerah karena berkurangnya lahan pertanian produktif.
- b. Penurunan kemampuan penyediaan pangan masih menjadi kendala disebabkan masih tingginya proporsi kehilangan hasil pada proses produksi, penanganan hasil panen dan pengolahan serta pemasaran hasil pertanian
- c. Diversifikasi pangan masyarakat maka ketergantungan pada pangan beras sampai saat ini konsumsi beras per kapita masih tergolong tinggi, perlu diseimbangkan minimal sama dengan rata-rata nasional dengan metode pola panganekaragaman konsumsi pangan (skor pola pangan harapan).
- d. Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masyarakat masih rendah yang dicirikan dengan pola konsumsi pangan yang belum beragam, bergizi, seimbang dan aman
- e. Masih ditemukan pangan yang belum aman dikonsumsi terutama pangan yang aman, sehat, utuh dan halal atau asuh, antara lain (1) masih terdapat pangan yang beredar belum memenuhi standar keamanan pangan, (2) penambahan pengawet pada bahan makanan (sept Formalin), (3) dari udara yang tercemar oleh gas dan debu knalpot kendaraan bermotor, (4) masih banyak pangan tidak segar beredar di pasaran, dan (5) lahan untuk produksi pangan utama terkontaminasi pestisida yang berlebihan
- f. Masih ada daerah yang mengalami kerawanan pangan yang disebabkan (1) ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan (2) ketersediaan pangan untuk penanganan daerah rawan pangan belum optimal
- g. Pendistribusian pangan belum merata kepada masyarakat terutama miskin, peta distribusi pangan strategis yang akurat masih terbatas
- h. Tidak stabilnya harga dan rendahnya efisiensi sistem pemasaran hasil-hasil pangan disebabkan belum ada jaminan dan pengaturan harga produk pangan yang wajar dari pemerintah kecuali gabah/beras
- i. Belum terpenuhinya kondisi pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau
- j. Belum berperannya kelembagaan pangan secara baik dalam menyangga kestabilan distribusi dan harga pangan
- k. Masih rendahnya diversifikasi konsumsi pangan masyarakat
- l. Naiknya harga bahan pangan sehingga menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat
- m. Angka kemiskinan di Sumatera Barat mengalami penurunan namun akses pangan masyarakat belum terjamin
- n. Tingginya intensitas bencana alam yang berdampak serius terhadap tingkat kerawanan pangan masyarakat
- o. Rendahnya jaminan mutu dan keamanan pangan masyarakat serta masih lemahnya pengawasan keamanan pangan segar

11. Urusan Pertanahan

- a. Rendahnya Jaminan kepastian hukum hak masyarakat atas tanah
- b. Saat ini, bila terjadi sengketa pertanahan antara dua pihak atau lebih dan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara litigasi dengan berperkara di pengadilan. Diperoleh fakta ada beberapa jenis pengadilan yang berbeda dengan kemungkinan keputusan pengadilan yang berbeda pula. Hal ini menyebabkan kepastian hukum masyarakat terhadap hak atas tanah tidak dapat terjamin bahkan oleh lembaga peradilan yang ada
- c. Masih adanya Ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah

- d. Belum optimalnya Kinerja pelayanan pertanahan
- e. Minimnya ketersediaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum

12. Urusan Lingkungan Hidup

- a. Menurunnya kualitas air sungai yang tadinya hanya ada pada perkotaan sekarang sudah dirasakan sampai perdesaan, begitupun dengan kualitas air danau khususnya danau maninjau dan danau singkarak
- b. Peningkatan jumlah timbulan sampah terutama pada daerah dengan tingkat ekonomi yang tinggi serta jumlah penduduk yang besar
- c. Meningkatnya alih fungsi lahan yang lebih disebabkan karena bertambah luasnya lahan pertambangan, perkebunan, permukiman serta berkurangnya lahan pertanian
- d. Belum tersedianya fasilitas pengelolaan limbah B3 medis dan non medis
- e. Masih terbatasnya cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan dan izin PPLH oleh Provinsi / kab/kota
- f. Kurangnya kepedulian pelaku usaha / kegiatan dalam memenuhi peraturan bidang lingkungan hidup

13. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Data Adminduk belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh seluruh stakeholder
- b. Sarana jaringan dan aplikasi untuk mendukung Adminduk belum seluruhnya terkoneksi dengan baik
- c. Sarana prasana dan kualitas SDM pengelola data dan pelayanan masih kurang
- d. Pemutakhiran data kependudukan belum optimal dilakukan oleh kabupaten/kota
- e. Ketersediaan blanko KTP_el belum konsisten memenuhi kebutuhan

14. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Nagari belum berjalan secara optimal dikarenakan masih rendahnya SDM perangkat Desa/Nagari
- b. Masih kurangnya Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat
- c. Masih kurangnya usaha ekonomi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat
- d. Kurang optimalnya pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan

15. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Belum meratanya kapasitas/kemampuan SDM aparatur, dalam pelaksanaan pelayanan Pengendalian Penduduk dan KB
- b. Belum optimalnya koordinasi anatar Provinsi dengan Pusat dan Kab/Kota
- c. Masih rendahnya keterlibatan dan peran serta organisasi masyarakat dan tokoh agama dalam upaya peningkatan dan pembangunan keluarga
- d. Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pengendalian penduduk, dan Keluarga Berencana
- e. Belum maksimal desain program dalam pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga;
- f. Komitmen dan dukungan pemerintah pusat dan daerah terhadap kebijakan pembangunan bidang KBKK masih rendah, yang ditandai dengan kurangnya pemahaman pemerintah pusat dan daerah tentang program KKBPK, dan belum semua kebijakan perencanaan program dan penganggaran yang terkait dengan bidang KBKK dimasukan dalam

perencanaan daerah, serta peraturan perundangan yang belum sinergis dalam penguatan kelembagaan pembangunan bidang KBKK.

16. Urusan Perhubungan

- a. Masih rendahnya kualitas pelayanan transportasi, yang disebabkan oleh belum terbentuknya kelembagaan pelayanan transportasi yang baik, belum maksimalnya pemberian subsidi terhadap pelayanan transportasi.
- b. Belum optimalnya pengawasan standar pelayanan transportasi serta belum memadainya kualitas SDM dalam perencanaan dan pengelolaan layanan transportasi.
- c. Belum maksimalnya Jangkauan Pelayanan Sarana Transportasi dalam Membangun Konektifitas Wilayah.
- d. Belum semua daerah kabupaten/kota memiliki transportasi publik, di samping itu belum adanya keterpaduan intra dan antar modal transportasi
- e. Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas.
- f. Masih belum terwujudnya transportasi yang ramah lingkungan

17. Urusan Komunikasi dan Informatika

- a. Masih kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
- b. Belum optimalnya pengelolaan informasi daerah.
- c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi.
- d. Belum semua aplikasi yang terintegrasi
- e. Belum optimalnya pemanfaatan penggunaan SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi serta belum terpenuhinya SDM bidang teknologi informasi dan komunikasi baik dari segi kualitas maupun kuantitas

18. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a. Masih banyaknya koperasi yang kelengkapan legalitasnya belum lengkap
- b. Masih banyak koperasi yang belum menerapkan nilai dan prinsip koperasi secara benar
- c. Masih kurangnya kapasitas SDM notaris terkait peralihan kewenangan pengesahan pendirian koperasi dan perubahan anggaran dasar dari sisminbhkop
- d. Stigma koperasi di tengah masyarakat masih dianggap sebagai organisasi yang kurang bermanfaat sehingga menghambat kemajuan koperasi
- e. Belum maksimalnya sinergi dengan berbagai pihak dalam pengembangan usaha sektor riil koperasi
- f. Masih rendahnya kemampuan pelaku UKM dalam penguasaan IT untuk pengembangan pemasaran secara online
- g. Masih banyaknya pelaku UKM yang belum memahami tentang program skim kredit perbankan dan non perbankan
- h. Terbatasnya modal UKM dan terbatasnya promosi yang bisa diikuti oleh UKM

19. Urusan Penanaman Modal

- a. Pelayanan terhadap penanam modal (investor) masih belum optimal, karena masih kurangnya kuantitas dan kualitas aparatur terutama yang bersifat teknis agar dapat bekerja secara profesional dan masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan penanaman modal
- b. Data dan Informasi Potensi daerah yang dipromosikan kepada calon investor belum akurat.

- c. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan PMA/PMDN serta masih banyaknya perusahaan PMA/PMDN yang belum menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
- d. Dokumen perencanaan pendukung investasi di daerah yang dibutuhkan oleh calon investor belum memadai.
- e. Perusahaan PMA/PMDN masih kurang terbuka terhadap permasalahan yang dihadapinya dan tidak melaporkannya ke Tim Task Force Investasi.
- f. Keuangan negara dan keuangan daerah belum mampu mencukupi kebutuhan pembangunan infrastruktur publik, fasilitas kesehatan, sanitasi dan pendidikan yang memadai serta untuk pembiayaan upaya-upaya peningkatan penanaman modal.
- g. Masih belum terwujudnya jaminan stabilitas politik, keamanan dan penegakan hukum yang konsisten, lemahnya penegakan hukum yang terkait dengan kinerja pengadilan niaga, disamping itu efisiensi peradilan dalam penyelesaian sengketa masih rendah dan biaya untuk mendapatkan kepastian hukum dari peradilan di Indonesia relatif tinggi, dibandingkan negara-negara di Asia, peradilan di Indonesia termasuk lama dalam penyelesaian sengketa usaha.

20. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

- a. Rendahnya kapasitas dan daya saing pemuda berwirausaha
- b. Masih rentannya Karakter dan Jati Diri Pemuda dalam hal menyikapi perkembangan teknologi.
- c. Rendahnya partisipasi Pemuda dalam Kepramukaan
- d. Terbatasnya sarana dan prasarana pemuda dan olahraga
- e. Rendahnya Kualitas Atletik dan Pelatih
- f. Terbatasnya SDM Olahraga
- g. Kurangnya pelaksanaan kompetisi olahraga

21. Urusan Statistik

- a. Belum tersedianya ASN fungsional Statistisi untuk pelaksana pengelolaan data statistik sektoral
- b. Belum adanya interoperabilitas data statistik sektoral antar sistem informasi sebagai wujud implementasi Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia
- c. Masih rendahnya tingkat keterisian data statistik sektoral oleh produsen data
- d. Belum terpenuhinya standar data, metadata dan kode referensi data statistik sektoral

22. Urusan Persandian

- a. Belum tersedianya ASN fungsional Sandiman serta belum tersedianya ASN untuk pengelolaan keamanan informasi pada seluruh perangkat daerah
- b. Kurangnya sarana dan prasarana teknologi keamanan informasi
- c. Belum tersusunnya arsitektur keamanan informasi

23. Urusan Kebudayaan

Penerapan nilai-nilai budaya daerah di masyarakat belum optimal antara lain disebabkan oleh pemahaman masyarakat masih kurang, rendahnya minat generasi muda terhadap budaya daerah, belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dalam penyelamatan aset budaya, belum optimalnya promosi budaya, minimnya apresiasi seni dan kreatifitas karya budaya, serta belum optimalnya pembinaan lembaga adat

24. Urusan Perpustakaan

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam memberikan pelayanan kepastakaan.
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dapat mendukung peningkatan minat baca

25. Urusan Kearsipan

- a. Masih kurang dan belum meratanya SDM arsiparis di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang menyebabkan pekerjaan pengelolaan arsip banyak dilakukan oleh orang yang belum mengerti tentang pengelolaan arsip.
- b. Masih rendahnya pemahaman perangkat daerah tentang pentingnya pengamanan dan pengelolaan arsip
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana kearsipan sesuai standar yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 114 Tahun 2008, Tentang Pedoman Penggunaan Peralatan Kearsipan Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

B. Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

- a. Pada umumnya nelayan Sumatera Barat masih merupakan nelayan skala kecil sehingga mempengaruhi jumlah tangkapan ikan.
- b. Masih rendahnya SDM Kelautan dan Perikanan dan Penyuluh Perikanan yang kompeten.
- c. Terbatasnya sarana dan akses permodalan dalam usaha penangkapan, budidaya dan pengolahan hasil perikanan.
- d. Terbatasnya ketersediaan jumlah induk unggul di Sumatera Barat, sehingga masih harus mendatangkan induk unggul dari luar Sumatera Barat diantaranya pulau Jawa,
- e. Tingginya harga pakan bagi pembudidaya ikan yang berpengaruh terhadap laju pertumbuhan, daya tahan dan perkembangan ikan yang pada akhirnya akan mempengaruhi terhadap tingkat produksi dan produktifitas.
- f. Bencana alam yang masih sulit untuk dikendalikan, seperti banjir, tubo belerang, galodo, hama dan penyakit ikan dan lain-lain yang mempengaruhi terhadap produksi budidaya.
- g. Masih belum optimalnya SDM pembudidaya ikan dan masih sederhanya teknologi yang digunakan dalam penerapan cara budidaya ikan yang baik
- h. Masih rendahnya produk olahan hasil perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi era pasar bebas hasil perikanan.
- i. Masih tingginya tingkat kemiskinan masyarakat yang berada di wilayah pesisir
- j. Masih belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan perairan umum secara berkelanjutan

2. Urusan Pariwisata

- a. Kapasitas Sumber Daya Manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas masih belum memadai.
- b. Mapping destinasi belum dilakukan (inventarisasi dan sarana pra sarana dimiliki) sehingga belum memiliki pola perjalanan dengan berbagai pilihan seperti wisata budaya, wisata belanja, wisata alam, wisata minat khusus, wisata edukasi, agro dan ekowisata.
- c. Koordinasi Lintas Sektoral (Lembaga) belum berjalan maksimal, hal ini sangat penting mengingat Pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif membutuhkan koordinasi dan kerja bersama-sama pihak-pihak terkait: (pemerintah: instansi pariwisata dan ekonomi

- ### 3. Urusan Pertanian

- #### 4. Urusan Kehutanan

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat

- g. Masih lemahnya koordinasi dan sinergitas kelembagaan pemangku kepentingan pengelolaan hutan
- h. Perlu optimalisasi sistem informasi yang berkualitas untuk pembangunan kehutanan

5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

- a. Belum optimalnya pemanfaatan potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT)
- b. Belum memadainya ketersediaan dan keterjangkauan infrastruktur kelistrikan di sebagian besar daerah terisolir/terpencil/perbatasan
- c. Terbatasnya pendanaan/investasi baik dari Pemerintah maupun swasta untuk pengembangan potensi energi baru terbarukan
- d. Masih rendahnya Ratio Elektrifikasi dan cakupan layanan listrik dari nasional
- e. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya mineral
- f. Banyaknya pemegang IUP tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral
- g. Belum semua pemegang IUP memenuhi kewajibannya serta menerapkan pemberdayaan masyarakat
- h. Masih terdapat pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang belum sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan benar
- i. Sulitnya dilakukan penertiban terhadap kegiatan PETI yang dilakukan masyarakat sehingga terjadi Kerusakan lahan dan pencemaran lingkungan
- j. Belum optimalnya pemanfaatan Potensi air tanah

6. Urusan Perdagangan

- a. Ekspor masih terkonsentrasi pada beberapa komoditi tertentu seperti barang setengah jadi dan belum pada hasil hilirisasi produk
- b. Masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen serta belum optimalnya pengawasan barang dan jasa
- c. Ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang belum memadai, seperti pasar tradisional yang perlu direhabilitasi, pusat kuliner dan lain-lain
- d. Kurangnya ketersediaan barang pokok yang menyebabkan tingginya harga pada kondisi tertentu yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat
- e. Masih banyak ditemui barang beredar yang tidak memenuhi ketentuan, seperti barang yang tidak mencantumkan kode produksi, tanggal kadaluarsa, tanda SNI, manual dan garansi
- f. Masih rendahnya kualitas sarana pasar rakyat

7. Urusan Perindustrian

- a. Daya saing produk IKM yang dihasilkan masih relatif rendah dari sisi kemasan, standar dan mutu produk.
- b. Inovasi dan diversifikasi produk industri kecil menengah masih rendah
- c. Keakuratan data industri dari kabupaten/kota masih lemah
- d. Belum optimalnya pengembangan industri sesuai potensi daerah

8. Urusan Transmigrasi

- a. Kemampuan dan komitmen Pemerintah Daerah tentang transmigrasi semakin rendah akibatnya perkembangan kawasan transmigrasi semakin menurun.

- b. Terbatasnya dukungan anggaran terhadap pelaksanaan transmigrasi baik di Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga pelaksanaan kegiatan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah tidak dapat dilaksanakan secara maksimal
- c. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dianggap menghambat optimalisasi pengembangan kawasan transmigrasi karena telah terbagi setiap tahapan dengan kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, hal ini dikarenakan penyelenggaraan transmigrasi tidak bisa dibagi dengan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- d. Terkait dengan penyelesaian permasalahan lahan transmigrasi adanya pembatasan kewenangan Provinsi yang hanya bisa mengintervensi Kawasan Transmigrasi yang lintas Kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, padahal selama ini penyelesaian permasalahan lahan tetap melibatkan provinsi dan Kabupaten

C. Urusan Penunjang

1. Fungsi Pengawasan

- a. Masih kurangnya respon auditan dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
- b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum berjalan maksimal sebagaimana mestinya sesuai PP 60 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2009
- c. Terbatasnya jumlah dan kualitas aparat pengawas yang profesional dibandingkan dengan beban kerja pemeriksaan yang semakin meningkat
- d. Terbatasnya sarana dan prasarana yang representative dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan untuk menjalani tugas dan fungsi pengawasan

2. Fungsi Perencanaan

- a. Terbatasnya ketersediaan dan belum optimalnya pemanfaatan SDM Perencana baik secara kuantitas dan kualitas.
- b. Belum optimalnya penyelenggaraan proses perencanaan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.
- c. Belum optimalnya pemanfaatan data sebagai analisis untuk perencanaan pembangunan.
- d. Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi program/kegiatan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang

3. Fungsi Keuangan

- a. Pencapaian realisasi PAD belum sesuai dengan target PAD pada RPJMD.
- b. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabilitas.
- c. Masih terdapat gangguan jaringan dalam sistem pengelola keuangan maupun pajak daerah yang dapat mengganggu pelayanan publik.
- d. Dalam penyampaian laporan kegiatan masih adanya perbedaan data.
- e. Belum terinformasikannya regulasi yang baru ditetapkan terkait dengan redistribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah untuk ASN pengelola redistribusi daerah dan PAD yang sah.
- f. Masih terbatasnya sarana dalam pemungutan pajak seperti belum tersedianya mobil Samsat Keliling untuk masing-masing UPTD.
- g. Masih belum optimalnya partisipasi pihak ketiga dalam mewujudkan penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan lain-lain

4. Fungsi Kepegawaian

- a. Jumlah ASN secara kuantitas dan kualitas belum mencukupi kebutuhan perangkat daerah, dimana masih didominasi oleh tenaga administrative yang jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan jabatan fungsional tertentu (selain tenaga kependidikan dan kesehatan) serta terbatasnya ASN yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan perangkat daerah
- b. Masih belum maksimalnya sinergitas antara pengelola kepegawaian provinsi dengan kabupaten/kota terutama dalam pelaksanaan Manajemen kepegawaian berbasis sistem merit
- c. Implementasi reward dan punishment sebagai alat pembinaan dan implementasi kedisiplinan ASN belum berjalan optimal yang didukung dengan kriteria dan ukuran yang tepat dan jelas serta dilaksanakan secara konsisten sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja ASN
- d. Belum optimalnya pola pengembangan/pembinaan karir yang berdasarkan pada kualifikasi pendidikan, diklat dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi
- e. Belum optimalnya pengembangan Simpeg untuk pengelolaan data kepegawaian dan perlunya dilakukan integrasi data kepegawaian dengan stakeholder bidang kepegawaian
- f. Peningkatan layanan kepegawaian berbasis elektronik (less paper) dalam rangka percepatan pelayanan kepegawaian
- g. Belum optimalnya penyusunan kebutuhan (formasi) ASN didasarkan kepada analisa jabatan dan beban kerja, sehingga rekrutmen ASN belum dapat menutupi kekurangan ASN secara kualitas dan kuantitas
- h. Belum optimalnya pembinaan ASN secara menyeluruh dan berkala sesuai kebutuhan perangkat daerah
- i. Belum optimalnya pengelolaan mutasi jabatan sesuai dengan sistem merit

5. Fungsi Pendidikan dan Pelatihan

- a. Masih tingginya kesenjangan (gap) antara kebutuhan kompetensi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan kualifikasi pejabat pengembannya yang antara lain dikarenakan Pejabat administrator dan pengawas masih banyak yang belum mengikuti diklat kepemimpinan serta Calon Pegawai Negeri masih banyak yang belum mengikuti Diklat Prajabatan
- b. Keahlian dan keterampilan pejabat pelaksana (JFU) dalam mewujudkan kinerja OPD masih rendah yang antara lain dapat diindikasikan dari masih banyaknya keluhan tentang pelaksanaan pelayanan publik dan mental melayani, sulitnya mendapatkan ASN yang memiliki kemampuan pengadaan barang dan jasa, menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan, mekanisme pelaporan kerja, pengelolaan aset, dan pengelola kepegawaian OPD yang menguasai AKD
- c. Masih rendahnya pemenuhan formasi jabatan fungsional tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 26/2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian (Inpassing) yang mengamanatkan bahwa setiap PNS hendaknya dipersiapkan menjadi pejabat fungsional tertentu.
- d. Masih banyak PNS yang belum memiliki sertifikasi kompetensi untuk bisa melaksanakan inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 26/2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian (Inpassing).

- e. Sarana dan prasarana pendukung kediklatan belum memenuhi standar akreditasi terbaik dari Lembaga Administrasi Negara.
- f. Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara diklat belum dapat memenuhi perkembangan standar kompetensi penyelenggara diklat

6. Fungsi Penelitian dan Pengembangan

- a. Belum optimalnya SDM kelitbangan baik secara kuantitas, kapasitas maupun kualitas.
- b. Sarana dan prasarana kelitbangan yang masih minim.
- c. Jaringan kelitbangan yang masih terbatas.
- d. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dalam pengambilan kebijakan.
- e. Minimnya fasilitasi penyaluran hasil inovasi teknologi kepada pengguna

1.2.2 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Gubernur Sumatera Barat merupakan gambaran kondisi masa depan yang di cita-citakan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2021-2026. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Provinsi Sumatera Barat yang akan diwujudkan pada akhir tahun 2026 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya. Misi Gubernur Sumatera Barat pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Visi dan Misi menjadi gambaran otentik Provinsi Sumatera Barat dalam 5 tahun (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan visi gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 (SESUAI RPJP) adalah "***Menjadi Provinsi Terkemuka Berbasis Sumberdaya Manusia Yang Agamais Pada Tahun 2025***".

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2019-2024, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025. Untuk memahami Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut jelaskan pengertian sebagai berikut:

Terkemuka

Dalam hal ini diartikan sebagai suatu kondisi masyarakat Sumatera Barat yang yang sudah maju yang ditandai dengan tingkat pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan yang tinggi dan merata. Dalam pengertian ini, tingkat kemajuan ini juga dapat diperlihatkan melalui perkembangan teknologi yang modern dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat berkomunikasi dan bergaul secara nasional maupun internasional dalam kesetaraan. Tingkat kemajuan ini juga ditandai dengan sumber daya insani yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi dalam ekonomi dan sosial. Akhirnya pembangunan manusia di daerah ini menghasilkan tingkat produktivitas dan efisiensi yang tinggi serta terbuka terhadap perubahan dan pembaharuan yang berkembang dalam masyarakat. Termasuk ke dalam unsur kemajuan ini adalah kesejahteraan diartikan sebagai suatu kondisi masyarakat yang sudah cukup makmur yang ditandai oleh pendapatan masyarakat yang

cukup tinggi, berbadan sehat dan kuat, tingkat pengangguran dan kemiskinan sudah sangat rendah, mempunyai distribusi pendapatan yang lebih merata dan adil, mempunyai kesempatan berusaha yang sama antara golongan pengusaha, pemerintahan sudah berjalan secara demokratis, taat dan sadar hukum, terdapatnya kesamaan peranan pria dan wanita (kesetaraan gender), mempunyai fasilitas pelayanan sosial yang cukup merata dan berkualitas baik, adanya jaminan sosial yang cukup untuk orang cacat dan penduduk usia lanjut, serta terdapatnya kualitas lingkungan hidup yang baik, hijau, lestari dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

Pengertian **agama** dalam Visi Sumatera Barat dua puluh tahun ke depan, diartikan tidak hanya untuk sumber daya manusia saja, tetapi juga secara keseluruhan untuk pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Dimana kondisi masyarakat yang agama sebagai sumber motivasi, inspirasi untuk diamalkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya IPTEKS, pertahanan, keamanan, lingkungan, sehingga terwujudnya Sumatera Barat yang modern dan beradab. Masyarakat yang agama juga ditandai oleh adanya keseimbangan dinamis antara dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, lahir dan batin serta material dan sipiritual. Dengan demikian, disamping untuk persiapan menghadapi akhirat, agama dan adat juga akan dapat pula dijadikan sebagai sumber energi untuk menggerakkan proses pembangunan daerah secara menyeluruh.

Berbasis Sumberdaya Manusia

Sebagai landasan umum pembangunan daerah sengaja dipilih karena pola pembangunan ini diperkirakan sebagai cara yang tepat sesuai dengan kondisi daerah guna dapat mewujudkan visi jangka panjang daerah. Alasannya adalah karena Provinsi Sumatera Barat tidak mempunyai sumber daya alam bernilai tinggi seperti minyak dan gas, batubara yang berskala ekonomis. Potensi yang dimiliki oleh daerah adalah dalam bentuk sumber daya manusia berjumlah cukup besar dengan kualitas relatif lebih baik. Karena itu, visi pembangunan daerah diperkirakan akan lebih mungkin dapat dicapai melalui pembangunan manusia. Sedangkan kegiatan pembangunan manusia tersebut mencakup pembangunan di bidang agama, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Sasaran utama yang ingin dicapai melalui pembangunan manusia ini adalah meningkatnya Sumberdaya Manusia yang berdaya saing, meningkatnya produktivitas kerja dan penyerapan tenaga kerja yang menuju pada terwujudnya kesejahteraan sosial yang menyeluruh meliputi kemakmuran ekonomi dan sosial sekaligus dengan indikator yang jelas berbasis data penduduk.

Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan dan dilaksanakan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Berdasarkan pengertian ini maka misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kehidupan agama dan budaya berdasarkan filosofi" Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah".

Misi ini diarahkan untuk perubahan sikap mental yang lebih baik sesuai nilai-nilai agama, adat, budaya dan kearifan lokal ditengah kehidupan masyarakat, peningkatan kesalehan sosial, penguatan kelembagaan agama, adat dan budaya.

2. Mewujudkan sistem hukum dan tata pemerintahan yang baik.

Misi ini diarahkan untuk membangun tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

3. Mewujudkan sumberdaya insani yang berkualitas, amanah dan berdaya saing tinggi.

Misi ini diarahkan untuk membangun sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berakhlak, berkualitas tinggi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdaya saing dengan berlandaskan kesetaraan gender.

4. Mewujudkan usaha ekonomi produktif dan mampu bersaing di dunia global.

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang lebih tinggi dan merata dengan mengembangkan kegiatan ekonomi yang lebih produktif berbasis kerakyatan, mendorong sektor unggulan daerah dan memanfaatkan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk yang berdaya saing.

5. Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.

Misi ini diarahkan untuk penyediaan infrastruktur bagi peningkatan kegiatan ekonomi, pengembangan wilayah dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sesuai dengan tata ruang daerah.

1.2.3 Program Pembangunan Daerah

Indikasi rencana program pembangunan merupakan upaya-upaya yang akan ditempuh dan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Dalam implementasinya secara operasional, program-program tersebut dijabarkan kedalam urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Program-program tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait sehingga dapat dilihat dengan jelas pembagian tugas Perangkat Daerah dalam melaksanakan rencana pembangunan yang telah disusun, yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah langsung dalam pencapaian Visi, Misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Program pembangunan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dan indikator kinerja daerah dikelompokkan ke dalam 24 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Urusan : Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sosial, Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, dan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Sedangkan untuk urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan : tenaga kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olah Raga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan dan Arsip. Terkait dengan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yaitu Urusan : Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi. Rincian program pembangunan daerah berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang dijabarkan menurut 7 (tujuh) prioritas pembangunan daerah dengan 204 program pembangunan secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 1.4
Program Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Berdasarkan RPJMD 2016-2021

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan
1.	Peningkatan Produksi untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis	1. Peningkatan Ketahanan Pangan 2. Diversifikasi Pangan 3. Peningkatan Produksi dan produktivitas 4. Peningkatan Produksi dan Produktivitas 5. Pengembangan Perikanan Ekonomi Maritim 6. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis 7. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis 8. Peningkatan Produksi dan Produktivitas 9. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM 10. Pengamanan sumber daya hewani
	Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur	1. Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan 2. Perencanaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral 3. Penyediaan dan pengolahan air baku 4. Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kab/kota
	Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam	1. Perlindungan dan konservasi sumberdaya alam 2. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 3. Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang 4. Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya
	Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan	1. Pengembangan Perikanan Ekonomi Maritim 2. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis 3. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi laut 4. Rehabilitasi, Konservasi, pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan
	Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM dan peningkatan investasi	1. Pengembangan kewilayahan industri 2. Pengembangan industri kecil dan menengah 3. Peningkatan Kualitas Produk Industri 4. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 5. Peningkatan dan pengembangan daya saing koperasi 6. Peningkatan dan pengembangan daya saing UMKM 7. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi 8. Pengembangan perdagangan dalam negeri 9. Peningkatan dan pengembangan perdagangan luar negeri

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan
	Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal	1. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 2. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha 3. Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Laboratorium 4. Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja 5. Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
2	Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal	Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur pada Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal
	Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan	1. Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah 2. Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
	Peningkatan Produksi untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis
3	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Keluarga Berencana 2. Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi Remaja 3. Penyiapan tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 4. Peningkatan Pengendalian Kependudukan 5. Obat dan Perbekalan Kesehatan 6. Upaya Kesehatan Masyarakat 7. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 8. Perbaikan Gizi Masyarakat 9. Pengembangan Lingkungan Sehat 10. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular 11. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata 12. Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata 13. Peningkatan Sumber Daya Kesehatan 14. Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 15. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 16. Peningkatan Pelayanan BLUD 17. Standarisasi pelayanan kesehatan 18. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan
		19. Peningkatan Perlindungan Perempuan 20. Peningkatan Kualitas Keluarga 21. Peningkatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak 22. Peningkatan Sistem Data Gender dan Anak 23. Peningkatan Perlindungan Khusus Anak
	Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan	1. Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Pendidikan 2. Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah 3. Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus 4. Peningkatan Akses, Pemerataan dan Mutu Sekolah Menengah Kejuruan 5. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan 7. Peningkatan Mutu, relevansi dan Daya Saing Pendidikan Menengah
	Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal	1. Pemberdayaan Fakir Miskin 2. Penanggulangan Kemiskinan 3. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 4. Pembinaan anak terlantar 5. Pembinaan para penyandang disabilitas dan eks trauma 6. Pembinaan panti lanjut usia terlantar 7. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 8. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 9. Pemberdayaan fakir miskin 10. Percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur pada kawasan khusus dan daerah tertinggal 11. Pembinaan Panti Lanjut Usia Terlantar 12. Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Wanita Tuna Susila, Dan Penyakit Sosial Lainnya) 13. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 14. Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial 15. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 16. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 17. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha 18. Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Laboratorium 19. Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan
		20. Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan 21. Peningkatan Mutu, relevansi dan Daya Saing Pendidikan Menengah
4	Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat	1. Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Peng-amalan dan Pengembangan Nilai-nilai Agama 2. Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama 3. Pendidikan Karakter 4. Pengembangan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan 5. Pemberdayaan kelembagaan Masyarakat adat 6. Pemberdayaan dan Penguatan Eksistensi Lembaga-Lembaga Adat Seni dan Budaya 7. Pengembangan dan Penguatan Nilai Budaya 8. Pemberdayaan dan Penguatan Eksistensi Lembaga-Lembaga Adat, Seni dan Budaya 9. Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Budaya 10. Pengelolaan Kekayaan Budaya 11. Peningkatan Diplomasi Seni dan Budaya 12. Peningkatan Wawasan dan Kreatifitas Seni Budaya Pemuda 13. Pengembangan dan perlindungan bahasa daerah
5	Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur	1. Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi 2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi 3. Peningkatan sarana prasarana kebinamargaan 4. Penyediaan dan pengolahan air baku 5. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional 6. Pengelolaan sistem drainase kewenangan provinsi 7. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah 8. Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kab/kota 9. Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan 10. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 11. Tata Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam 12. Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan
	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan	1. Pengelolaan e-Government Pemerintah Daerah 2. Pengamanan Informasi Pemerintah dan persandiaan 3. Peningkatan penyediaan data statistik sectoral
	Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan	1. Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah 2. Peningkatan Akses, Pemerataan dan Mutu Sekolah Menengah Kejuruan

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan
		3. Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
6	Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam	1. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. 2. Tata Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam 3. Peningkatan kualitas dan akses Informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup 4. Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan. 5. Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan 6. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam 7. Pemantapan Kawasan Hutan 8. Rehabilitasi & Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 9. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam 10. Perencanaan dan Pengembangan Hutan 11. Perhutanan Sosial dan Kemitraan 12. Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan 13. Pengelolaan, pengembangan konservasi air tanah 14. Pengendalian Kebakaran Hutan 15. Peningkatan mitigasi bencana. 16. Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana 17. Pemetaan daerah rawan kebakaran 18. Pengendalian banjir dan pengamanan pantai 19. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Kewenangan Provinsi lainnya 20. Penanganan Tanggap Darurat Bencana 21. Pemulihan daerah pasca bencana
7	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan	1. Pembinaan dan pengembangan aparatur 2. Peningkatan Manajemen SDM Aparatur 3. Peningkatan fungsi pengawasan dan penegakan hukum 4. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Provinsi dan perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat 5. Manajemen Perubahan 6. Penataan Kelembagaan Daerah Pemerintah Daerah 7. Pengelolaan Otonomi Daerah 8. Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah 9. Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan
		10. Pengelolaan e-Government Pemerintah Daerah 11. Pengamanan Informasi Pemerintah dan persandiaan 12. Peningkatan penyediaan data statistik sektoral 13. Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik 14. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 15. Peningkatan Pendapatan Daerah 16. Pebinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 17. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 18. Pembangunan Materi Hukum 19. Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM 20. Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan Hukum 21. Sarana dan Informasi Hukum 22. Peningkatan Penataan Perundang-undangan

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Perubahan (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	72,38	72,65	0,37
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,56	6,63	1,07
3.	Angka Pengangguran (ribu orang)	190,61	179,95	-5,59
4.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,60	3,29	1,69
5.	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp.juta)	43,84	45,29	3,31
6.	Ketimpangan Pendapatan	0,301	0,300	0,001

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan melalui perolehan pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan hasil pembangunan lainnya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living). Selanjutnya dimensi tersebut diukur dengan beberapa indikator. Dimensi kesehatan diukur melalui Umur Harapan Hidup (UHH). Dimensi pengetahuan atau pendidikan diukur dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Sementara itu, standar hidup layak diukur melalui pengeluaran per kapita disesuaikan.

Secara umum, Perkembangan IPM Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 2016-2021 terus meningkat, dimana IPM Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 mencapai 72,65 dan masih baik dibandingkan rata-rata IPM nasional (72,29), dengan ranking IPM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 menduduki peringkat ke-9 secara nasional setelah Provinsi Banten. Untuk Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Barat menduduki peringkat ke-3 setelah Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Riau. Perbandingan IPM antar kabupaten/kota tahun 2021, IPM tertinggi adalah Kota Padang sebesar 82,90 dan IPM terendah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 61,35. Hal ini memberikan indikasi bahwa terjadi perbaikan kesejahteraan masyarakat dalam kurun waktu tersebut. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia dan komponennya dapat dilihat pada Tabel berikut.

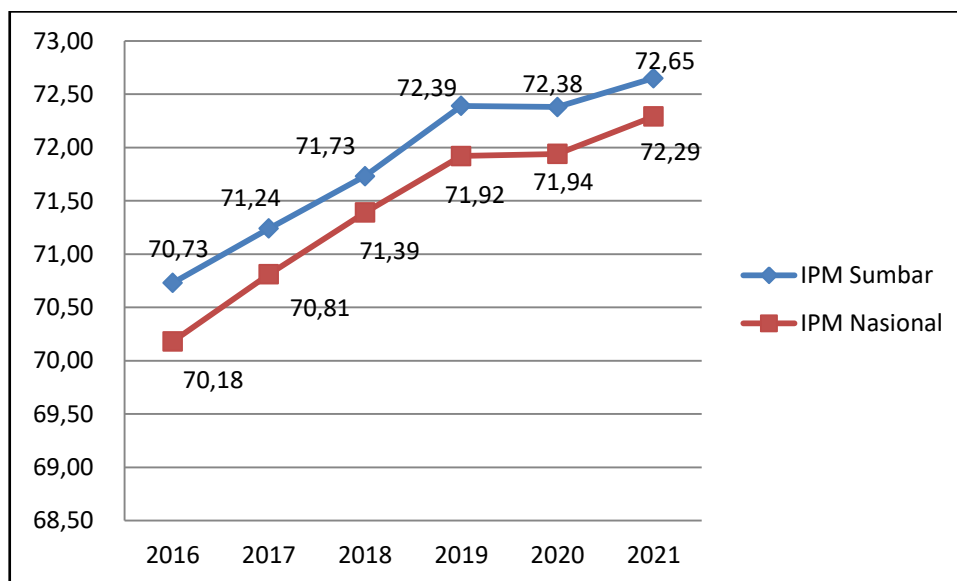
Tabel 2.1
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016-2021

NO	KOMPONEN IPM	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Umur Harapan Hidup Saat Lahir	Tahun	68,73	68,78	69,01	69,31	69,47	69,59
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,79	13,94	13,95	14,01	14,02	14,09
3	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,59	8,72	8,76	8,92	8,99	9,07
4	Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rp/ Org/Th	10.126	10.306	10.638	10.925	10.733	10.790

NO	KOMPONEN IPM	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Disesuaikan							
IPM PROV. SUMATERA BARAT			70,73	71,24	71,73	72,39	72,38	72,65

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

Grafik 2.1
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat
Dibandingkan dengan Nasional Tahun 2016-2021



Perkembangan IPM Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dalam kurun waktu 2016-2021 mengalami dinamika, ada yang naik dan ada yang mengalami penurunan. Perbandingan IPM antar kabupaten/kota pada tahun 2021, IPM tertinggi adalah Kota Padang sebesar 82,90 dan IPM terendah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 61,35. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia se Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel berikut :

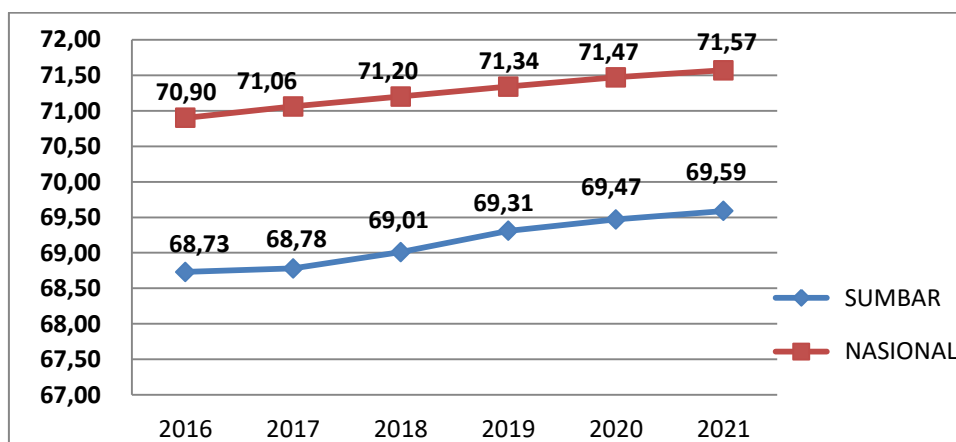
Tabel 2.2
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat
Tahun 2016-2021

NO.	KABUPATEN/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kab. Kepulauan Mentawai	58,27	59,25	60,28	61,26	61,09	61,35
2	Kab. Pesisir Selatan	68,39	68,74	69,40	70,08	69,90	70,03
3	Kab. Solok	67,67	67,86	68,60	69,08	69,08	69,24
4	Kab. Sijunjung	66,01	66,60	66,97	67,66	67,74	67,86
5	Kab. Tanah Datar	70,11	70,37	71,25	72,14	72,33	72,46
6	Kab. Padang Pariaman	68,44	68,90	69,71	70,59	70,61	70,76
7	Kab. Agam	70,36	71,10	71,70	72,37	72,46	72,57
8	Kab. Lima Puluh Kota	68,37	68,69	69,17	69,67	69,47	69,68
9	Kab. Pasaman	64,57	64,94	65,60	66,46	66,64	66,77
10	Kab. Solok Selatan	67,47	67,81	68,45	68,94	69,04	69,23
11	Kab. Dharmasraya	70,25	70,40	70,86	71,52	71,51	71,76

NO.	KABUPATEN/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12	Kab. Pasaman Barat	66,03	66,83	67,43	68,21	68,49	68,76
13	Kota Padang	81,06	81,58	82,25	82,68	82,82	82,90
14	Kota Solok	77,07	77,44	77,89	78,38	78,29	78,41
15	Kota Sawahlunto	70,67	71,13	71,72	72,39	72,64	72,88
16	Kota Padang Panjang	76,50	77,01	77,30	78,00	77,93	77,97
17	Kota Bukittinggi	79,11	79,80	80,11	80,71	80,58	80,70
18	Kota Payakumbuh	77,56	77,91	78,23	78,95	78,90	79,08
19	Kota Pariaman	75,44	75,71	76,26	76,70	76,90	77,07

Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) Provinsi Sumatera Barat dalam 5 lima tahun terakhir meningkat, sejalan dengan perkembangan UHH secara nasional. UHH Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 mencapai 69,59 tahun, namun angka ini masih di bawah Nasional. Sementara untuk perbandingan UHH antar kabupaten/kota tahun 2021 di Provinsi Sumatera Barat, UHH tertinggi berada di Kota Bukittinggi yaitu sebesar 80,70 tahun lebih tinggi dari UHH provinsi dan nasional, dan terendah di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sebesar 64,73 Tahun. Perkembangan UHH Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Perkembangan UHH Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat dapat dilihat pada Grafik dan Tabel berikut :

Grafik 2.2
Perkembangan Umur Harapan Hidup Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional
Tahun 2016-2021 (Tahun)



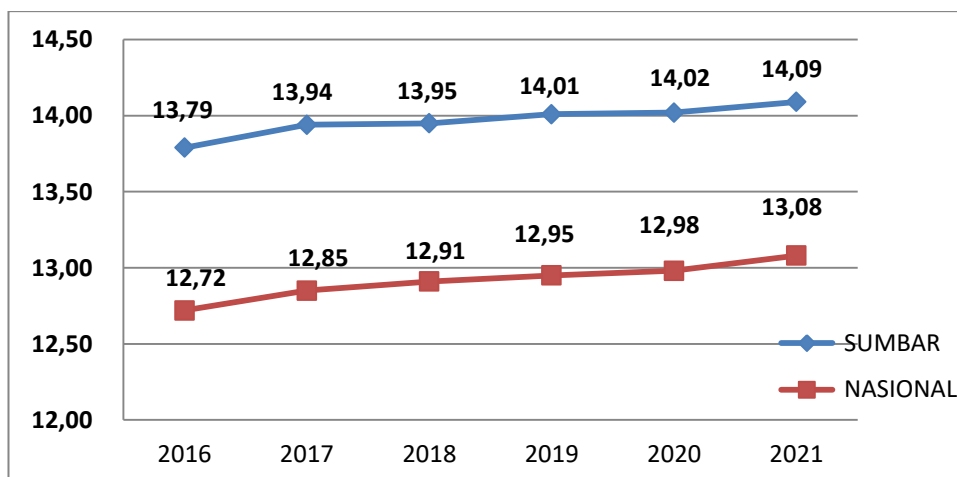
Tabel 2.3
Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat
Tahun 2016-2021 (Tahun)

NO	KABUPATEN/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kab. Kepulauan Mentawai	64,36	64,37	64,49	64,68	64,73	64,73
2	Kab. Pesisir Selatan	70,11	70,23	70,45	70,73	70,86	70,96
3	Kab. Solok	67,50	67,65	67,95	68,34	68,58	68,79
4	Kab. Sijunjung	65,33	65,44	65,69	66,02	66,21	66,36
5	Kab. Tanah Datar	68,93	69,11	69,38	69,73	69,94	70,12
6	Kab. Padang Pariaman	67,80	67,96	68,23	68,58	68,79	68,97
7	Kab. Agam	71,44	71,57	71,83	72,17	72,37	72,53

NO	KABUPATEN/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
8	Kab. Lima Puluh Kota	69,27	69,31	69,47	69,70	69,79	69,84
9	Kab. Pasaman	66,40	66,54	66,82	67,18	67,40	67,59
10	Kab. Solok Selatan	66,78	66,92	67,21	67,58	67,81	68,01
11	Kab. Dharmasraya	70,30	70,44	70,73	71,10	71,33	71,53
12	Kab. Pasaman Barat	67,09	67,15	67,37	67,67	67,82	67,94
13	Kota Padang	73,19	73,20	73,35	73,57	73,65	73,69
14	Kota Solok	72,83	72,92	73,14	73,45	73,61	73,73
15	Kota Sawahlunto	69,33	69,39	69,59	69,87	70,00	70,10
16	Kota Padang Panjang	72,45	72,46	72,58	72,77	72,82	72,82
17	Kota Bukittinggi	73,60	73,69	73,91	74,22	74,38	74,50
18	Kota Payakumbuh	73,03	73,13	73,33	73,61	73,74	73,84
19	Kota Pariaman	69,63	69,67	69,87	70,15	70,28	70,38

Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Sumatera Barat dalam lima tahun terakhir meningkat, sejalan dengan perkembangan HLS secara nasional. HLS Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 mencapai 14,02 tahun, angka ini di atas angka Nasional. Sementara untuk perbandingan HLS antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2021, HLS tertinggi berada di Kota Padang yaitu sebesar 16,52 tahun, lebih tinggi dari HLS provinsi dan nasional, dan terendah di Kabupaten Sijunjung yaitu sebesar 12,7 Tahun. Perkembangan HLS Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Perkembangan HLS Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat dapat dilihat pada Grafik dan Tabel berikut :

Grafik 2.3
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional Tahun 2016-2021 (Tahun)



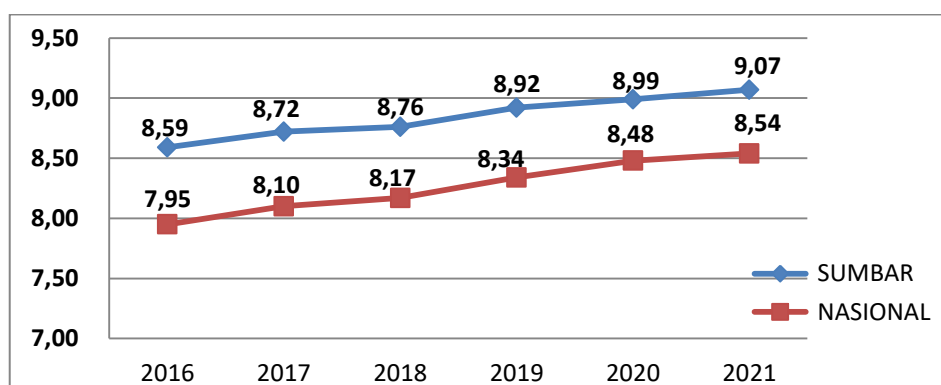
Tabel 2.4
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Tahun)

NO	KABUPATEN/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kab. Kepulauan Mentawai	11,74	12,07	12,39	12,76	12,82	12,89
2	Kab. Pesisir Selatan	13,05	13,06	13,30	13,31	13,32	13,33

NO	KABUPATEN/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Kab. Solok	13,00	13,01	13,02	13,03	13,04	13,05
4	Kab. Sijunjung	12,27	12,34	12,35	12,36	12,37	12,38
5	Kab. Tanah Datar	13,46	13,59	13,88	14,32	14,33	14,34
6	Kab. Padang Pariaman	13,55	13,56	13,57	13,62	13,67	13,68
7	Kab. Agam	13,73	13,94	13,85	13,86	13,87	13,88
8	Kab. Lima Puluh Kota	13,25	13,26	13,27	13,28	13,29	13,30
9	Kab. Pasaman	12,71	12,72	12,78	12,79	12,80	12,81
10	Kab. Solok Selatan	12,51	12,68	12,69	12,70	12,71	12,72
11	Kab. Dharmasraya	12,39	12,40	12,41	12,42	12,43	12,44
12	Kab. Pasaman Barat	12,67	13,06	13,22	13,40	13,61	13,68
13	Kota Padang	15,87	16,15	16,50	16,51	16,52	16,53
14	Kota Solok	14,28	14,29	14,30	14,31	14,32	14,33
15	Kota Sawahlunto	13,05	13,14	13,15	13,16	13,17	13,18
16	Kota Padang Panjang	15,02	15,03	15,04	15,05	15,06	15,07
17	Kota Bukittinggi	14,93	14,94	14,95	14,96	14,97	14,98
18	Kota Payakumbuh	14,22	14,23	14,24	14,25	14,26	14,27
19	Kota Pariaman	14,50	14,51	14,52	14,53	14,54	14,55

Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Sumatera Barat dalam lima tahun terakhir meningkat, sejalan dengan perkembangan RLS secara nasional. RLS Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 mencapai 9,07 tahun, angka ini di atas angka Nasional yang mencapai 8,54 tahun. Sementara untuk perbandingan RLS antar kabupaten/kota tahun 2021 di Provinsi Sumatera Barat, RLS tertinggi berada di Kota Padang Panjang yaitu sebesar 11,63 tahun lebih tinggi dari RLS provinsi dan nasional, dan terendah di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sebesar 7,20 Tahun. Perkembangan RLS Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Perkembangan RLS Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat dapat dilihat pada Grafik dan Tabel berikut :

Grafik 2.4
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional Tahun 2016-2021 (Tahun)



Tabel 2.5
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat
Tahun 2016-2021 (Tahun)

NO	KABUPATEN/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kab. Kepulauan Mentawai	6,52	6,69	6,95	7,08	7,09	7,20
2	Kab. Pesisir Selatan	8,12	8,13	8,14	8,25	8,26	8,27
3	Kab. Solok	7,58	7,60	7,84	7,85	7,86	7,87
4	Kab. Sijunjung	7,50	7,72	7,77	8,10	8,11	8,12
5	Kab. Tanah Datar	8,12	8,14	8,44	8,45	8,61	8,62
6	Kab. Padang Pariaman	7,00	7,21	7,50	7,86	7,87	7,88
7	Kab. Agam	8,18	8,39	8,69	8,85	8,96	8,57
8	Kab. Lima Puluh Kota	7,92	7,96	7,97	7,98	7,99	8,07
9	Kab. Pasaman	7,64	7,65	7,66	7,86	8,09	8,10
10	Kab. Solok Selatan	7,99	8,00	8,15	8,16	8,28	8,32
11	Kab. Dharmasraya	8,23	8,24	8,25	8,46	8,47	8,55
12	Kab. Pasaman Barat	7,84	7,85	7,86	8,06	8,19	8,27
13	Kota Padang	11,24	11,32	11,33	11,34	11,58	11,59
14	Kota Solok	10,79	10,95	11,01	11,02	11,03	11,04
15	Kota Sawahlunto	9,92	9,93	9,94	9,97	10,17	10,32
16	Kota Padang Panjang	11,42	11,43	11,44	11,45	11,62	11,63
17	Kota Bukittinggi	10,98	11,30	11,31	11,32	11,33	11,34
18	Kota Payakumbuh	10,30	10,45	10,46	10,72	10,73	10,81
19	Kota Pariaman	10,09	10,10	10,36	10,37	10,59	10,67

2.1.2 Angka Kemiskinan

Tingkat kemiskinan merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah, karena dari tingkat kemiskinan mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera pada dasarnya merupakan tujuan dari pembangunan daerah. Begitu juga halnya dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, penurunan tingkat kemiskinan dijadikan salah satu dari prioritas RPJMD. Menurut data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Sumatera Barat pada periode Maret dan September setiap tahunnya yang dirilis dalam Berita Resmi Statistik, bahwa untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Berdasarkan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan, dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dalam hal ini penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan Garis kemiskinan (GK) per bulan untuk mengklasifikasikan penduduk ke dalam golongan miskin atau tidak miskin. Garis kemiskinan merupakan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan. Garis kemiskinan yang digunakan untuk menghitung penduduk miskin September 2021 adalah Rp.579.545,- (kapita/bulan). Selama periode Maret 2021–September 2021, Garis Kemiskinan naik sebesar 1,91 persen. Kenaikannya dari Rp.568.703,- perkapita per bulan pada Maret 2021 menjadi Rp579.545,- perkapita per bulan pada September 2021. Sementara pada periode September 2020–September 2021, Garis Kemiskinan naik sebesar 5,90 persen, yaitu dari Rp.547.240,- perkapita per bulan pada September 2020

menjadi Rp.579.545,- per kapita per bulan pada September 2021. Jika dibandingkan antara Maret 2021 dengan September 2021, maka garis kemiskinan daerah perkotaan meningkat sebesar 1,96 persen. Sedangkan di daerah perdesaan meningkat 1,81 persen.

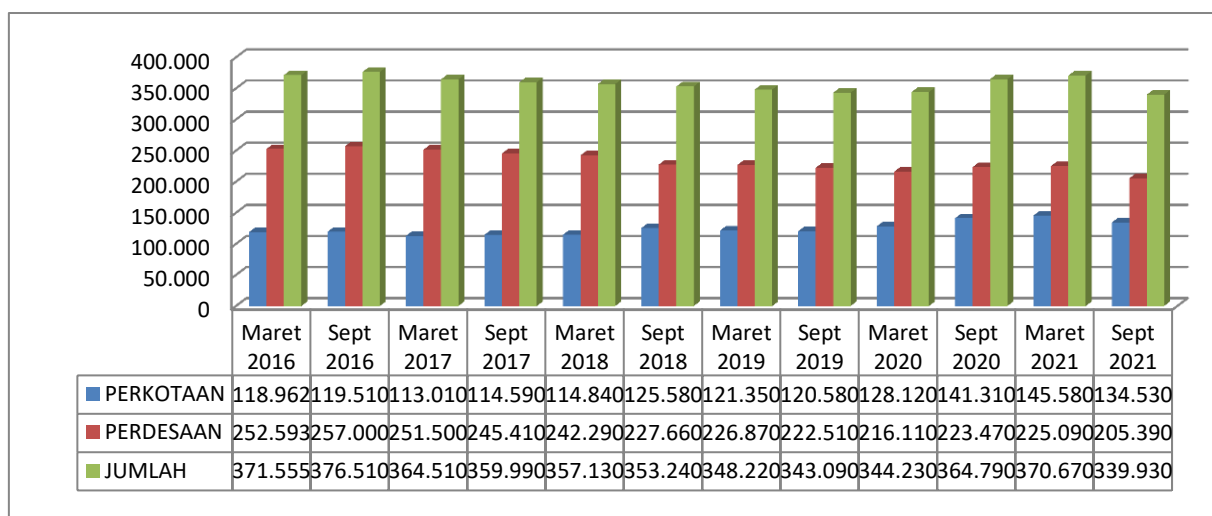
Jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat pada September 2021 mencapai 339,93 ribu orang (6,04 persen), berkurang sebesar 30,74 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2021 yang sebesar 370,67 ribu orang. Terjadi penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2021 sebesar 5,30 persen turun menjadi 4,83 persen pada September 2021. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2021 sebesar 7,91 persen turun menjadi 7,23 persen pada September 2021.

Tabel 2.6
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat
Maret 2016 – September 2021

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (JIWA)			PERSENTASE PENDUDUK MISKIN		
	PERKOTAAN	PERDESAAN	JUMLAH	PERKOTAAN	PERDESAAN	JUMLAH
Maret 2016	118.962	252.593	371.555	5,54	8,16	7,69
Sept 2016	119.510	257.000	376.510	5,52	8,27	7,14
Maret 2017	113.010	251.500	364.510	5,14	8,10	6,87
Sept 2017	114.590	245.410	359.990	5,11	7,94	6,75
Maret 2018	114.840	242.290	357.130	4,86	8,07	6,65
Sept 2018	125.580	227.660	353.240	4,99	7,9	6,55
Maret 2019	121.350	226.870	348.220	4,76	7,88	6,42
Sept 2019	120.580	222.510	343.090	4,71	7,69	6,29
Maret 2020	128.120	216.110	344.230	4,97	7,43	6,28
Sept 2020	141.310	223.470	364.790	5,22	7,83	6,56
Maret 2021	145.580	225.090	370.670	5,30	7,91	6,63
Sept 2021	134.530	205.390	339.930	4,83	7,23	6,04

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat

Grafik 2.5
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat
Kondisi Maret 2016 – September 2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat

Jika dibandingkan tingkat kemiskinan di Sumatera Barat dengan Nasional sejak tahun 2016 sampai 2021, data dari BPS menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Sumatera Barat lebih rendah dari pada nasional, yaitu pada tahun 2016 sebesar 7,09% (Maret) dan sampai dengan tahun 2021 di bulan Maret menurun menjadi 6,63%. Namun tingkat kemiskinan di Sumatera Barat tahun 2021 (Maret) cenderung relative naik sedikit dibandingkan kondisi 2020 (September) akibat adanya pandemic Covid 19.

Tabel 2.7
Persentase Tingkat Kemiskinan menurut Kab/Kota se Sumatera Barat
Tahun 2016-2021 (Maret)

NO	KAB/KOTA PROVINSI/NASIONAL	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kab. Kep. Mentawai	15,12	14,67	14,44	14,43	14,35	14,84
2	Kab. Pesisir Selatan	7,92	7,79	7,59	7,88	7,61	7,92
3	Kab. Solok	9,32	9,06	8,88	7,98	7,81	8,01
4	Kab. Sijunjung	7,60	7,35	7,11	7,04	6,78	6,80
5	Kab. Tanah Datar	5,68	5,56	5,32	4,66	4,40	4,54
6	Kab. Padang Pariaman	8,91	8,46	8,04	7,10	6,95	7,22
7	Kab. Agam	7,83	7,59	6,76	6,75	6,75	6,85
8	Kab. Lima Puluh Kota	7,59	7,15	6,99	6,97	6,86	7,29
9	Kab. Pasaman	7,65	7,41	7,31	7,21	7,16	7,48
10	Kab. Solok Selatan	7,35	7,21	7,07	7,33	7,15	7,52
11	Kab. Dharmasraya	7,16	6,68	6,42	6,29	6,23	6,67
12	Kab. Pasaman Barat	7,40	7,26	7,34	7,14	7,04	7,51
13	Kota Padang	4,68	4,74	4,70	4,48	4,40	4,94
14	Kota Solok	3,86	3,66	3,30	3,24	2,77	3,12
15	Kota Sawahlunto	2,21	2,01	2,39	2,17	2,16	2,38
16	Kota Padang Panjang	6,75	6,17	5,88	5,60	5,24	5,92
17	Kota Bukittinggi	5,48	5,35	4,92	4,60	4,54	5,14
18	Kota Payakumbuh	6,46	5,88	5,77	5,68	5,65	6,16
19	Kota Pariaman	5,23	5,20	5,03	4,76	4,10	4,38
	Sumatera Barat	7,09	6,87	6,65	6,42	6,28	6,63
	Nasional	13,96	13,47	13,10	9,22	10,19	10,14

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk Miskin menurut Kab/Kota se Sumatera Barat
Tahun 2017-2021 (Maret)

NO	KAB/KOTA PROVINSI/NASIONAL	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kab. Kep. Mentawai	12,95	12,99	13,22	13,37	14,31
2	Kab. Pesisir Selatan	35,53	34,92	36,51	35,46	37,41
3	Kab. Solok	33,33	32,89	29,74	29,28	30,36
4	Kab. Sijunjung	16,83	16,55	16,65	16,28	16,81
5	Kab. Tanah Datar	19,27	18,48	16,20	15,34	15,89
6	Kab. Padang Pariaman	34,70	33,20	29,48	28,98	30,41

NO	KAB/KOTA PROVINSI/NASIONAL	2017	2018	2019	2020	2021
7	Kab. Agam	36,57	32,92	33,10	33,31	34,26
8	Kab. Lima Puluh Kota	26,93	26,47	26,64	26,43	28,51
9	Kab. Pasaman	20,38	20,31	20,22	20,29	21,57
10	Kab. Solok Selatan	11,89	11,85	12,49	12,39	13,41
11	Kab. Dharmasraya	15,63	15,42	15,49	15,70	17,60
12	Kab. Pasaman Barat	30,84	31,83	31,53	31,64	34,97
13	Kota Padang	43,75	44,04	42,44	42,17	48,44
14	Kota Solok	2,50	2,29	2,29	1,99	2,31
15	Kota Sawahlunto	1,23	1,48	1,35	1,36	1,52
16	Kota Padang Panjang	3,22	3,11	3,00	2,84	3,28
17	Kota Bukittinggi	6,75	6,32	6,00	6,01	6,98
18	Kota Payakumbuh	7,72	7,69	7,68	7,74	8,66
19	Kota Pariaman	4,49	4,40	4,20	3,66	3,99
	Sumatera Barat	364,51	357,13	348,22	344,23	370,67
	Nasional	13,96	13,47	13,10	9,22	10,19

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Dimensi lain yang perlu juga mendapatkan perhatian selain jumlah dan persentase penduduk miskin adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan bukan hanya ditujukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin namun juga mengurangi keparahan dan kedalaman kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) memberikan gambaran seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin relatif terhadap Garis Kemiskinan. Penurunan pada P1 mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan.

Pada periode Maret 2021 - September 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2021 adalah 1,043 turun 0,081 poin menjadi 0,962 pada September 2021. Indeks Keparahannya Kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,016 dari 0,241 pada Maret 2021 menjadi 0,225 pada September 2021.

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Pada September 2021, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk daerah perkotaan sebesar 0,742 sementara di daerah perdesaan lebih tinggi, yaitu mencapai 1,177, nilai ini menunjukkan bahwa penduduk miskin di perdesaan memiliki rata-rata (gap) pengeluaran dengan garis kemiskinan yang lebih besar dibandingkan penduduk miskin perkotaan. Kondisi penduduk miskin di perkotaan sedikit lebih baik, dilihat dari nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yang lebih kecil dibanding penduduk perdesaan. Artinya, diperlukan usaha yang lebih besar untuk mengentaskan penduduk perdesaan dari kemiskinan dari pada diperkotaan. Secara umum, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan dari Maret 2021 ke September 2021.

Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengindikasikan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin. Di perdesaan, nilai indeks ini masih lebih tinggi di banding di perkotaan. Pada September 2021, nilai Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) perdesaan sebesar 0,308 dibandingkan perkotaan 0,141 di periode yang sama. Terjadi kenaikan indeks keparahan kemiskinan diperdesaan sebesar 0,026 poin yakni dari 0,282 pada Maret 2021 menjadi 0,308 pada September 2021.

Tabel 2.9
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

TAHUN	KOTA	DESA	KOTA+DESA
P1			
Maret 2016	0,752	1,334	1,096
September 2016	1,038	1,180	1,122
Maret 2017	0,752	1,175	1,000
September 2017	0,599	1,275	0,990
Maret 2018	0,663	1,329	1,035
September 2018	0,884	1,025	0,959
Maret 2019	0,771	1,093	0,942
September 2019	0,538	0,993	0,779
Maret 2020	0,742	1,068	0,915
September 2020	0,803	1,171	0,992
Maret 2021	0,866	1,214	1.043
September 2021	0,742	1,177	0,962
P2			
Maret 2016	0,153	0,304	0,242
September 2016	0,249	0,299	0,278
Maret 2017	0,157	0,278	0,228
September 2017	0,107	0,324	0,233
Maret 2018	0,142	0,320	0,242
September 2018	0,212	0,214	0,213
Maret 2019	0,196	0,225	0,211
September 2019	0,096	0,191	0,147
Maret 2020	0,164	0,223	0,201
September 2020	0,242	0,278	0,261
Maret 2021	0,199	0,282	0,241
September 2021	0,141	0,308	0,225

Sumber Data: Berita Release BPS

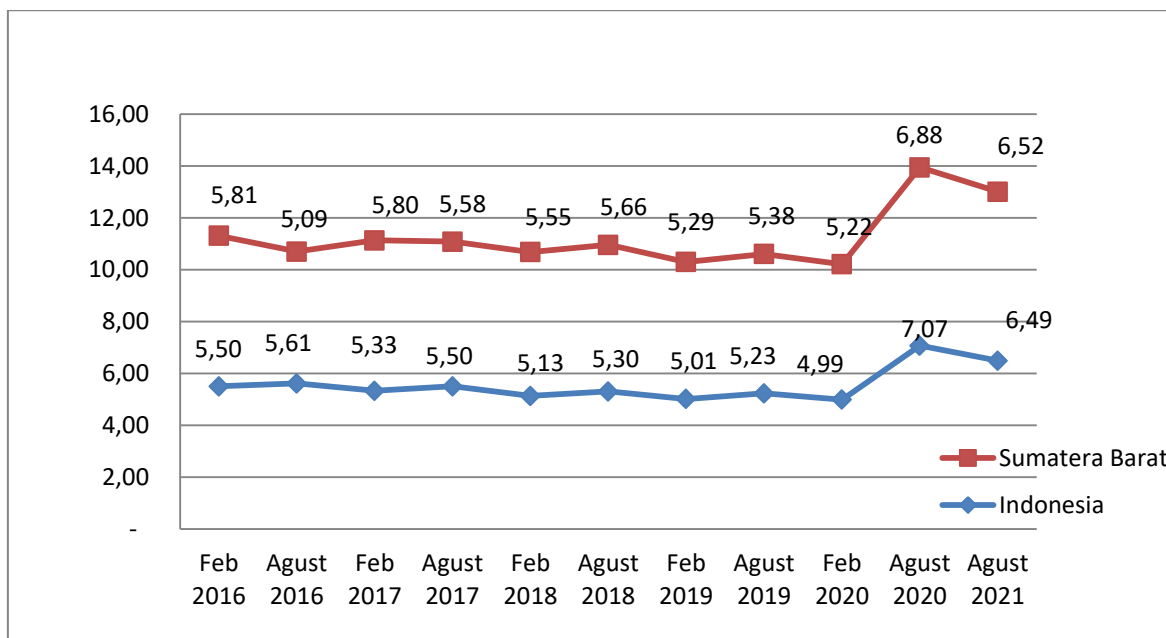
2.1.3 Angka Pengangguran

Angka pengangguran merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan kemandirian di Provinsi Sumatera Barat. Pengangguran yang terjadi disebabkan oleh angkatan kerja yang pada umumnya tenaga kerja non formal, kurang terdidik dan minat generasi muda bekerja di bidang pertanian yang menjadi sektor ekonomi dominan masih rendah, oleh karena itu dibutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Gambar 3.3 memperlihatkan bahwa selama periode 2016- 2021 TPT Provinsi Sumatera Barat berfluktuasi dan nilainya selalu berada diatas angka nasional kecuali pada Agustus 2016 dan Agustus 2020. TPT Provinsi Sumatera Barat Agustus 2016 sebesar 5,09 persen dan Agustus 2020 sebesar 6,88, sedangkan TPT Indonesia 5,61 persen (Agustus 2016) dan 7,07 persen (Agustus 2020). Jika dibandingkan dengan Februari 2016, TPT Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan dari 5,81 persen pada Februari 2016 menjadi 6,67 persen pada Februari 2021 atau

naik 0,86 poin. Berbeda dengan tren sebelumnya yang cenderung menurun, nilai TPT pada Februari 2021 (6,67 persen) mengalami peningkatan sebesar 1,42 poin dibandingkan Februari 2020 (5,25 persen).

Grafik 2.6
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2021



Sumber Data: Berita Release BPS

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT Sumatera Barat hasil Sakernas Agustus 2021 sebesar 6,52 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar tujuh orang penganggur. Pada Agustus 2021, TPT mengalami penurunan sebesar 0,36 persen poin dibandingkan Agustus 2020, mengalami penurunan sebesar 0,15 persen poin dibandingkan dengan Februari 2021.

Sementara itu, jika dilihat perkembangan tingkat pengangguran per kabupaten/kota, selama tahun 2016-2020 Kota Padang masih menduduki posisi tertinggi tingkat pengangguran terbukanya, walaupun trennya dari tahun ke tahun menurun, kecuali di tahun 2020 terjadi peningkatan akibat pandemic COVID-19. Sebaliknya untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki TPT paling rendah pada tahun 2017 namun berangsur naik dari tahun ke tahun. TPT Kab. Kepulauan Mentawai mengalami kenaikan 2,02 poin dari tahun 2017 yaitu 1,96 persen menjadi 3,98 persen tahun 2020. Pada Tahun 2020, terdapat 7 kabupaten/kota yang TPT-nya berada diatas TPT Provinsi Sumatera Barat yaitu Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kab. Padang Pariaman, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang dan Kab. Pesisir Selatan.

Tabel 2.10
TPT menurut Kab/Kota se Sumatera Barat Tahun 2017-2021

NO	KAB/KOTA PROVINSI/NASIONAL	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kab. Kep. Mentawai	1,96	2,31	2,92	3,98	2,79
2	Kab. Pesisir Selatan	5,95	6,03	6,02	7,00	5,97
3	Kab. Solok	6,05	6,12	4,72	4,65	4,67
4	Kab. Sijunjung	3,32	3,22	3,64	5,30	3,57
5	Kab. Tanah Datar	3,72	4,01	3,20	4,79	4,63
6	Kab. Padang Pariaman	6,65	7,03	6,08	8,13	8,41
7	Kab. Agam	4,23	4,93	4,78	4,61	5,06
8	Kab. Lima Puluh Kota	2,60	2,73	2,30	3,03	2,25
9	Kab. Pasaman	6,81	6,04	5,28	5,04	4,92
10	Kab. Solok Selatan	5,54	5,84	4,91	5,62	4,84
11	Kab. Dharmasraya	3,69	4,02	5,06	5,31	5,00
12	Kab. Pasaman Barat	3,99	3,36	4,74	4,69	5,02
13	Kota Padang	9,44	9,29	8,74	13,64	13,37
14	Kota Solok	5,88	6,03	7,06	8,35	5,15
15	Kota Sawahlunto	6,19	5,92	6,84	8,20	6,38
16	Kota Padang Panjang	5,43	5,35	4,38	7,22	4,90
17	Kota Bukittinggi	6,94	7,24	6,20	7,51	6,09
18	Kota Payakumbuh	3,45	3,95	4,13	6,68	6,47
19	Kota Pariaman	5,97	5,82	5,48	5,73	6,09
	Sumatera Barat	5,58	5,66	5,38	6,88	6,52

Catatan : Angka TPT 2016 untuk Kab/Kota tidak ada

Angka TPT 2018-2021 menggunakan penimbang hasil proyeksi SUPAS 2015

Sumber : Indikator Strategis Provinsi Sumatera Barat 2020 dan BRS Ketenagakerjaan Agustus 2021, BPS.

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

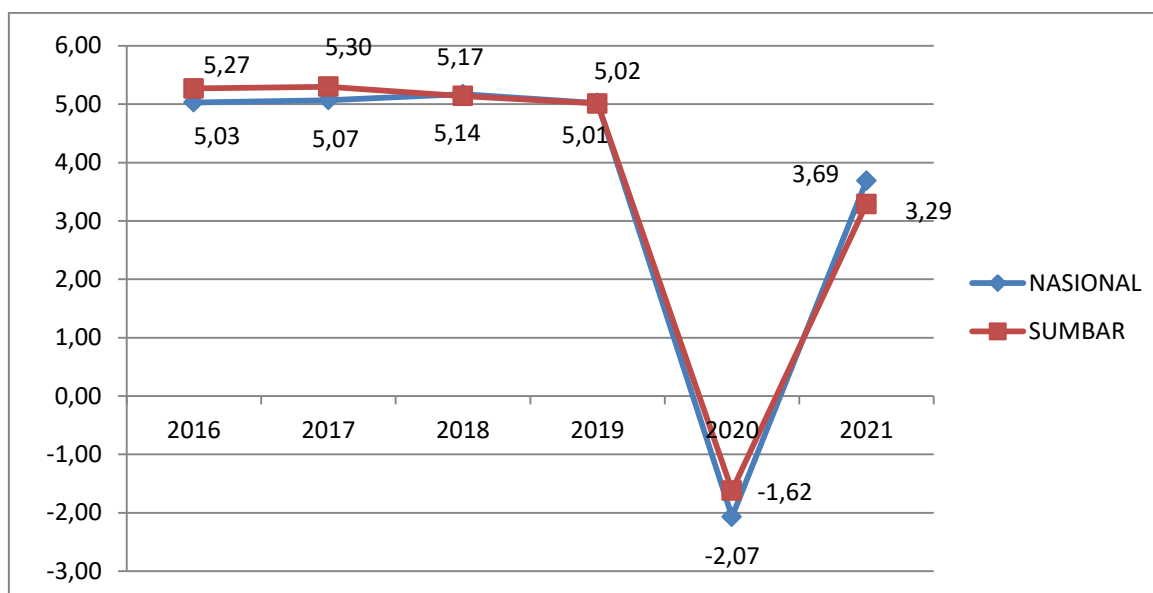
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah diukur berdasarkan pertambahan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) antara 2 (dua) tahun.

Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat cenderung mengalami perlambatan dimana ekonomi yang sempat tumbuh 5,27% pada tahun 2016 justru terus menurun hingga hanya mencapai angka 5,05% pada tahun 2019. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 bahkan lebih memperparah kondisi perekonomian daerah yang berkontraksi sekitar -1,6%. Walaupun kondisi ini terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia dan bahkan dunia, kontraksi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2020 masih lebih baik dari nasional pada angka -2,07%.

Seiring dengan diterapkannya beberapa kebijakan dalam rangka pemulihan ekonomi di Indonesia khususnya pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat, maka pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan. Berdasarkan data BPS, tercatat pertumbuhan

ekonomi Sumatera Barat tahun 2021 mencapai 3,29% dibawah pertumbuhan ekonomi Nasional yang mencapai 3,69%.

Grafik 2.7
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2016-2021



Sumber Data: Berita Release BPS

Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat tahun 2021 terjadi pada hampir semua lapangan usaha kecuali Pertambangan dan Penggalian serta Jasa perusahaan yang mengalami kontraksi sebesar 1,77 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Jasa Keuangan sebesar 8,46 persen. Diikuti Informasi dan Komunikasi sebesar 6,42 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 5,88 persen, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 5,53 persen; seperti pada tabel 2.11 berikut :

Tabel 2.11
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2016-2021 (Persen)

LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	2,01	3,43	3,52	2,48	1,16	2,19
2. Pertambangan dan Penggalian	2,00	1,13	5,79	6,22	-1,31	-1,77
3. Industri Pengolahan	4,90	2,27	-0,58	-1,98	-0,54	3,68
4. Pengadaan Listrik & Gas	10,94	4,06	4,09	4,20	-6,81	3,15
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	6,40	3,96	2,24	6,10	-1,04	5,53
6. Konstruksi	6,59	7,23	7,00	8,47	-2,92	2,18
7. Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,41	6,50	7,03	7,29	-1,14	5,12
8. Transportasi dan Pergudangan	7,67	7,17	6,43	4,75	-16,10	2,56
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,62	8,76	8,23	8,11	-15,95	5,63
10. Informasi dan Komunikasi	9,40	8,74	8,52	8,73	9,55	6,42

LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	8,03	2,11	0,99	2,29	1,34	8,46
12. Real Estate	5,37	4,49	4,67	6,78	0,22	2,41
13. Jasa Perusahaan	4,94	5,19	5,45	6,20	-3,98	1,13
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,96	4,49	5,97	6,96	-0,59	0,85
15. Jasa Pendidikan	7,85	9,94	7,19	7,94	5,03	1,84
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,47	8,58	7,28	7,54	8,83	5,88
17. Jasa Lainnya	9,35	7,95	7,86	7,50	-10,10	7,10
PDRB SUMATERA BARAT	5,27	5,30	5,14	5,01	-1,62	3,29

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat Tahun 2016-2021

Bila dibandingkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dengan provinsi se Sumatera dan Nasional pada tahun 2021, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sedikit mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dan berada di posisi ke enam setelah Kepulauan Bangka Belitung (5,05%), Jambi (3,66%), Sumatera Selatan (3,58%), Kep. Riau (3,43%), Riau (3,36%) dan namun masih berada dibawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 3,69%, seperti terlihat pada Tabel 2.12

Tabel 2.12
Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi se Sumatera Tahun 2016-2021 (%)

PROVINSI/NASIONAL	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Aceh	3,29	4,18	4,61	4,14	-0,37	2,79
2. Sumatera Utara	5,18	5,12	5,18	5,22	-1,07	2,61
3. Sumatera Barat	5,27	5,30	5,14	5,01	-1,62	3,29
4. Riau	2,18	2,66	2,35	2,81	-1,13	3,36
5. Jambi	4,37	4,60	4,69	4,35	-0,44	3,66
6. Sumatera Selatan	5,04	5,51	6,01	5,69	-0,11	3,58
7. Bengkulu	5,28	4,98	4,97	4,94	-0,02	3,24
8. Lampung	5,14	5,16	5,23	5,26	-1,67	2,79
9. Kep.Bangka Belitung	4,10	4,47	4,45	3,32	-2,30	5,05
10. Kep.Riau	4,98	1,98	4,47	4,83	-3,80	3,43
Nasional	5,03	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,69

Sumber Data : BPS Sumatera Barat dan BPS Nasional Tahun 2016-2021

Sementara untuk PDRB per kapita atas dasar harga berlaku secara regional dari sepuluh provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Barat berada pada posisi ke tujuh di atas Lampung, Bengkulu dan Aceh. Provinsi yang memiliki sumber minyak, gas, mineral dan pertambangan memiliki PDRB yang tinggi yang secara langsung berpengaruh terhadap PDRB per kapita seperti Kepulauan Riau, Provinsi Riau, Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi, yang terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.13
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi se Sumatera
Tahun 2016-2021 (Rp. Juta)

PROVINSI/NASIONAL	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Aceh	26,85	28,09	29,52	30,87	31,63	34,68
2. Sumatera Utara	44,39	48,00	51,42	54,62	54,97	57,56
3. Sumatera Barat	37,28	40,19	42,80	44,88	43,84	45,29
4. Riau	104,86	105,84	110,38	111,22	114,33	129,85
5. Jambi	49,49	53,99	58,22	60,82	58,28	65,19
6. Sumatera Selatan	43,36	46,31	50,10	53,35	54,08	57,48
7. Bengkulu	29,07	31,35	33,82	36,56	36,55	39,14
8. Lampung	34,05	36,99	39,71	42,17	39,34	40,95
9. Kep. Bangka Belitung	46,40	48,82	50,08	52,23	52,00	58,33
10. Kep. Riau	106,50	109,33	116,46	119,39	123,52	130,12

Struktur PDRB Sumatera Barat menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2021 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Sumatera Barat masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebesar 21,71 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,77 persen; Konstruksi sebesar 10,45 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,30 persen; dan Industri Pengolahan 8,81 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sumatera Barat mencapai 66,77 persen.

Tabel 2.14
Struktur Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (%)

LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	24,06	23,61	23,17	22,15	22,36	21,71
2. Pertambangan dan Penggalian	4,53	4,27	4,27	4,30	4,27	4,20
3. Industri Pengolahan	10,09	9,74	9,10	8,38	8,64	8,81
4. Pengadaan Listrik & Gas	0,10	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10
5. Pengadaan Air	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
6. Konstruksi	9,38	9,29	9,63	10,09	10,18	10,20
7. Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,61	14,76	15,30	15,78	15,77	15,77
8. Transportasi dan Pergudangan	12,23	12,46	12,65	12,60	10,44	10,30
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,22	1,29	1,37	1,43	1,24	1,27
10. Informasi dan Komunikasi	4,85	4,99	5,46	5,81	6,43	6,62
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,10	3,17	3,01	2,91	3,04	3,28
12. Real Estate	2,00	2,01	1,96	2,01	2,06	2,05
13. Jasa Perusahaan	0,43	0,43	0,44	0,44	0,44	0,43
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,70	5,82	5,92	6,13	6,72	6,90
15. Jasa Pendidikan	3,67	3,84	4,20	4,35	4,71	4,64
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,26	1,28	1,39	1,42	1,62	1,69
17. Jasa Lainnya	1,68	1,77	1,93	2,00	1,88	1,95
PDRB SUMATERA BARAT	100	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat Tahun 2021

Dari sisi pengeluaran, stimulus fiskal pemerintah baik berupa konsumsi maupun investasi pemerintah menjadi penopang bagi pertumbuhan ekonomi. Dibandingkan tahun 2020 komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami kenaikan yaitu 1,97% dan 0,15% pada tahun 2021, begitu pula halnya dengan pengeluaran konsumsi lembaga non profit juga mengalami kenaikan menjadi -1,79% pada tahun 2021.

Dilihat dari pola distribusi penggunaan tahun 2021, pengeluaran konsumsi rumah tangga masih merupakan penyumbang terbesar dalam PDRB Provinsi Sumatera Barat sebesar 53,88%, mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2020 yaitu sebesar 54,09%.

Penyumbang kedua adalah pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 30,30% dan Pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 11,53%. Laju pertumbuhan dan distribusi ekonomi menurut pengeluaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.15

Tabel 2.15
Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi
Menurut Pengeluaran di Sumatera Barat, Tahun 2018-2021

KOMPONEN PENGGUNAAN	PERTUMBUHAN EKONOMI				DISTRIBUSI			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,62	4,74	-2,47	1,97	53,23	54,41	54,09	53,88
Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit	6,54	11,85	-4,39	1,79	1,06	1,14	1,12	1,11
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,40	5,00	-8,64	0,15	12,59	12,58	11,84	11,53
Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,52	5,16	-2,70	1,80	29,82	30,11	30,00	30,30
Perubahan Inventori	-	-	-	-	0,11	0,04	0,15	0,15
Net Ekspor Antar Daerah	-	-	-	-	3,19	-4,36	-4,73	-11,04
PDRB SUMATERA BARAT	5,16	5,01	-1,62	3,29	100	100	100	100

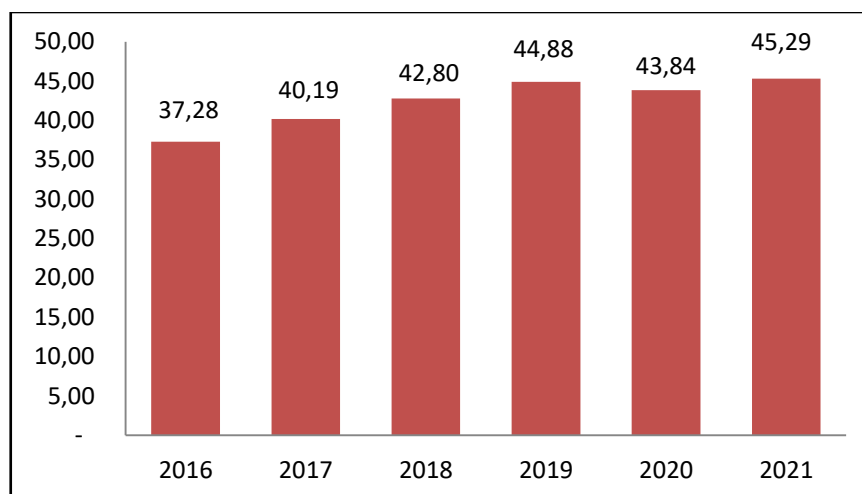
Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat Tahun 2021

2.1.5 PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Berdasarkan grafik 2.4, Nilai PDRB per kapita Provinsi Sumatera Barat atas dasar harga berlaku sejak tahun 2016 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan, namun pada 2020 menurun akibat perekonomian yang tidak stabil dimasa pandemi covid-19. Pada tahun 2016 PDRB per kapita tercatat sebesar 37,28 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 44,88 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan inflasi yang cenderung naik. Sementara pada tahun 2020 terjadi penurunan 1,04 juta rupiah menjadi 43,84 juta rupiah karena inflasi yang cenderung turun dibandingkan 2019. Hal ini menunjukkan menurunnya daya beli sebagian besar masyarakat yang perekonomiannya terdampak akibat pandemi covid-19. Namun pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 45,29 juta rupiah.

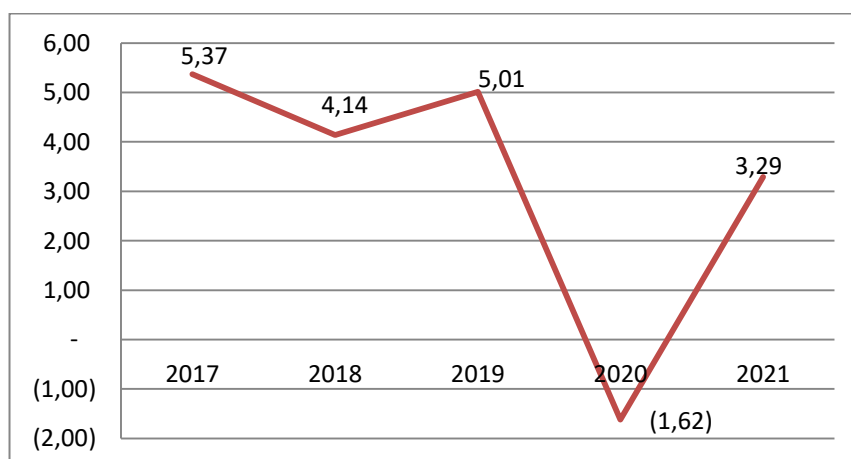
Grafik 2.8
PDRB Perkapita Provinsi Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2021
(Juta Rupiah)



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020

Laju pertumbuhan PDRB per kapita dapat dilihat dari angka PDRB per kapita berdasarkan harga konstan 2010. Dari grafik 2.5 dapat terlihat selama periode 2017-2020, PDRB perkapita atas dasar harga konstan 2010 senantiasa mengalami peningkatan meskipun cenderung melambat, namun pada tahun 2020 mengalami kontraksi karena pandemi. Namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan lagi.

Grafik 2.9
Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita Provinsi Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2017-2021 (persen)

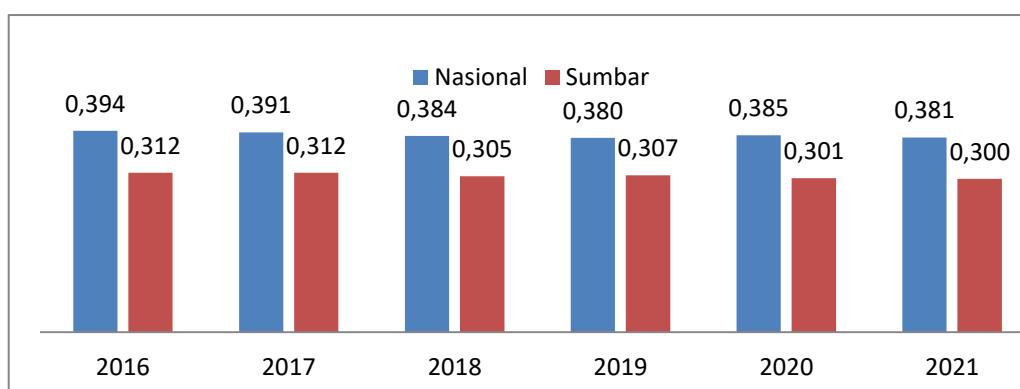


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

2.1.6 Ketimpangan Pendapatan

Indikator yang menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan adalah Indeks Gini Ratio atau Koefisien Gini. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Indeks Gini Ratio di Sumatera Barat selama lima tahun terakhir menunjukkan distribusi pendapatan yang relatif merata, seperti terlihat pada Grafik 2.10.

Grafik 2.10
Gini Ratio Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

Dalam mengukur tingkat ketimpangan di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Hal ini dilakukan mengingat data pendapatan sulit diperoleh.

Tingkat ketimpangan pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu diperhatikan karena pada dasarnya tingkat ketimpangan pendapatan merupakan ukuran kemiskinan relatif. Ukuran yang paling sering digunakan dalam mengukur tingkat ketimpangan pendapatan adalah Gini Ratio serta persentase pendapatan pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau dikenal juga dengan ukuran Bank Dunia.

Pada September 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sumatera Barat yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,300. Angka ini turun sebesar 0,006 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2021 yang sebesar 0,306. Sementara jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2020 (0,301), tercatat penurunan sebesar 0,001 poin.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan selalu lebih besar daripada daerah perdesaan. Hal ini menunjukkan tingkat ketimpangan di area perkotaan lebih tinggi dibandingkan area perdesaan. Pada September 2021 Gini Ratio perkotaan adalah 0,327 turun 0,002 poin dibandingkan periode Maret 2021 (0,329) namun naik 0,007 poin dibandingkan periode yang sama setahun sebelumnya September 2020 (0,320). Pada wilayah perdesaan nilai Gini Ratio September 2021 menunjukkan angka 0,252 turun 0,002 poin dibanding Maret 2021 (0,254) dan turun sebesar 0,004 poin, dari September 2020 yang tercatat sebesar 0,256.

BAB III

KINERJA BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021

Bab ini menyajikan Gambaran Umum Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang mencakup dasar pembentukan organisasi, struktur organisasi beserta fungsinya, ketersediaan Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana yang mendukung kinerja Bappeda, Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan serta Capaian Kinerja Tahun 2021.

3.1 Gambaran Organisasi

3.1.1 Dasar Pembentukan Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang perencanaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Bappeda Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 90 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah dijelaskan bahwa Bappeda Provinsi Sumatera Barat terdiri atas susunan organisasi sebagai berikut :

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, susunan organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program; dan
 3. Sub bagian Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi :
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 2. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bidang Data dan Informasi.
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi :
 1. Sub Bidang Pemerintahan;
 2. Sub Bidang Pembangunan Manusia; dan
 3. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- e. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahi :
 1. Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Investasi;
 2. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan; dan
 3. Sub Bidang Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi :
 1. Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 2. Sub Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan; dan
 3. Sub Bidang Infrastruktur Keciptakarya dan Kewilayahan

g. Kelompok Jabatan Fungsional

3.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Bappeda Provinsi Sumatera Barat dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 dijabarkan ke dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, tugas pokok Bappeda adalah Membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan yang menjadi kewenangan daerah, sedangkan fungsi Bappeda adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan yang menjadi kewenangan daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perencanaan menjadi kewenangan daerah;
- d. Pembinaan teknis Penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan yang menjadi kewenangan daerah;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang serta kelompok jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

a. Sekretariat

Menyelenggarakan Tugas :

1. Mengkoordinasikan kegiatan di internal Bappeda.
2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Bappeda.
3. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana, program dan anggaran di internal Bappeda.
4. Mengkoordinasikan sistem pengendalian internal Bappeda.
5. Menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah internal Bappeda.
6. Pembinaan dan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi internal Bappeda.
7. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana.
8. Melakukan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang dan jasa di internal Bappeda.

9. Mengkoordinasikan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian kinerja capaian program dan kegiatan internal Bappeda.
10. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Menyelenggarakan Fungsi :

1. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan di internal Bappeda.
2. Penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Bappeda.
3. Penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran di internal Bappeda.
4. Penyelenggaraan koordinasi sistem pengendalian internal Bappeda.
5. Penyelenggaraan penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah internal Bappeda.
6. Penyelenggaraan pembinaan dan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi internal Bappeda.
7. Penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana.
8. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang dan jasa di internal Bappeda.
9. Penyelenggaraan koordinasi pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian kinerja capaian program dan kegiatan internal Bappeda.
10. Penyelenggaraan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

b. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Menyelenggarakan Tugas :

1. Melakukan analisa perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah.
2. Melakukan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah.
3. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lintas Bidang.
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat.
5. Melakukan pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
6. Merumuskan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah.
7. Mengkoordinasikan dan mengsinkronkan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah.
8. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah.
9. Melakukan pengendalian melalui pemantauan dan supervisi terhadap rencana pembangunan daerah.

10. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data dan informasi perencanaan pembangunan.
11. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah.
12. Melakukan penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Menyelenggarakan Fungsi :

1. Penyelenggaraan analisa perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah.
2. Penyelenggaraan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah.
3. Penyelenggaraan koordinasi dan integrasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lintas Bidang.
4. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat.
5. Penyelenggaraan pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
6. Penyelenggaraan perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah.
7. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah.
8. Penyelenggaraan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah.
9. Penyelenggaraan pengendalian melalui pemantauan dan supervisi terhadap rencana pembangunan daerah.
10. Penyelenggaraan identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data dan informasi perencanaan pembangunan.
11. Penyelenggaraan penyajian dan mengamankan data informasi pembangunan daerah.
12. Penyelenggaraan penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.
13. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Menyelenggarakan Tugas :

1. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
2. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
3. Mempersiapkan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
4. Melakukan pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

5. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
6. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
8. Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
10. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
11. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kab/Kota di Sumatera Barat lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Menyelenggarakan Fungsi :

1. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
2. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
3. Penyelenggaraan persiapan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
4. Penyelenggaraan pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
5. Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
6. Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
7. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
8. Penyelenggaraan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

9. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
10. Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
11. Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kab/Kota di Sumatera Barat lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
12. Penyelenggaraan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
13. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

d. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Menyelenggarakan Tugas :

1. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
2. Mengkoordinasikan bahan analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi), melalui pendekatan holistik integratif.
3. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
4. Mempersiapkan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
5. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
6. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
8. Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
10. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
11. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kab/Kota di Sumatera Barat lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Menyelenggarakan Fungsi :

1. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

2. Penyelenggaraan koordinasi bahan analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi), melalui pendekatan holistik integrative.
3. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
4. Penyelenggaraan persiapan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
5. Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
6. Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
7. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
8. Penyelenggaraan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
9. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
10. Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
11. Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kab/Kota di Sumatera Barat lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
12. Penyelenggaraan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
13. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Menyelenggarakan Fungsi :

- 1) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 2) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 3) Penyelenggaraan persiapan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 4) Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 5) Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 6) Penyelenggaraan analisa dan mensinergikan perencanaan kewilayahan dengan mempedomani RTRW.

- 7) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 8) Penyelenggaraan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- 9) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 10) Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 11) Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kab/Kota di Sumatera Barat lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 12) Penyelenggaraan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 13) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Menyelenggarakan Tugas:

1. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
2. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
3. Mempersiapkan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
4. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
5. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
6. Melakukan analisa dan mensinergikan perencanaan kewilayahan dengan mempedomani RTRW.
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
8. Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
10. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
11. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kab/Kota di Sumatera Barat lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Selain susunan Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat terdiri dari Sekretariat dan Bidang-Bidang, di Bappeda juga terdapat Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional, dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior dan jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Perencana sesuai jenjang jabatan, ditetapkan dalam butir sebagai berikut :

a. Perencana Ahli Pertama, meliputi:

- 1) mengidentifikasi permasalahan;
- 2) merumuskan permasalahan;
- 3) inventarisasi dan identifikasi data sekunder;
- 4) inventarisasi dan identifikasi data primer;
- 5) mengolah data dan informasi;
- 6) mengefektifkan pelaksanaan pengumpulan data;
- 7) menganalisis data dan informasi;
- 8) menyajikan data dan informasi;
- 9) melakukan persiapan pengendalian pelaksanaan rencana;
- 10) melakukan persiapan evaluasi rencana pembangunan tahunan; dan
- 11) mengolah data dan informasi dalam rangka evaluasi rencana pembangunan tahunan.

b. Perencana Ahli Muda, meliputi:

- 1) memformulasikan sajian untuk analisis;
- 2) melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan pembangunan;
- 3) menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan;
- 4) menyusun alternatif dan model hubungan kausal/fungsional;
- 5) menguji alternatif kriteria dan model;
- 6) menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek;
- 7) menyusun perencanaan program dan kegiatan lintas sektoral;
- 8) menyusun perencanaan program dan kegiatan regional;
- 9) menyusun perencanaan program dan kegiatan sektoral;
- 10) menyusun rancangan rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan;
- 11) melakukan telaahan lingkup sektoral/regional terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran dengan mitra legislatif; dan
- 12) mengendalikan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

c. Perencana Ahli Madya, meliputi:

- 1) menyusun rekomendasi kebijakan strategis;
- 2) menyusun perencanaan kebijakan/program strategis jangka menengah;
- 3) merumuskan kebijakan/program strategis sektoral;
- 4) mendisain program lintas sektoral;

- 5) menyusun rencana pelaksanaan; Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP);
- 6) menyusun rencana pembangunan sektoral;
- 7) menyusun rencana pembangunan lintas sektor;
- 8) melakukan telaahan lingkup sektoral/regional dalam berbagai forum musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi publik lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan;
- 9) melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan rencana dan program; dan
- 10) menyusun disain instrumen dan arahan pelaksanaan evaluasi rencana pembangunan jangka menengah/sektoral;

d. Perencana Ahli Utama, meliputi:

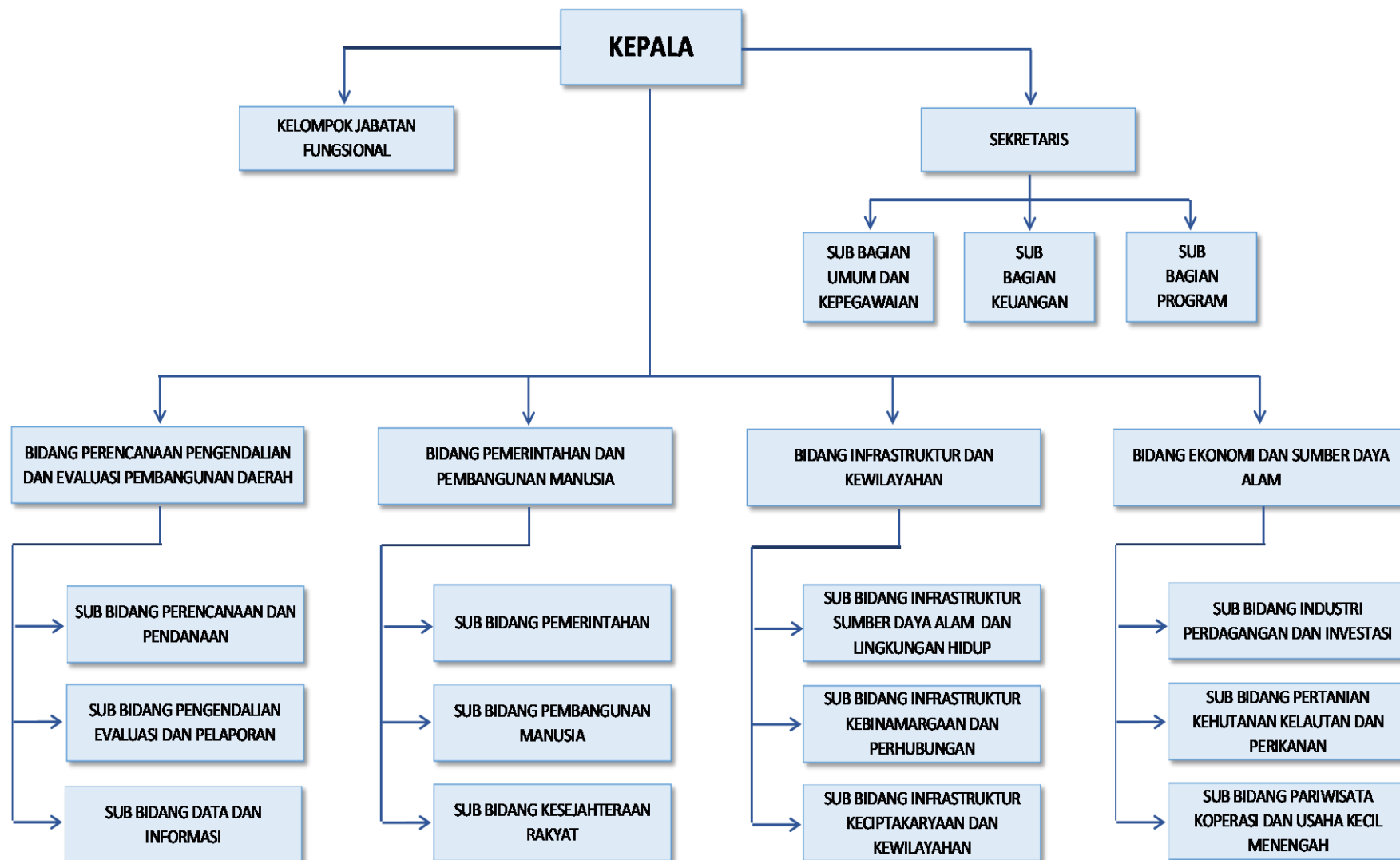
- 1) menyusun disain dan persiapan evaluasi kebijakan dalam rangka menyiapkan bahan perencanaan pembangunan;
- 2) menyusun perencanaan kebijakan strategis/ program jangka panjang;
- 3) menyusun perencanaan kebijakan/program strategis makro;
- 4) mendisain program kawasan;
- 5) menyusun rencana pembangunan regional;
- 6) melakukan telaahan lingkup makro/lintas sektoral/kawasan dalam berbagai forum musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi publik lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan;
- 7) melakukan telaahan lingkup makro/lintas sektoral/kawasan terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran dengan;
- 8) menilai hasil pengendalian dan pemantauan pelaksanaan rencana dan program strategis; dan
- 9) melaksanakan evaluasi rencana pembangunan jangka panjang/lintas sektor/kawasan.

3.1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki susunan organisasi dengan komposisi jabatan struktural yang terdiri atas :

- 1) Jabatan Kepala Badan, Eselon II a
- 2) 1 Jabatan Sekretaris dan 4 Jabatan Kepala Bidang, Eselon III a
- 3) 4 Jabatan Fungsional Perencana
- 4) 15 Jabatan Kepala Sub Bagian/Sub Bidang, Eselon IV a

Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat tersebut dapat dilihat pada bagan dibawah ini :



3.1.4 Dukungan Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya guna menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, sinergis dan kredibel perlu didukung oleh sumber daya manusia yang handal. Pada tahun 2021, Bappeda Provinsi Sumatera Barat memiliki pegawai sebanyak 84 orang yang terdiri atas 21 orang struktural, 58 orang fungsional umum dan 5 orang Fungsional Tertentu, sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah Menurut Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Eselon II	1	-	1
2.	Eselon III	3	2	5
3.	Eselon IV	9	6	15
4.	Fungsional Tertentu	1	4	5
5.	Fungsional Umum	34	24	58
6.	PTT	1	-	1
	Jumlah	49	36	85

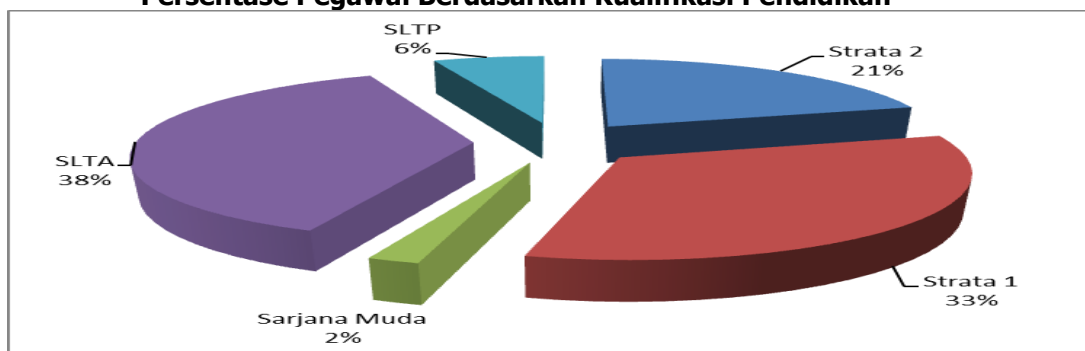
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa masih terdapat kesenjangan pemenuhan kebutuhan pegawai untuk jabatan fungsional tertentu dibandingkan fungsional umum, dimana jabatan Fungsional Umum berjumlah 58 orang dan Fungsional Tertentu berjumlah 5 orang. Sebagaimana diketahui, sebagian besar tugas dan fungsi Bappeda dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan mengharuskan sebagian besar dari pegawainya adalah berstatus Fungsional Tertentu yaitu Fungsional Perencana.

Komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Menurut Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Strata 2	10	14	24
2.	Strata 1	16	16	32
3.	Sarjana Muda	1	1	2
4.	SLTA	18	5	23
5.	SLTP	3	-	3
	Jumlah	48	36	84

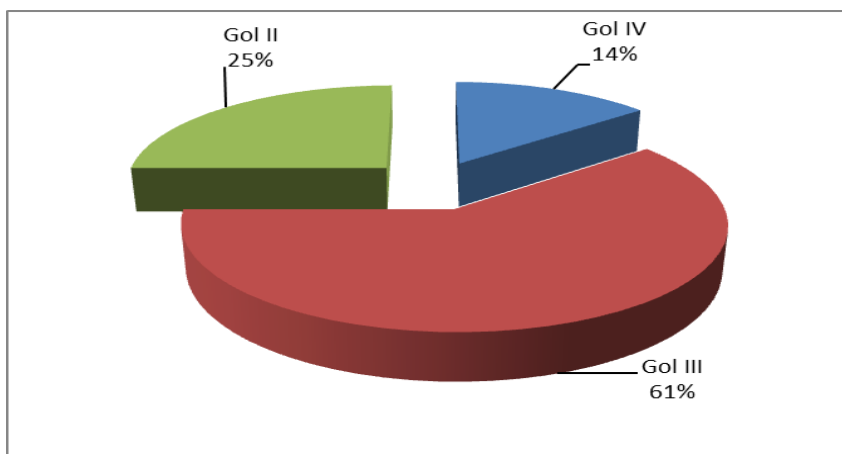
Grafik 3.1
Persentase Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan



Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat, pada tahun 2021 kekuatan pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan tingkat pendidikan sebesar 21% berpendidikan S2 atau sebanyak 24 orang, 33% berpendidikan S1 atau sebanyak 32 orang, 4% berpendidikan D3 atau sebanyak 2 orang, berpendidikan SLTA sebesar 38% atau sebanyak 23 orang, berpendidikan SLTP sebesar 3% atau sebanyak 3 orang.

Sementara itu, kekuatan pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan golongan secara berurutan persentasenya adalah Gol. IV sebesar 14% atau sebanyak 12 orang, Gol. III sebesar 61% atau sebanyak 51 orang dan Gol. II sebesar 25% atau sebanyak 21 orang. Ini menunjukkan bahwa pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Barat didominasi oleh pegawai Gol. III. Potret kekuatan pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.2
Persentase Pegawai Berdasarkan Golongan



3.1.5 Dukungan Sarana dan Prasarana

Secara umum, kebutuhan sarana dan prasarana di Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah tercukupi dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada. Berdasarkan Laporan Barang Milik Daerah pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun 2020, dapat digambarkan kondisi rekapitulasi buku inventaris aset sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3
Rekapitulasi Buku Inventaris Tahun 2021

Kelompok	Jenis	Objek	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang		Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku (Rp)
				Persil	Jumlah			
1.3			Aset Tetap			43.837.308.926	36.979.317.758	6.857.991.168
	1.3.1		Tanah			5.600.590.000	0	5.600.590.000
		1.3.2.01	Tanah	1	4.852	5.600.590.000	0	5.600.590.000
	1.3.2		Peralatan dan Mesin			16.979.624.121	15.905.327.023	1.074.297.098
		1.3.2.02	Alat Besar		12	302.874.500	285.343.250	17.531.250
		1.3.2.03	Alat Angkutan		129	3.324.993.556	2.876.536.056	448.457.500
		1.3.2.04	Alat Bengkel dan Alat Ukur		38	390.729.350	386.665.640	4.063.710

		1.3.2.05	Alat Pertanian		2	15.148.000	15.148.000	-
		1.3.2.06	Alat Kantor dan Rumah Tangga		1.011	5.265.224.152	5.040.297.322	224.926.830
		1.3.2.07	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar		127	620.295.680	582.037.097	38.258.583
		1.3.2.08	Alat Kedokteran dan Kesehatan		2	39.000.000	33.000.000	6.000.000
		1.3.2.09	Alat Laboratorium		1	1.950.000	1.950.000	-
		1.3.2.10	Komputer		472	7.019.408.883	6.684.349.658	335.059.225
	1.3.3		Gedung dan Bangunan			21.212.168.435	21.073.990.735	138.177.700
		1.3.3.01	Bangunan Gedung		3.500	21.212.168.435	21.073.990.735	138.177.700
	1.3.5		Aset Tetap Lainnya			44.926.370	0	44.926.370
		1.3.5.01	Bahan Perpustakaan		401	44.926.370	0	44.926.370
1.5			Aset Lainnya			1.749.083.432	1.748.323.432	760.000
	1.5.3		Aset Tidak Berwujud			1.749.083.432	1.748.323.432	760.000
		1.5.3.01	Aset Tidak Berwujud		21	1.749.083.432	1.748.323.432	760.000
Total Harga						45.586.392.358	38.727.641.190	6.858.751.168
Dibulatkan						45.586.392.358	38.727.641.190	6.858.751.168

Sumber : Laporan Barang Milik Daerah Tahun 2021

3.2 Tujuan dan Sasaran

3.2.1 Tujuan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat di bidang perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah dituangkan juga kedalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, maka tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 adalah :

1. Terwujudnya efektifitas perencanaan pembangunan daerah.
2. Terwujudnya pembinaan, Fasilitasi dan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergitas (KISS) dalam penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah
3. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi dalam perencanaan pembangunan daerah
4. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan tersebut didasarkan kepada isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang telah dirumuskan didalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, yaitu :

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapabilitas SDM perencana.
2. Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan.
3. Konsistensi dan sinergitas antar dokumen perencanaan, serta konsistensi perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah.
4. Optimalisasi hasil pengendalian dan evaluasi menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
5. Optimalisasi pemanfaatan data sebagai analisis untuk perencanaan pembangunan.

Dengan demikian rumusan tujuan Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang tertuang di dalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat yaitu : 1) Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan 2) Meningkatnya Kinerja Organisasi akan dapat tercapai. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas lebih lanjut akan dijabarkan kedalam bentuk perencanaan teknis/mikro oleh masing-masing bidang dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan selama tahun 2021.

3.2.2 Sasaran

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai pada tahun 2021 adalah :

1. Meningkatkan efektifitas perencanaan pembangunan daerah.
2. Meningkatnya pembinaan, fasilitasi dan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergitas dalam penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah.
3. Mengoptimalkan hasil pengendalian dan evaluasi menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
4. Penggunaan data sebagai analisis untuk perencanaan pembangunan.
5. Meningkatnya pengelolaan organisasi

Sasaran tersebut dirumuskan dalam rangka mewujudkan sasaran strategis Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang telah dituangkan dalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang selanjutnya ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja tahun 2021 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Penyalgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 1 Februari 2021 sebagaimana lampiran I dan telah dilakukan perubahan pada tanggal 16 November 2021 sehubungan adanya perubahan kegiatan dan realokasi anggaran akibat pandemi COVID-19. Adapun Perubahan Perjanjian Kinerja dimaksud terdapat pada tabel berikut

Tabel 3.4
Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan	Persentase Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan :	100%
		- Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra	
		- Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja	
		- Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD	
		- Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS	
2	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB

Sumber : Perubahan PK Tahun 2021

3.3 Program dan Kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021 didasarkan kepada upaya pencapaian sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Penyusunan program dan kegiatan ini tidak terlepas dari pencapaian visi misi Gubernur yang tertuang pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Pada Tahun 2021, Bappeda Provinsi Sumatera Barat merencanakan 3 program, 14 kegiatan dan 78 Sub Kegiatan dengan pagu sesuai dengan APBD Perubahan sebesar Rp. 23.158.801.521,-. Fokus Program, Kegiatan dan sub kegiatan serta alokasi anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Rencana Program dan Kegiatan pada APBD Tahun 2021

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Jumlah Anggaran
1	2	3	4
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	13.692.041.639
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	387.984.160
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah yang disusun	317.595.130
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	7.009.040

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Jumlah Anggaran
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	7.931.540
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	7.609.040
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	7.959.090
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	22.846.830
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan	17.036.490
II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	8.659.209.225
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	8.318.238.825
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	263.204.000
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	20.335.000
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	9.589.000
12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	10.280.000
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	37.562.400
III.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	144.150.176
14	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	1.837.044
15	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Asuransi Barang Milik Daerah	108.400.000
16	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah (Inventaris Barang Semesteran, Tahunan dan Audited)	14.357.132
17	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	19.556.000
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	83.720.032
18	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	65.250.000
19	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	12.566.032

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Jumlah Anggaran
20	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan dan diikuti	5.904.000
21	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	-
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Perangkat Daerah	2.194.214.397
22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	19.919.000
23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	777.030.504
24	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	37.718.300
25	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	305.132.020
26	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	17.622.353
27	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	10.501.920
28	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang dilayani	-
29	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	766.290.300
30	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Jumlah Tenaga IT yang dimanfaatkan. - Jumlah Aplikasi/Modul yang dikembangkan.	260.000.000
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	104.771.400
31	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	104.771.000
32	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya baru	-
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.606.274.999
33	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	7.500.000
34	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan. - Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan. - Jumlah tagihan lisensi zoom meeting yang dibayarkan - Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan - Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	704.855.0000
35	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	893.919.999
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	511.717.250
36	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	37.271.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Jumlah Anggaran
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
37	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	186.500.000
38	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.400.000
39	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	178.736.250
40	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperliha/direhab	34.810.000
B	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	2.549.446.189
IX	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	1.365.724.408
41	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	14.828.100
42	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	- Jumlah Dokumen Hasil Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya. - Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Pelaksanaan SDGs 2021-2026.	58.238.000
43	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Berita Acara Konsultasi publik yang dilaksanakan	88.544.000
44	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	-
45	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Dokumen Berita Acara Musrenbang Provinsi yang dilaksanakan	292.042.400
46	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun dan ditetapkan.	912.071.908
X	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	394.348.220
47	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	217.525.950

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Jumlah Anggaran
48	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	61.615.450
49	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota yang mendukung Indikator Pembangunan Provinsi	47.599.098
50	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disusun	67.607.722
XI	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	789.373.561
51	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	90.508.071
52	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Laporan hasil pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah	-
53	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	53.028.090
54	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi/evaluasi	645.837.400
C	Program Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD provinsi dengan Renstra SKPD Provinsi, RKPD Provinsi dengan Renja SKPD provinsi dan RPJMD provinsi dengan RKPD provinsi	6.917.313.693
XII	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.627.533.710
55	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	176.643.250
56	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pemerintahan	208.426.000
57	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	6.654.150

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Jumlah Anggaran
	Pemerintahan	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
58	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pemerintahan	46.619.250
59	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	312.591.110
60	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pembangunan Manusia	522.960.000
61	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	17.566.500
62	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pembangunan Manusia	336.073.450
XIII	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	985.864.535
63	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	185.483.000
64	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Perekonomian	210.339.550
65	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	10.636.550
66	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Perekonomian	85.163.900
67	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	246.671.485
68	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang SDA.	215.280.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Jumlah Anggaran
69	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	12.894.000
70	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang SDA	19.396.050
XIV	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	4.303.915.448
71	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	209.539.118
72	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Infrastruktur.	219.500.000
73	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	13.599.400
74	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan n Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Infrastruktur	3.552.003.630
75	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	194.541.200
76	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Kewilayahan	86.313.250
77	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.	8.505.800
78	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Kewilayahan	19.913.050

Disamping dukungan anggaran melalui APBD sebagaimana tergambar pada tabel diatas Bappeda Provinsi Sumatera Barat juga mendapatkan anggaran Dekonsentrasi BAPPENAS melalui Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-055.01.3.080019/2021 dengan pagu dana sebesar Rp. 958.891.000,- (sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan satu ribu rupiah) yang dikelola oleh Satuan Kerja

Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Namun seiring masih belum berakhirnya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terpuruknya perekonomian di Indonesia, pemerintah dengan seksama mengambil kebijakan untuk merasionalisasi APBN Tahun Anggaran 2021. Rasionalisasi ini didasari surat Menteri Keuangan Nomor S-584/MK.02/2021 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian PPN/Bappenas pada tanggal 08 Juli 2021 dan surat Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksanaan Kementerian PPN/Bappenas Nomor 08590/KU.01.03/B.04/T/07/2021 tanggal 15 Juli 2021 perihal Penyampaian Rencana Refocusing Anggaran Satker Dana Dekonsentrasi TA 2021. Pagu anggaran yang sebelumnya sebesar Rp. 958.891.000,- dirasionalisasikan menjadi Rp. 208.969.000,-. Beberapa kegiatan yang dirasionalisasikan untuk tidak dilaksanakan seperti Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Data Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Nasional berbagi Pakai dalam Rencana Aksi Satu Data Indonesia.

Tabel 3.6
Rencana Program dan Kegiatan Dekonsetrasi Tahun 2021

Kode	Program/Kegiatan/Output/Sub Output/Komponen/Sub Komponen/Akun/Detail	Anggaran Semula (Rp.)	Anggaran Setelah Revisi (Rp.)	Lebih / Kurang (Rp.)
01.06	Program Perencanaan Pembangunan Nasional	958.891.000,-	208.969.000,-	749.922.000,-
5246	Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang			
1	Penguatan Perencanaan Daerah dalam Koridor Prioritas Nasional	749.185.000,-	93.109.000,-	656.076.000,-
a	Penyelarasan indikator makro dan program (indikator dan target) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 serta RKP dengan RKPD	250.286.000,-	1.000.000,-	249.286.000,-
1)	Sosialisasi Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional di Provinsi Sumatera Barat dalam RPJMN 2020 - 2024	11.510.000,-	500.000,-	11.010.000,-
2)	Bimbingan Teknis dan Pendampingan Penyelarasan Isu Strategis, Indikator dan Target RKP 2022 dengan RKPD Tahun 2022	238.776.000,-	500.000,-	238.276.000,-
b	Sinkronisasi daftar data dan/atau Rencana Aksi Satu Data Indonesia	79.202.000,-	-	79.202.000,-
1)	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Data Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Berbagi Pakai Dalam Rencana Aksi Satu Data Indonesia	79.202.000,-	-	79.202.000,-
c	Pengisian Aplikasi KRISNA – SELARAS, Aplikasi KRISNA DAK, pembahasan	130.410.000,-	7.395.000,-	123.015.000,-

Kode	Program/Kegiatan/Output/Sub Output/Komponen/Sub Komponen/Akun/Detail	Anggaran Semula (Rp.)	Anggaran Setelah Revisi (Rp.)	Lebih / Kurang (Rp.)
	Kerangka Ekonomi Makro Regional, dan strategi pengembangan wilayah dalam rangka mendukung penyiapan bahan Rakorgub, Rakortek, dan Musrenbang			
1)	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Bahan dan Keikutsertaan Dalam Acara Rakorgub, Rakortek, Musrenbang dan Musrenbangnas	130.410.000,-	7.395.000,-	123.015.000,-
d	Penyusunan/Evaluasi RPJMD, Renstra dan Renja OPD Propinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung keselarasan dan pencapaian prioritas nasional	127.593.000,-	500.000,-	127.093.000,-
1)	Bimtek dan Pendampingan Penyusunan Renstra dan Renja OPD Provinsi dan Kab/Kota se Sumatera Barat dengan RPJMD dan memperhatikan Renstra Kementerian dan Lembaga dalam rangka mendukung keselarasan dan pencapaian prioritas nasional	127.593.000,-	500.000,-	127.093.000,-
e	Penyusunan/Evaluasi RKPd dalam rangka mendukung keselarasan dengan prioritas nasional mendukung penyiapan bahan Rakorgub, Rakortek, dan Musrenbang	161.694.000,-	84.214.000,-	774.480.000,-
1)	Evaluasi Keselarasan RKPd Kab/Kota dan RKPd Provinsi Dalam Mendukung Keselarasan Dengan Prioritas Nasional Tahun 2021	161.694.000,-	84.214.000,-	774.480.000,-
2	Fasilitasi Kesekretariatan Dekonsentrasi di Provinsi	209.706.000,-	115.860.000,-	93.846.000,-

Output Kegiatan Dana Dekonsentrasi Tahun 2021

No.	Kegiatan	Output
1	Sosialisasi Arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional di Provinsi Sumatera Barat dalam RPJMN 2020-2024 dan RKP 2022	Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024 dan RKP 2022 dipahami oleh Kepala Bappeda Provinsi dan Kab/Kota se Sumatera Barat sebagai acuan dalam menyusun 14 bh RPJMD Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2021-2025 pasca pilkada serentak dan menyusun RKPd Tahun 2022 untuk Provinsi dan 19 Kab/Kota di Sumatera Barat.
2	Bimbingan Teknis dan Pendampingan Penyelarasan Isu Strategis, Indikator dan Target RKP 2022 dengan RKPd Tahun 2022	Meningkatnya pemahaman SDM Perencanaan Provinsi dan Kab/Kota se Sumatera Barat dalam menyusun dokumen perencanaan daerah yang berkualitas secara tematik, holistic, integrasi dan spasial untuk

No.	Kegiatan	Output
		mencapai keselarasan dokren pusat dan daerah tahun 2022.
3	Rapat Persiapan Bahan dan Keikutsertaan Dalam Acara Rakorgub, Rakortek dan Musrenbangnas	Terlaksananya rapat koordinasi dan pembahasan internal dan lintas OPD dan Kab/kota dalam menyusun bahan perencanaan pembangunan dan keikutsertaan dalam tahapan dan mekanisme perencanaan pembangunan nasional, regional dan teknis daerah.
4	Evaluasi Keselarasan RKPd Kab/Kota dan RKPd Provinsi Dalam Mendukung Keselarasan Dengan Prioritas Nasional Tahun 2021	Evaluasi dokumen tahunan daerah yang selaras dengan prioritas nasional
5	Bimtek dan Pendampingan Penyusunan Renstra dan Renja OPD Provinsi dan Kab/Kota se Sumatera Barat dengan RPJMD dan memperhatikan Renstra Kementerian dan Lembaga dalam rangka mendukung keselarasan dan pencapaian prioritas nasional	Meningkatnya pemahaman SDM Perencanaan Bappeda Provinsi dan Kab/Kota se Sumatera Barat dalam menyusun dokumen perangkat daerah (Renstra dan Renja) yang sinkron dan harmonis antara Renstra dan Renja Bappenas, Bappeda Provinsi dan Kab/Kota
6	Facilitasi Kesekretariatan Dekonsentrasi di Provinsi untuk Operasionalisasi Sekretariat Pengelola Dekonsentrasi di Provinsi	Dukungan pelaksanaan kegiatan pada Satker Bappeda Provinsi Sumatera Barat

3.4 Pencapaian Target Kinerja Sasaran Strategis

Pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat meliputi 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran sebagai alat ukurnya dengan hasil capaian sebagaimana bisa dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.7
Capaian Strategis Terhadap Indikator Kinerja
Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan	Persentase Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan :	%	100	100	100
		- Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra				
		- Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja				
		- Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPd				
		- Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPd dengan KUA PPAS				
2	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai	BB (72,59)	BB (74,90)	100

Dari tabel di atas dapat dilihat pencapaian dari indikator Sasaran Strategis 1 (Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan) adalah dengan predikat **amat baik** (100%), dan sasaran strategis 2 (Meningkatkan tata kelola organisasi) dengan predikat **amat baik** (100%). Dengan demikian pencapaian indikator sasaran strategis Bappeda pada tahun 2021 secara rata-rata adalah **amat baik** (100%). Berikut uraian dari capaian target kinerja per sasaran strategis pada tahun 2021 :

1. Sasaran Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan, dengan indikator kinerja Persentase Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan dengan target 100% yang diukur melalui :
 - a. Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra
Sasaran dan indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 secara substansi sesuai dengan sasaran dan indikator sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026,
 Secara keseluruhan, kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 telah tercapai 100%, sehingga dapat diartikan bahwa seluruh sasaran dan indikator sasaran pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 telah terpetakan langsung/relevan substansinya dengan sasaran dan indikator sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
 - b. Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja
Sasaran dan indikator sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 secara substansi sesuai dengan sasaran dan indikator sasaran Renstra Perangkat daerah Tahun 2021-2026,
 Secara keseluruhan, kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dengan Renstra Perangkat daerah Tahun 2021-2026 telah tercapai 100%, sehingga dapat diartikan bahwa seluruh sasaran dan indikator sasaran pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 telah terpetakan langsung/relevan dengan sasaran dan indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
 - c. Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPd.
Sasaran dan indikator sasaran RKPd Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 secara substansi sesuai dengan sasaran dan indikator sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026
 Secara keseluruhan, kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPd Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 telah tercapai 100%, sehingga dapat diartikan bahwa seluruh sasaran dan indikator sasaran pada RKPd Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 telah terpetakan langsung/relevan dengan sasaran dan indikator sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

- d. Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS

Sasaran dan indikator sasaran KUA PPAS Tahun 2022 secara substansi sesuai dengan sasaran dan indikator sasaran RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, dengan hasil kesesuaian

Secara keseluruhan, kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara KUA PPAS Tahun 2022 dengan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 telah tercapai 100%, sehingga dapat diartikan bahwa seluruh sasaran dan indikator sasaran pada KUA PPAS Tahun 2022 telah terpetakan langsung/relevan dengan sasaran dan indikator sasaran RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

Pada tahun 2021 ini target pada indikator ini telah mencapai 100% Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

- 1) Mengoptimalkan pelaksanaan Musrenbang RKPD dan RPJMD
- 2) Melakukan orientasi penyamaan pemahaman dan persepsi dalam Penyusunan sasaran dan indikator sasaran dalam RPJMD dengan Penyusunan Cascading.
- 3) Mengoptimalkan pelaksanaan Verifikasi Renstra Perangkat Daerah untuk melihat keselarasan dan konsistensi sasaran, indikator sasaran serta program dan indikator program antara RPJMD dengan Renstra.
- 4) Mengoptimalkan verifikasi Renja Perangkat Daerah untuk melihat keselarasan dan konsistensi sasaran, indikator sasaran serta program beserta indikator program antara Renja, RKPD dengan RPJMD.
- 5) Merumuskan definisi operasional Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Program pada Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah guna menjaga konsistensi perencanaan dan panganggaran serta sebagai pegangan semua pihak dalam pelaksanaan dan monitoring.

Untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian target kinerja pada sasaran strategis pertama yaitu Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan sesuai target yaitu konsistensi dan kesesuaian antar dokumen perencanaan didukung dengan anggaran sebesar Rp. 9.446.759.882 dan terealisasi Rp. 9.051.256.118,- atau 96.8%. Anggaran tersebut tersebar pada 2 program, 6 kegiatan dan 38 sub kegiatan yaitu :

- 1) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan sasaran meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial serta menerapkan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas dalam rangka menjaga sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Melalui program ini, sampai dengan triwulan IV telah dilaksanakan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dengan sub kegiatan :
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- b. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), dengan sub kegiatan :
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
- c. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dengan sub kegiatan :
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

- 2) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan sasaran meningkatkan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah dalam rangka menjaga keselarasan dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah.

Melalui program ini, sampai dengan triwulan IV telah dilaksanakan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, dengan sub kegiatan :
 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
 - Pelaksanaan Konsultasi Publik
 - Pelaksanaan Musrenbang Provinsi
 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
- b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi
- c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi
 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

2. Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Organisasi, dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan target nilai BB (72,59).

Indikator kinerja ini dapat dicapai 100%, dimana pada tahun 2021 nilai pelaporan kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan hasil evaluasi oleh Inspektorat Nomor : 04.20/INSP-LAKIP/III-2021 tanggal 30 Maret 2021 memperoleh nilai 74,90% dengan kategori BB.

Guna mencapai target sasaran Meningkatkan Tata Kelola Organisasi dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, telah dilakukan beberapa upaya antara lain :

- 1) Menyempurnakan cascading kinerja Bappeda

- 2) Menyusun Renstra yang selaras dengan RPJMD
- 3) Membuat Peta Proses Bisnis sesuai dengan Renstra
- 4) Menerapkan e-kinerja
- 5) Menerapkan e-kinerja

Untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian target kinerja pada sasaran strategis kedua yaitu Meningkatkan tata kelola organisasi dengan indikator nilai evaluasi akuntabilitas kinerja yang tercapai sebesar 100%, didukung dengan anggaran sebesar Rp. 13.692.041.639,- dan terealisasi Rp. 13.491.836.394,- atau 98,54%. Anggaran tersebut tersebar pada 1 program, 8 kegiatan 40 Sub Kegiatan yaitu : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan 8 kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3.5 Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dalam tahun anggaran 2021, pada APBD Perubahan 2021 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi belanja sebesar Rp. 23.158.801.521,- dan terealisasi sebesar Rp 22.543.092.512,- jumlah tersebut mencapai 97,34 % dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.8
Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan APBD
Tahun 2021

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.692.041.639,00,-	13.491.836.394,00,-	98,54
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.549.446.189,00,-	2.533.415.648,00,-	99,37
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Daerah	6.917.313.693,00,-	6.517.840.470,00,-	94,23
Jumlah	23.158.801.521,00,-	22.543.092.512,00,-	97,34

Sumber : Laporan Keuangan Tahun 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 22.543.092.512,- atau dalam bentuk persentase sebanyak 97,34 %. Untuk Belanja pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai anggaran sebesar Rp. 13.692.041.639,- telah direalisasikan sebesar Rp. 13.491.836.394 atau dalam bentuk persentase sebanyak 98,54%. Untuk Belanja pada Proram Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai anggaran sebesar Rp. 2.549.446.189,- telah direalisasikan sebesar Rp. 2.533.415.648,- atau dalam bentuk persentase sebanyak 99,37%. Untuk Belanja pada Program Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai anggaran sebesar Rp. 6.917.313.693,- telah direalisasikan sebesar Rp. 6.517.840.470,- atau dalam bentuk persentase sebanyak 94,23%.

Sementara itu, melalui anggaran dekonsentrasi (APBN) Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021 juga mendapatkan anggaran Dekonsentrasi BAPPENAS melalui Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-055.01.3.080019/2021 dengan pagu dana sebesar Rp. 958.891.000,- (sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan satu ribu rupiah) yang dikelola oleh Satuan Kerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Namun seiring masih belum berakhirnya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terpuruknya perekonomian di Indonesia, pemerintah dengan seksama mengambil kebijakan untuk merasionalisasi APBN Tahun Anggaran 2021. Rasionalisasi ini didasari surat Menteri Keuangan Nomor S-584/MK.02/2021 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian PPN/Bappenas pada tanggal 08 Juli 2021 dan surat Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksanaan Kementerian PPN/Bappenas Nomor 08590/KU.01.03/B.04/T/07/2021 tanggal 15 Juli 2021 perihal Penyampaian Rencana Refocusing Anggaran Satker Dana Dekonsentrasi TA 2021. Pagu anggaran yang sebelumnya sebesar Rp. 958.891.000,- dirasionalisasikan menjadi Rp. 208.969.000,-. Beberapa kegiatan yang dirasionalisasikan untuk tidak dilaksanakan seperti Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Data Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Nasional berbagi Pakai dalam Rencana Aksi Satu Data Indonesia.

Perkembangan serapan anggaran sampai akhir tahun 2021 adalah sebesar Rp. 199.540.600,- atau mencapai 95,49% dari total anggaran sebesar Rp. 208.969.000,-. Serapan anggaran berdasarkan masing-masing belanja yang tercantum pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian PPN/Bappenas

Tabel 3.10
Anggaran dan Realisasi Dana Dekonsentrasi
Tahun 2021

Kode	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
521115	Honor Output Kegiatan	68.650.000	60.230.000	87,73
521211	Belanja Bahan	63.799.000	63.799.000	100,00
524111	Belanja Jasa Profesi	28.300.000	28.300.000	100,00
524111	Belanja Perjalanan Dinas	48.220.000	47.211.600	97,90
Jumlah		208.969.000	199.540.600	95,49

3.6 Pencapaian Target Kinerja Program dan Kegiatan

Untuk melaksanakan Fungsi Penunjang Perencanaan, Bappeda Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi APBD pada tahun 2021 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp. 23.158.801.521,- dengan realisasi sebesar Rp. 22.543.092.512 atau sebesar 97,34% yang didukung oleh 3 Program, 14 Kegiatan dan 78 Sub Kegiatan. Berikut terinci pagu dana dan realisasi tahun 2021 dimaksud :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 8 Kegiatan :
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp. 387.984.160 dan realisasi sebesar Rp386.223.769,-atau 99,55%.Outcome dari kegiatan ini adalah Persentase Sinkronisasi perencanaan dan kinerja perangkat daerah dengan target 100% dan tercapai 100%.
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 8.659.209.225 dan realisasi sebesar Rp. 8.566.864.944,- atau 98,93%. Outcome Kegiatan ini adalah Persentase Tertib Administrasi Keuangan dengan target 100% dan tercapai 100%.
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 144.150.176,-realisasi Rp. 143.007.646,- atau 99,21%. Outcome kegiatan ini adalah Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah dengan target 100% tercapai 100%.
 - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah dengan anggaran Rp. 83.720.032,-realisasi 83.312.550,- atau 99,51%. Outcome kegiatan ini adalah Persentase Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target 100% tercapai 100%.
 - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah dengan anggaran Rp. 2.194.214.397,-realisasi Rp.2.118.225.750,- atau 96,54%. Outcome kegiatan ini adalah Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target 100% tercapai 100%.
 - f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah anggaran Rp. 104.771.400,- realisasi Rp. 100.979.000,- atau 96,38%. Outcome kegiatan ini adalah Persentase ketersediaan barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan dengan target 100% tercapai 100%.
 - g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp. 1.606.274.999,-,-realisasi Rp. 1.590.113.744,- atau 98,99%. Outcome kegiatan ini adalah Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah dengan target 100% tercapai 100%.
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp. 5.11.717.250,- realisasi Rp. 503.108.991,- atau 98,32%. Outcome kegiatan ini adalah Persentase Barang Milik Daerah dengan kondisi Baik dengan target 100% tercapai 100.
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan 3 Kegiatan :
 - a. Kegiatan Penyusunan, Perencanaan dan Pendanaan, dengan anggaran Rp. 1.365.724.408,- dan realisasi sebesar Rp.1.360.815.026,- atau 99,64%. Outcome

dari program ini adalah Dokumen Perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dengan target kinerja 100% tercapai 100%.

- b. Kegiatan Analisa Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan anggaran Rp. 394.348.220,- dan realisasi sebesar Rp. 392.049.372,- atau 99,42%. Outcome dari program ini adalah Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah dengan target 100% tercapai 100%.
 - c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran Rp. 789.373.561,- dan realisasi sebesar Rp. 780.551.250,- atau 98,88%. Outcome dari program ini adalah Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan dengan target 100% tercapai 100%.
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 3 Kegiatan :
- a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan anggaran Rp. 1.627.533.710,- dan realisasi Rp. 1.574.451.740,- atau 96,74%. Outcome dari program ini adalah Persentase kesesuaian dengan pelaksanaan dengan target 100% tercapai.
 - b. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan anggaran Rp. 985.864.535,- dan realisasi Rp. 977.464.605,- atau 99,15%. Outcome dari program ini adalah Persentase kesesuaian dengan pelaksanaan dengan target 100% tercapai.
 - c. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan anggaran Rp. 4.303.915.448,- dan realisasi Rp. 3.965.924.125,- atau 92,15%. Outcome dari program ini adalah Persentase kesesuaian dengan pelaksanaan dengan target 100% tercapai.

Berikut potret pencapaian target kinerja program dan kegiatan Bappeda Provinsi Sumatera Barat selama masa kerja Tahun 2021 :

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan APBD Tahun 2021
Realisasi Serapan Anggaran Per Sub Kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

NO	PROGRAM	OUTCOME PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INPUT (ANGGARAN)			INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN/SUB KEGIATAN			
				ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%) CAPAIAN	OUTPUT KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI (Rp)	(%) CAPAIAN
	PERENCANAAN			23.158.801.521						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		13.692.041.639	13.491.836.394	98,54		100%	100%	100,00
		Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	387.984.160	386.223.769	99,55	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	100%	100,00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	317.595.130	317.080.969	99,84	Jumlah dokumen perangkat daerah yang disusun	3 dokumen	3 dokumen	100,00
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.009.040	6.791.400	96,89	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100,00
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.931.540	7.719.400	97,33	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100,00
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.609.040	7.550.400	99,23	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100,00
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.956.090	7.848.800	98,65	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.846.830	22.497.800	98,47	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	100,00
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.036.490	16.735.000	98,23	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan	4 dokumen	4 dokumen	100,00
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.659.209.225	8.566.864.944	98,93	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	100%	100,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.318.238.825	8.228.752.244	98,92	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	84 orang	84 orang	100,00
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	263.204.000	261.144.400	99,22	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	22 orang	22 orang	100,00

NO	PROGRAM	OUTCOME PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INPUT (ANGGARAN)			INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN/SUB KEGIATAN			
				ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%) CAPAIAN	OUTPUT KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI (Rp)	(%) CAPAIAN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.335.000	19.966.400	98,19	Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	109 dokumen (24 Pengesahan SPJ, 85 SPP dan SPM)	109 dokumen (24 Pengesahan SPJ, 85 SPP dan SPM)	100,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.589.000	9.572.800	99,83	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	100,00
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	10.280.000	10.134.900	98,59	Jumlah Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	3 laporan	3 laporan	100,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	37.562.400	37.294.200	99,29	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	13 laporan	13 laporan	100,00
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	144.150.176	143.007.646	99,21	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	100,00
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.837.044	1.835.300	99,91	Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	100,00
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	108.400.000	107.283.146	98,97	Asuransi Barang Milik Daerah	12 unit	12 unit	100,00
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.357.132	14.350.200	99,95	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah (Inventaris Barang Semesteran, Tahunan dan Audited)	4 dokumen	4 dokumen	100,00
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.556.000	19.539.000	99,91	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	1 dokumen	1 dokumen	100,00
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	83.720.032	83.312.550	99,51	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100,00
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	65.250.000	64.902.000	99,47	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	87 Stel	87 Stel	100,00

NO	PROGRAM	OUTCOME PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INPUT (ANGGARAN)			INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN/SUB KEGIATAN			
				ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%) CAPAIAN	OUTPUT KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI (Rp)	(%) CAPAIAN
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12.566.032	12.520.550	99,64	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	2 Kali	2 Kali	100,00
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5.904.000	5.890.000	99,76	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan dan diikuti	2 Kali	2 Kali	100,00
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	-	-	100,00
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.194.214.397	2.118.225.750	96,54	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100,00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.919.000	19.914.200	99,98	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	25 Jenis	25 Jenis	100,00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	777.030.504	718.704.370	92,49	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	12 jenis	12 jenis	100,00
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	37.718.300	37.492.700	99,4	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	20 jenis	20 jenis	100,00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	305.132.020	292.517.580	95,87	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	81 Jenis	81 Jenis	100,00
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.622.353	17.622.250	100	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	10 jenis	10 jenis	100,00
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.501.920	10.500.000	99,98	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	6 jenis	6 jenis	100,00
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah tamu yang dilayani	orang	orang	100,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	766.290.300	761.474.650	99,37	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	1 Laporan	1 Laporan	100,00
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	260.000.000	260.000.000	100	- Jumlah Tenaga IT yang dimanfaatkan. - Jumlah Aplikasi/Modul yang dikembangkan.	4 Orang	4 Orang	100,00

NO	PROGRAM	OUTCOME 'PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INPUT (ANGGARAN)			INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN/SUB KEGIATAN			
				ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%) CAPAIAN	OUTPUT KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI (Rp)	(%) CAPAIAN
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.400.000	72.300.500	97,18	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54 unit	54 unit	100,00
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	178.736.250	178.606.000	99,93	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	1 unit	1 unit	100,00
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.810.000	32.379.500	93,02	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/direhab	42 unit	42 unit	100,00
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi		2.549.446.189	2.533.415.648	99,37	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	80%	80%	100,00
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.365.724.408	1.360.815.026	99,64	Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	3 dokumen	3 dokumen	100,00
			Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	14.828.100	14.755.400	99,51	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100,00
			Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	58.238.000	57.630.300	98,96	- Jumlah Dokumen Hasil Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya. - Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Pelaksanaan SDGs 2021-2026.	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	100,00

NO	PROGRAM	OUTCOME 'PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INPUT (ANGGARAN)			INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN/SUB KEGIATAN			
				ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%) CAPAIAN	OUTPUT KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI (Rp)	(%) CAPAIAN
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	789.373.561	780.551.250	98,88	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	75%	75%	100,00
			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	90.508.071	86.896.100	96,01	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	2 dokumen	2 dokumen	100,00
			Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan hasil pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah	-	-	100,00
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	53.028.090	51.635.050	97,37	Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	3 laporan	3 laporan	100,00
			Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	645.837.400	642.020.100	99,41	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi/evaluasi	72 dokumen	72 dokumen	100,00
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD provinsi dengan Renstra SKPD Provinsi, RKPD Provinsi dengan Renja SKPD provinsi dan RPJMD provinsi dengan RKPD provinsi		6.917.313.693	6.517.840.470	94,23	Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD provinsi dengan Renstra SKPD Provinsi, RKPD Provinsi dengan Renja SKPD provinsi dan RPJMD provinsi dengan RKPD provinsi	85%	85%	100,00
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.627.533.710	1.574.451.740	96,74	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3 dokumen	3 dokumen	100,00
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	176.643.250	174.030.443	98,52	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	3 dokumen	3 dokumen	100,00

NO	PROGRAM	OUTCOME 'PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INPUT (ANGGARAN)			INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN/SUB KEGIATAN			
				ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%) CAPAIAN	OUTPUT KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI (Rp)	(%) CAPAIAN
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	208.426.000	208.140.900	99,86	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pemerintahan	5 rumusan	5 rumusan	100,00
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	6.654.150	6.440.050	96,78	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	1 Laporan	1 Laporan	100,00
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	46.619.250	45.885.050	98,43	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pemerintahan	1 laporan	1 laporan	100,00
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	312.591.110	288.627.769	92,33	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 dokumen	3 dokumen	100,00
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	522.960.000	503.708.800	96,32	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pembangunan Manusia	5 rumusan	5 rumusan	100,00
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	17.566.500	15.914.500	90,6	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	100,00
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	336.073.450	331.704.228	98,7	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	1 laporan	100,00

NO	PROGRAM	OUTCOME PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INPUT (ANGGARAN)			INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN/SUB KEGIATAN			
				ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%) CAPAIAN	OUTPUT KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI (Rp)	(%) CAPAIAN
			Pelaksanaan Konsultasi Publik	88.544.000	88.209.100	99,62	Jumlah Dokumen Berita Acara Konsultasi publik yang dilaksanakan	1 dokumen Berita Acara	1 dokumen Berita Acara	100,00
			Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	-			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100,00
			Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	292.042.400	290.543.800	99,49	Jumlah Dokumen Berita Acara Musrenbang Provinsi yang dilaksanakan	1 dokumen Berita Acara	1 dokumen Berita Acara	100,00
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	912.071.908	909.676.426	99,74	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun dan ditetapkan.	4 dokumen	4 dokumen	100,00
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	394.348.220	392.049.372	99,42	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	4 dokumen	4 dokumen	100,00
			Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	217.525.950	216.761.372	99,65	Jumlah Dokumen Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100,00
			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	61.615.450	61.218.700	99,36	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	1 dokumen	1 dokumen	100,00
			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	47.599.098	47.355.700	99,49	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota yang mendukung Indikator	1 dokumen	1 dokumen	100,00
			Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	67.607.722	66.713.600	98,68	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100,00

NO	PROGRAM	OUTCOME PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INPUT (ANGGARAN)			INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN/SUB KEGIATAN			
				ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%) CAPAIAN	OUTPUT KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI (Rp)	(%) CAPAIAN
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	985.864.535	977.464.605	99,15	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	3 dokumen	3 dokumen	100,00
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	185.483.000	182.101.912	98,18	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	3 dokumen	3 dokumen	100,00
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	210.339.550	210.274.250	99,97	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Perekonomian	5 rumusan	5 rumusan	100,00
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	10.636.550	10.513.600	98,84	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	100,00
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	85.163.900	84.603.196	99,34	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Perekonomian	1 laporan	1 laporan	100,00
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	246.671.485	244.766.997	99,23	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	3 dokumen	3 dokumen	100,00
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	215.280.000	213.751.400	99,29	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang SDA.	5 rumusan	5 rumusan	100,00

NO	PROGRAM	OUTCOME PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INPUT (ANGGARAN)			INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN/SUB KEGIATAN			
				ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%) CAPAIAN	OUTPUT KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI (Rp)	(%) CAPAIAN
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	3.552.003.630	3.224.071.383	90,77	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Infrastruktur	1 laporan	1 laporan	100,00
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	194.541.200	190.044.792	97,69	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	3 dokumen	3 dokumen	100,00
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	86.313.250	85.114.950	98,61	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Kewilayahan	5 rumusan	5 rumusan	100,00
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	8.505.800	8.063.150	94,8	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.	1 Laporan	1 Laporan	100,00
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	19.913.050	19.445.900	97,65	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	100,00

Sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021, 6 (enam) kegiatan yang diamanahkan pada Satker Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah selesai dilaksanakan 100 % dengan serapan anggaran sebesar 95,49% atau sebesar Rp. 199.540.600,- dari total anggaran sebesar Rp. 208.969.000,-. Serapan anggaran berdasarkan masing-masing jenis belanja yang tercantum pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Realisasi Serapan Anggaran Dekonsentrasi
Tahun 2021**

Kode	Program/Kegiatan/Output/ Sub Output/Komponen/Sub Komponen/Akun/Detail	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi	Sisa (Rp.)
01.06	Program Perencanaan Pembangunan Nasional	208.969.000	199.540.600	95,49	9.961.900
5246	Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang		-	-	
1	Penguatan Perencanaan Daerah dalam Koridor Prioritas Nasional	93.109.000	92.809.000	99,68	300.000
a	Penyelarasan indikator makro dan program (indikator dan target) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 serta RKP dengan RKP	1.000.000	1.000.000	100	-
1)	Sosialisasi Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional di Provinsi Sumatera Barat dalam RPJMN 2020 -2024	500.000	500.000	100	-
521211	Belanja Bahan	500.000	500.000	100	-
522151	Belanja Jasa Profesi	-	-	-	-
2)	Bimbingan Teknis dan Pendampingan Penyelarasan Isu Strategis, Indikator dan Target RKP 2022 dengan RKP Tahun 2022	500.000	500.000	100	-
521211	Belanja Bahan	500.000	500.000	100	-
521213	Honor Output Kegiatan	-	-	-	-
522151	Belanja Jasa Profesi	-	-	-	-
524111	Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-	-
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-	-
b	Sinkronisasi daftar data dan/atau Rencana Aksi Satu Data Indonesia	-	-	-	-
1)	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Data Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Berbagi Pakai	-	-	-	-

Kode	Program/Kegiatan/Output/ Sub Output/Komponen/Sub Komponen/Akun/Detail	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi	Sisa (Rp.)
	Dalam Rencana Aksi Satu Data Indonesia				
521211	Belanja Bahan	-	-	-	-
521213	Honor Output Kegiatan	-	-	-	-
522151	Belanja Jasa Profesi	-	-	-	-
524111	Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-	-
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-	-
c	Pengisian Aplikasi KRISNA – SELARAS, Aplikasi KRISNA DAK, pembahasan Kerangka Ekonomi Makro Regional, dan strategi pengembangan wilayah dalam rangka mendukung penyiapan bahan Rakorgub, Rakortek, dan Musrenbang	7.395.000	7.395.000	100,00	-
1)	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Bahan dan Keikutsertaan Dalam Acara Rakorgub, Rakortek, Musrenbang dan Musrenbangnas	7.395.000	7.395.000	100,00	-
521211	Belanja Bahan	7.395.000	7.395.000	100,00	-
522151	Belanja Jasa Profesi	-	-	-	-
524111	Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-	-
d	Penyusunan/Evaluasi RPJMD, Renstra dan Renja OPD Propinsi/Kabupaten/ Kota dalam rangka mendukung keselarasan dan pencapaian prioritas nasional	500.000	500.000	100	-
1)	Bimtek dan Pendampingan Penyusunan Renstra dan Renja OPD Provinsi dan Kab/Kota se Sumatera Barat dengan RPJMD dan memperhatikan Renstra Kementerian dan Lembaga dalam rangka mendukung keselarasan dan pencapaian prioritas nasional	500.000	500.000	100	-
521211	Belanja Bahan	500.000	500.000	100	-
521213	Honor Output Kegiatan	-	-	-	-
522151	Belanja Jasa Profesi	-	-	-	-
524111	Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-	-
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-	-
e	Penyusunan/Evaluasi RKPD dalam rangka mendukung keselarasan dengan prioritas nasional mendukung penyiapan bahan Rakorgub,	84.214.000	83.914.000	99,64	300.000

Kode	Program/Kegiatan/Output/ Sub Output/Komponen/Sub Komponen/Akun/Detail	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi	Sisa (Rp.)
	Rakortek, dan Musrenbang				
1)	Evaluasi Keselarasan RKPD Kab/Kota dan RKPD Provinsi Dalam Mendukung Keselarasan Dengan Prioritas Nasional Tahun 2021	84.214.000	83.914.000	99,64	300.000
521211	Belanja Bahan	36.654.000	36.654.000	100,00	-
521213	Honor Output Kegiatan	3.850.000	3.550.000	92,21	300.000
522151	Belanja Jasa Profesi	28.300.000	28.300.000	100,00	-
524111	Belanja Perjalanan Dinas	15.410.000	15.410.000	100,00	-
2	Fasilitasi Kesekretariatan Dekonsentrasi di Provinsi	115.860.000	106.731.600	92,12	9.128.400
521213	Honor Output Kegiatan	64.800.000	56.680.000	87,47	8.120.000
521211	Belanja Bahan	18.250.000	18.250.000	97,08	533.500
524111	Belanja Perjalanan Dinas	32.810.000	31.801.600	96,93	1.008.400

Pada bagian ini dijelaskan tentang pencapaian target keluaran dari pelaksanaan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DIPA Kegiatan Dekonsentrasi APBN Bappenas Tahun Anggaran 2021 Satker Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat (080019) dengan DIPA Nomor : SP DIPA-055.01.3.080019/2021 sampai dengan kondisi Triwulan IV Tahun 2021 :

A. Penyelarasan Indikator Makro dan Program (Indikator dan Target) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 serta RKP dengan RKPD, yang terdiri atas 2 (dua) kegiatan dan telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kegiatan yaitu :

1) Sosialisasi Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional di Provinsi Sumatera Barat dalam RPJMN 2020-2024

Tujuan pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional di Provinsi Sumatera Barat dalam RPJMN 2020-2024 adalah meningkatkan pemahaman aparatur perencanaan dilingkup Pemerintah Provinsi dan Bappeda Kab/Kota se Sumatera Barat tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024 dan RKP 2022 sebagai acuan dalam menyusun RPJMD Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2021-2025 pasca pilkada serentak dan menyusun RKPD Tahun 2022 untuk Provinsi dan 19 Kab/Kota di Sumatera Barat.

Output yang dihasilkan dari Kegiatan Sosialisasi Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional di Provinsi Sumatera Barat dalam RPJMN 2020-2024 adalah Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024 dan RKP 2022 dipahami oleh Kepala Bappeda Provinsi dan Kab/Kota se Sumatera Barat sebagai acuan dalam menyusun 14 buah RPJMD Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2021-2025 pasca pilkada serentak dan menyusun RKPD Tahun 2022 untuk Provinsi dan 19 Kab/Kota di Sumatera Barat.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2021 secara virtual meeting yang diikuti oleh 100 orang peserta dari OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Bappeda Kab/Kota se Sumatera Barat, Pejabat Struktural dan Fungsional Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

Narasumber pada Sosialisasi Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional di Provinsi Sumatera Barat dalam RPJMN 2020-2024 ini adalah Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA. Ph.D, Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana Direktorat Tata Ruang dan Penanganan Bencana Kementerian PPN/Bappenas dengan substansi materi sebagai berikut :

1. Geostrategis dan Isu Strategis Sumatera Barat.
2. Arah Kebijakan Pembangunan RPJMN 2020-2024
3. Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah

Manfaat yang diperoleh peserta dari pelaksanaan Sosialisasi Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional di Provinsi Sumatera Barat dalam RPJMN 2020-2024 ini adalah:

1. Peserta sosialisasi memahami kondisi capaian pembangunan daerah sehingga bisa menyamakan persepsi dalam merumuskan akar-akar permasalahan yang harus dicarikan solusinya dalam arah kebijakan serta program pada dokumen pembangunan tahun berikutnya.
2. Peserta sosialisasi memahami makna sinergitas dan harmonisasi antar dokumen Pusat dan Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan daerah.
3. Peserta sosialisasi memahami kerangka logika perencanaan dan penganggaran sehingga memudahkan dalam merumuskan permasalahan, merumuskan tujuan dan sasaran, merumuskan strategi dan arah kebijakan, merumuskan program dan kegiatan prioritas serta menetapkan prioritas anggaran.

2. Bimbingan Teknis dan Pendampingan Penyelarasan Isu Strategis, Indikator dan Target RKP 2022 dengan RKPD Tahun 2022

Tujuan pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis dan Pendampingan Penyelarasan Isu Strategis, Indikator dan Target RKP 2022 dengan RKPD Tahun 2022 adalah meningkatkan pemahaman aparatur perencana dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi dengan menggunakan pendekatan THIS (Tematik, Holistik, Integratif, Spasial) dalam upaya penyelarasan program dan proyek prioritas pada RKP dan RKPD sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagai dasar dalam penyusunan RKPD Tahun 2022.

Output yang dihasilkan melalui Kegiatan Bimbingan Teknis dan Pendampingan Penyelarasan Isu Strategis, Indikator dan Target RKP 2022 dengan RKPD 2022 ini adalah meningkatnya pemahaman 100 orang SDM Perencanaan Provinsi dan Kab/Kota se Sumatera Barat dalam menyusun dokumen perencanaan daerah yang berkualitas secara tematik, holistic, integrasi dan spasial untuk mencapai keselarasan dokumen perencanaan pusat dan daerah tahun 2022.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 1 April 2021 secara virtual meeting yang diikuti oleh 100 orang peserta dari OPD Provinsi Sumatera Barat, Pejabat Struktural dan Fungsional Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

Narasumber pada Bimbingan Teknis Penyelarasan Isu Strategis, Indikator dan Target RKP Tahun 2022 dengan RKPD Tahun 2022 ini berasal dari Kementerian PPN/Bappenas dengan substansi materi antara lain :

1. Metode Penyusunan Dokumen Perencanaan melalui Pendekatan THIS untuk Sinkronisasi antar RKP dengan RKPD Tahun 2022.

2. Metode Perumusan Isu strategis, Indikator dan Target dalam Dokumen Perencanaan Daerah Tahunan (RKPD) yang Selaras dengan RKP Tahun 2022.

Manfaat yang diperoleh melalui Bimbingan Teknis Penyelarasan Isu Strategis, Indikator dan Target RKP Tahun 2022 dengan RKPD Tahun 2022 ini adalah :

1. Peserta mengetahui bagaimana menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi dengan menggunakan pendekatan THIS (Tematik, Holistik, Integratif, Spasial) sebagaimana yang diamanatkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
2. Peserta memahami penggunaan teori pohon masalah serta teori perubahan dalam mengidentifikasi permasalahan, penyebab permasalahan serta merumuskan isu strategis.

B. Pengisian Aplikasi KRISNA-SELARAS, Aplikasi KRISNA DAK, Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro Regional, dan Strategi Pengembangan Wilayah dalam Rangka Mendukung Penyiapan Bahan Rakorgub, Rakortek, dan Musrenbang yang terdiri atas 1 kegiatan, yaitu :

1) Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Bahan dan Keikutsertaan dalam Acara Rakorgub, Rakortek, Musrenbang dan Musrenbangnas

Pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Bahan dan Keikutsertaan dalam Acara Rakorgub, Rakortek, Musrenbang dan Musrenbangnas ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam tahapan dan mekanisme perencanaan pembangunan nasional, regional dan teknis daerah.

Output yang dihasilkan melalui Kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Bahan dan Keikutsertaan dalam Acara Rakorgub, Rakortek, Musrenbang dan Musrenbangnas ini adalah terlaksananya rapat koordinasi dan pembahasan internal serta lintas OPD dan Kab/kota dalam menyusun bahan perencanaan pembangunan dan keikutsertaan dalam tahapan dan mekanisme perencanaan pembangunan nasional, regional dan teknis daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi dan pembahasan internal lintas OPD dan Kab/kota dalam menyusun bahan perencanaan pembangunan dan keikutsertaan dalam tahapan dan mekanisme perencanaan pembangunan nasional, regional dan teknis daerah. Dalam hal ini, kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

1. Pendalaman Isu Strategis Daerah serta Memperkuat Sinkronisasi Kebijakan dan Program Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Proyek Prioritas Nasional Tahun 2022 yang dilaksanakan tanggal 5 Februari 2021 melalui Kunjungan Kerja Kementerian PPN/Bappenas ke Sumatera Barat
2. Persiapan Desk Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2022 dan Strategi Pengembangan Wilayah Tahun 2022 yang dilaksanakan tanggal 10 Februari 2021.

Melalui kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Bahan dan Keikutsertaan dalam Acara Rakorgub, Rakortek, Musrenbang dan Musrenbangnas ini diharapkan dapat terkoordinirnya penyusunan bahan perencanaan pembangunan daerah dan keikutsertaan dalam tahapan dan mekanisme perencanaan pembangunan nasional, regional dan teknis daerah.

C. Penyusunan/Evaluasi RKPD dalam Rangka Mendukung Keselarasan dengan Prioritas Nasional yang terdiri atas 1 kegiatan, yaitu :

1) Evaluasi Keselarasan RKPD Kab/Kota dan RKPD Provinsi dalam Mendukung Keselarasan dengan Prioritas Nasional Tahun 2021

Pelaksanaan kegiatan Evaluasi Keselarasan RKPD Kab/Kota dan RKPD Provinsi dalam Mendukung Keselarasan dengan Prioritas Nasional Tahun 2021 ini bertujuan untuk mengevaluasi dokumen tahunan daerah yang selaras dengan prioritas nasional dalam bentuk melakukan penilaian terhadap perencanaan pembangunan daerah berupa Penghargaan Pembangunan Daerah. Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mendorong pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mempersiapkan dokumen perencanaan dengan baik, konsisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan.
2. Mendorong integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara perencanaan pusat dan daerah.
3. Mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan.
4. Mendorong pemerintah daerah untuk berinovasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Adapun sasaran yang akan dicapai dengan pemberian apresiasi pembangunan ini adalah terciptanya keserasian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara pusat dan daerah. PPD tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 0318/D.9/01/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Sosialisasi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2021 yang terdiri atas beberapa tahapan, yaitu :

1. Pembentukan Tim Penilai Independen, Tim Penilai Utama dan Tim Penilai Teknis Tahun 2021
2. Sosialisasi Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 bagi Kab/Kota
3. Pengumpulan Dokumen
4. Penilaian Tahap I (Penilaian Dokumen) PPD Tahun 2021
5. Penilaian Tahap II (Presentasi dan Wawancara) PPD Tahun 2021 ke Kab/Kota Nominasi
6. Penetapan Pemenang Kab/Kota PPD Tingkat Provinsi Tahun 2021

Manfaat yang didapat melalui kegiatan Koordinasi Penilaian dan Penghargaan terhadap Dokumen Perencanaan Daerah antara lain :

1. Meningkatnya motivasi, komitmen dan peran aktif pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun dokumen perencanaan dengan baik, dan melaksanakan pembangunan di daerah dengan efektif dan efisien.
2. Lahirnya inovasi-inovasi kreatif dan dinamis dari pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan.

D. Penyusunan/Evaluasi RPJMD, Renstra dan Renja OPD Propinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung keselarasan dan pencapaian prioritas nasional yang terdiri atas 1 kegiatan, yaitu :

1) Bimtek dan Pendampingan Penyusunan Renstra dan Renja OPD Provinsi dan Kab/Kota se Sumatera Barat dengan RPJMD dan memperhatikan

Renstra Kementerian dan Lembaga dalam rangka mendukung keselarasan dan pencapaian prioritas nasional

Tujuan pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra dan Renja Bappeda Provinsi dan Bappeda Kabupaten/Kota se Sumatera Barat adalah meningkatkan pemahaman SDM Perencanaan Bappeda Provinsi dan Kab/Kota se Sumatera Barat dalam menyusun dokumen perangkat daerah (Renstra dan Renja) yang sinkron dan harmonis antara Renstra dan Renja Bappenas, Bappeda Provinsi dan Kab/Kota.

Output yang dihasilkan melalui Kegiatan Bimtek Teknis Penyusunan Renstra dan Renja Bappeda Provinsi dan Bappeda Kabupaten/Kota se Sumatera Barat ini adalah Meningkatnya pemahaman SDM Perencanaan Bappeda Provinsi dan Kab/Kota se Sumatera Barat dalam menyusun dokumen perangkat daerah (Renstra dan Renja) yang sinkron dan harmonis antara Renstra dan Renja Bappenas, Bappeda Provinsi dan Kab/Kota/.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7 April 2021 secara virtual meeting yang diikuti oleh 100 orang peserta dari Bappeda Provinsi Sumatera Barat dan Bappeda Kabupaten/Kota.

Narasumber pada Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra dan Renja Bappeda Provinsi dan Bappeda Kabupaten/Kota se Sumatera Barat ini berasal dari :

1. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
2. Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan I Kementerian PAN RB.

Substansi materi pada Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra dan Renja Bappeda Provinsi dan Bappeda Kabupaten/Kota se Sumatera Barat ini adalah :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan (Renstra Perangkat Daerah) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
2. Tata Cara Penyusunan Renja Kerja (Renja) Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
3. Logical Framework dalam Penyusunan Cascading.

Manfaat yang diperoleh melalui Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra dan Renja Bappeda Provinsi dan Bappeda Kabupaten/Kota se Sumatera Barat ini adalah :

1. Peserta mengetahui bagaimana menyusun dokumen perencanaan pembangunan (Renstra dan Renja) melalui penggunaan konsep manajemen strategis perumusan substansi pada Setiap Bab dalam Renstra dan Renja termasuk dalam Menyusun Tabel-Tabel Renstra dan Renja sesuai Permendagri No. 86 Tahun 2017 sebagai Kisi-kisi Verifikasi Renstra dan Renja Perangkat Daerah;
2. Peserta memahami penggunaan teori Logical Framework dalam Penyusunan Cascading.

E. Fasilitas Kesekretariatan Dekonsentrasi di Provinsi untuk Operasionalisasi Sekretariat Pengelola Dekonsentrasi di Provinsi

Kegiatan ini bertujuan menunjang kelancaran pelaksanaan Dekonsentrasi Satker Bappeda Provinsi Sumatera Barat, dengan ruang lingkup kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan TOR kegiatan
2. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB)

3. Melaksanakan tertib administrasi kegiatan, keuangan dan pelaporan
4. Mengikuti Rapat, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan oleh Kementerian Bappenas.
5. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan, laporan BMN, laporan persediaan setiap bulan, triwulan, semester dan akhir tahun

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat berisikan 2 (dua) laporan kinerja, yaitu Laporan Capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Capaian Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat selaku instansi penunjang perencanaan dengan hasil capaian pada tahun 2021 sebagai berikut :

1. Capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tahun 2021 dilihat dari capaian indikator makro yang diukur melalui 6 indikator yaitu 1) Indeks Pembangunan Manusia dengan capaian indeks sebesar 72,65; 2) Tingkat Kemiskinan dengan capaian 6,04%; 3) Angka Pengangguran dengan capaian 179,65 ribu orang; 4) Pertumbuhan Ekonomi dengan capaian pertumbuhan yang berkontraksi pada level 3,29%; 5) PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dengan capaian sebesar Rp. 45,29 juta; 6) Ketimpangan Pendapatan yang diukur dengan Gini Rasio dengan capaian indeks 0.300.
2. Capaian kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 dilihat dari serapan APBD berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) adalah sebesar sebesar Rp. 22.543.092.512,-, atau sebesar 97,34 % dari total DPA TA 2021 yang sebesar Rp. 23.158.801.521,-. yang didukung melalui 3 Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Daerah yang terdiri dari 14 Kegiatan dan 78 Sub kegiatan. Sementara itu, melalui anggaran dekonsentrasi (APBN) yang diamanahkan kepada Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 208.969.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 199.007.100,- atau mencapai 95,23%.
3. Pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat meliputi 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran, dengan capaian indikator Sasaran Strategis 1 (Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan) adalah dengan predikat **amat baik** (100%), dan sasaran strategis 2 (Meningkatkan tata kelola organisasi) dengan predikat **amat baik** (100%). Dengan demikian pencapaian indikator sasaran strategis Bappeda pada tahun 2020 secara rata-rata adalah **amat baik** (100%).

4.2 Saran

Agar kegiatan dapat terlaksana sesuai target, ke depannya perlu perencanaan yang akurat namun fleksibel untuk mengantisipasi permasalahan pemangkasan anggaran, dan atau reposisi anggaran akibat kebijakan-kebijakan yang mungkin muncul. Disamping itu perlu dibuat ranking prioritas kegiatan sesuai kebutuhan organisasi agar pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana lebih optimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda selaku instansi penunjang perencanaan.